

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah serangkaian analisis yang telah dilakukan, peneliti menemukan hubungan dari tiap tahapan analisis. Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini, maka peneliti mencoba menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada Bab I, yaitu:

1. Surat Kabar Harian Media Indonesia mencitrakan Jusuf Kalla sebagai sosok yang termasuk layak menjadi presiden Indonesia. Jusuf Kalla dianggap sebagai pelopor bagi kultur demokrasi kompetisi bangsa ini. Jusuf Kalla sebagai seorang pemimpin digambarkan memiliki karakter yang pro demokrasi, nasionalis, pragmatis, cepat tanggap dan bertanggungjawab dalam mengatasi permasalahan (*problem solver*) dan hal inilah yang menjadi kekuatan Jusuf Kalla untuk membangun bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan hingga 2014, jika Jusuf Kalla dipilih dan dipercaya oleh rakyat Indonesia dalam pemilu presiden 2009.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan redaksi Media Indonesia, khususnya tim editorial SKH Media Indonesia, terungkap bahwa sebagai penulis editorial dalam menginternalisasikan tema menjadi sebuah teks editorial tetap berpijak pada kemandirian media serta menyajikannya secara terus terang, lugas dan tegas. Faktor kepemilikan media dalam hal ini adalah Surya Paloh sebagai *owner* utama SKH Media Indonesia memang berpengaruh, tetapi hanya pada

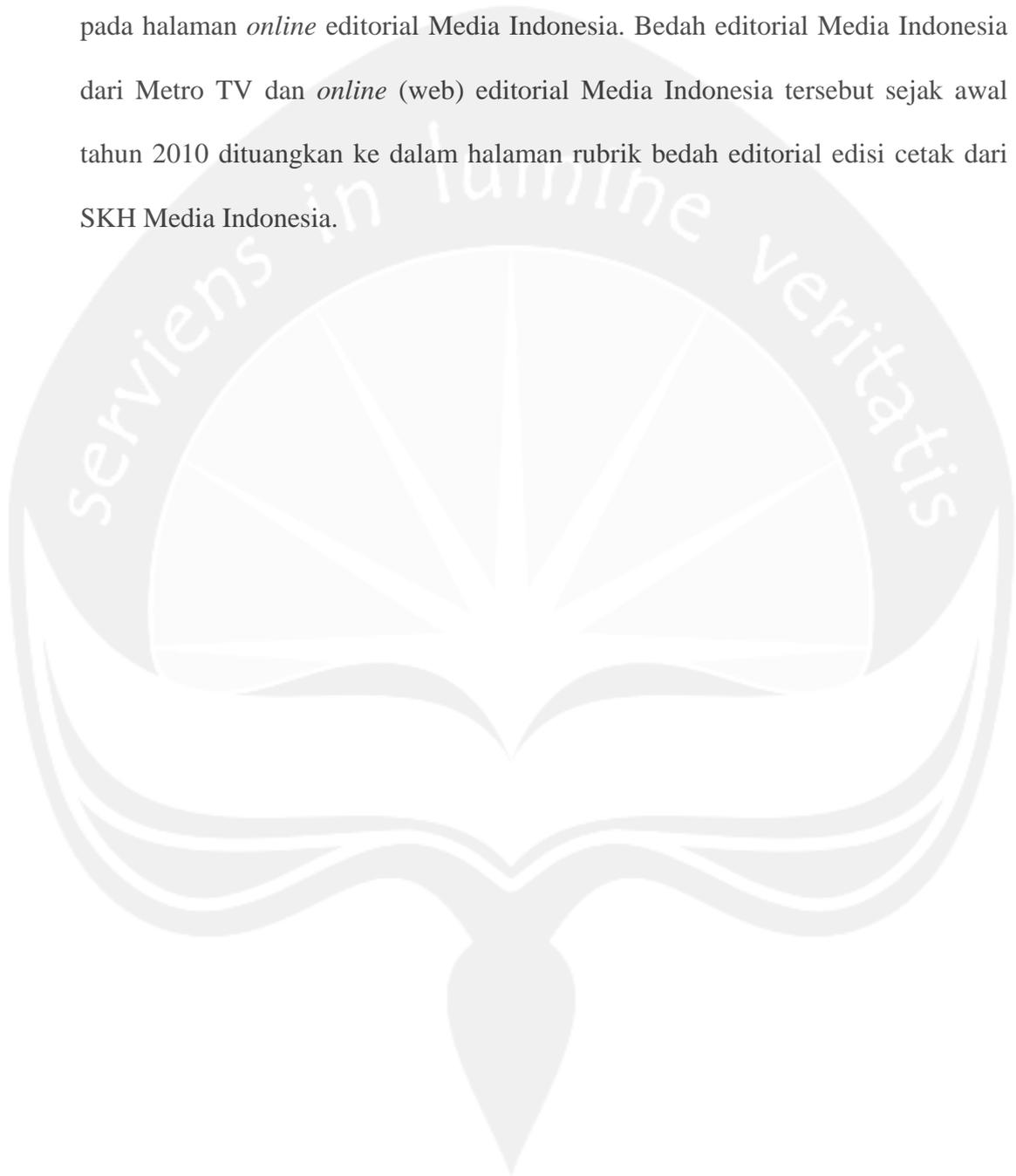
tahap penentuan arah sikap editorial untuk memberikan tekanan (*interest*) lebih pada posisi Jusuf Kalla sebagai calon presiden 2009. Editorial SKH Media Indonesia memiliki kebijakan yang menutup akses orang yang masuk dalam politik praktis untuk ikut campur tangan ranah penulisan editorialnya. Sehingga editorial Media Indonesia tetap kuat dalam visinya yaitu independen, inovatif, lugas, terpercaya dan paling berpengaruh. Selain itu, Jusuf Kalla dan editorial Media Indonesia memiliki kesamaan karakter yaitu menjunjung tinggi demokrasi.

B. SARAN

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini banyak kelemahan. Selama proses penelitian, banyak kendala yang dialami peneliti. Secara individu, peneliti mendapati kesulitan dalam membedah kalimat atau makna kata pada editorial dalam analisis level teks, mungkin disebabkan peneliti kurang tajam menangkap *frame* media pada teks berita. Sedangkan level konteks, kendala dari pihak media seperti ketidakbersediaan tim editorial SKH Media Indonesia untuk mempertemukan peneliti kepada penulis kelima teks editorial yang digunakan peneliti sebagai objek penelitian, karena disadari bahwa editorial Media Indonesia masuk dalam redaksi ranah privat.

Peneliti memiliki saran untuk pembaca yang tertarik untuk meneliti editorial Media Indonesia selanjutnya dan jika menggunakan proses *framing* dari diagram Dietram A. Scheufele, pada tahap ketiga yakni *individual-level effects of framing*, dapat difungsikan dalam analisis pada level konteks, karena SKH Media

Indonesia sejak akhir tahun 2000 telah memiliki rubrik bedah editorial bagi publik yang ditayangkan di Metro TV dan awal tahun 2004 bedah editorial telah masuk pada halaman *online* editorial Media Indonesia. Bedah editorial Media Indonesia dari Metro TV dan *online* (web) editorial Media Indonesia tersebut sejak awal tahun 2010 dituangkan ke dalam halaman rubrik bedah editorial edisi cetak dari SKH Media Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan Dalam Politik*. Jakarta : Pustaka Indonesia.
- Birowo, M. Antonius, (ed). 2004. *Metode Penelitian Komunikasi : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : GITANYALI.
- Effendy, Fenty. Ed. 2009. *Mereka Bicara JK*. Jakarta : NPCI.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi : Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta : Kanisius.
- Keller, Anett. 2009. *Tantangan dari Dalam Otonomi Redaksi di Empat Media Cetak Nasional (Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika)*. Jakarta: FES Indonesia Office.
- Kriyantono , Rachmat. 2008. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Koespradono, Gantyo, (ed). 2010. *JUJUR BERSUARA : Proses Kreatif Penulisan Editorial Media Indonesia*. Jakarta : Media Indonesia Publishing.
- Moeleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan.2000. *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Bimo. 1999. *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta : ISAI.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : Serambi.

Severin, Werner J dan James W. Tankard Jr. 2005. *Teori Komunikasi : Sejarah Metode dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta : Prenada Media.

Sobur, Alex. 2001. *Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sumadiria, AS Haris. 2005. *Menulis Artikel dan Tajuk Rencana*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Suroso. 2001. *Menuju Pers Demokratis: Kritik atas Profesionalisme Wartawan*. Yogyakarta: LSIP.

Suseno, Frans Magnis. 1998. *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta : Penerbit KANISIUS.

Tim Penyusun. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (cet 3). Jakarta : Balai Pustaka.

Wokler, Robert. 1995. "Kata Pengantar", *Kamus Ideologi Politik Modern*. ed. Michael A. Riff. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.

JURNAL

Scheufele, Dietram A. 1999. *Journal of Communication: Framing as Theory of Media Effect*. Hlm 103 s.d 122. International Communication Assosiation.

MAJALAH

Majalah TEMPO. Edisi Khusus 3 Tahun SBY-JK 36/XXXVI/29 Oktober-4 November 2007.

SKRIPSI

Arifin, Pupung. 2008. "Profiling Nurdin Halid dalam Editorial (Analisis Framing Pencitraan Nurdin Halid dalam Ulasan Rubrik Catatan Ringan dan Usul-Usul di Tabloid Olahraga BOLA terkait dengan kasus Pidana Ketua Umum PSSI)". Skripsi Sarjana FISIP UAJY. Yogyakarta.

Kristiawan, Arif. 2005. "Program 100 hari Pertama Pemerintahan SBY-JK (Analisis Framing Isu Program 100 hari Pertama Pemerintahan SBY-JK di MI dan KOMPAS)". Skripsi Sarjana FISIPOL UMY. Yogyakarta.

SITUS

Anonim. <http://www.pikiranrakyat-online.com/2009/06/04/jusuf-kalla-capres-terkaya> (akses 25 Mei 2009)

Anonim. http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=66 (akses 18 Juni 2009)

Fachry Ali, <http://pemilu.inilah.com/berita/2009/03/01/87405/citra-jk-tak-perlu-didongkrak> (akses 17 Oktober 2009)

K!CK ANDY Metro TV, episode Jumat 5 Juni 2009. www.kickandy.com (akses 9 Agustus 2009)

Weintraut. *Writting Editorial*. <http://www.geneseo.edu/~bennett/EdWrite.htm> (akses 30 Mei 2010)



LAMPIRAN I

Dokumentasi Naskah



Edisi: 24 April 2009
Halaman: 01-ED

Penulis:
Rubrik: EDITORIAL

Bertarung menuju RI-1

RESMILAH sudah perceraian Jusuf Kalla dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pasangan presiden dan wakil presiden itu bukan hanya bercerai, keduanya bahkan akan bersaing pada pemilu presiden nanti.

Kepastian Jusuf Kalla menjadi calon presiden itu diputuskan Rapimnas Khusus Golkar kemarin. Rapimnas khusus juga memberi mandat kepada Jusuf Kalla melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol untuk membangun koalisi.

Sekalipun eksplisit tidak disebutkan sebagai hasil rapimnas khusus, kiranya kepada Jusuf Kalla juga diberikan mandat untuk menjajaki siapa yang akan mendampinginya menjadi calon wakil presiden. Sebab, mandat membentuk koalisi akan menjadi mandat yang ompong bila tanpa disertai mandat untuk juga mencari calon wakil presiden.

Berdasarkan mandat itu, Golkar bisa bergerak lebih lincah dan cepat, sebab manuver politik diserahkan kepada sang calon presiden. Hasilnya pun akan lebih cepat diperoleh jika dibandingkan dengan mandat membentuk koalisi dan mencari calon wakil presiden yang diserahkan kepada sebuah tim. Sebab, tiap-tiap anggota tim memiliki isi kepala berbeda-beda, selera berbeda-beda, bahkan kepentingan berbeda-beda sehingga tim itu akan lebih banyak berdebat daripada menghasilkan keputusan. Yang jelas, penetapan Kalla sebagai calon presiden merupakan pembuktian bahwa Golkar adalah partai yang konsisten. Pertama, konsisten dengan wacana yang dikembangkan sebelum pemilu legislatif, bahwa sebagai partai yang besar, Golkar harus mencalonkan presiden. Publik pun mencatat kata-kata Jusuf Kalla ketika itu yang mengatakan mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan lebih cepat.

Kedua, dengan dicalonkannya Kalla sebagai presiden, Golkar pun konsisten dengan paham kebangsaan yang diusungnya, yaitu siapa pun anak bangsa ini berhak menjadi presiden, tanpa pandang bulu apakah dia Jawa atau bukan Jawa.

Pencalonan Kalla yang bukan Jawa jelas sebuah lompatan sejarah yang sangat jauh dan bermakna bagi perjalanan demokrasi di negeri ini.

Republik ini pernah memiliki presiden yang bernama BJ Habibie yang bukan Jawa, tetapi Habibie menjadi presiden adalah akibat jatuhnya Pak Harto. Ia menjadi presiden bukan karena dirancang dan dikehendaki menjadi presiden. Dia adalah wakil presiden, ban serep yang naik kelas menjadi ban utama karena ban utama pecah di tengah jalan.

Sejarah mencatat Habibie yang bukan Jawa itu sanggup menjadi presiden. Bahkan dialah presiden yang pertama kali menyelenggarakan pemilu yang demokratis di zaman reformasi.

Jawa dan bukan Jawa tidak lagi relevan. Semuanya adalah anak kandung bangsa ini. Semuanya harus menyatu sebagai pemilik NKRI. Ideologi kebangsaan itulah yang konsisten diusung Golkar.

Yang juga penting ialah dengan Golkar mengusung calon presiden, persaingan merebut kursi presiden tetap seru dan menarik. SBY tidak akan melenggang sendirian dalam arti seakan sudah pasti terpilih lagi menjadi presiden hanya karena popularitasnya paling tinggi dan partainya meraih suara terbanyak. Bukankah KPU pernah melontarkan pikiran perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengantisipasi terjadinya calon tunggal? Sungguh pikiran yang merendahkan martabat banyak partai.

Pertarungan merebut kursi RI-1 itu tidak lama lagi akan berlangsung. Inilah pertarungan yang

hingga saat ini masih menyisakan misteri karena belum seorang pun yang telah dipastikan menjadi calon wakil presiden. Padahal, bukan mustahil kecerdikan memilih calon wapres itulah yang justru menjadi faktor yang menentukan pilihan rakyat. TEASER: Kecerdikan memilih calon wapres itulah yang justru menjadi faktor yang menentukan pilihan rakyat.

Copyright ©2011 Media Indonesia. All rights reserved.

Designed and maintained by Media Indonesia Documentation Development Team.
Comments and suggestions please email to dokmi@mediaindonesia.co.id



CODING SHEET TEKS EDITORIAL 1

Judul Editorial : Bertarung Menuju RI-1
Rubrik : Halaman Muka Media Indonesia
Edisi : Jumat, 24 April 2009
Penulis : -

PERANGKAT ENTMAN	TEMUAN TEKS (INPUT KALIMAT)
<i>Problem Identification</i>	<p>Perpisahan koalisi antara partai Golkar yang menaungi Jusuf Kalla dan partai Demokrat yang menaungi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) wujud strategi pergerakan politik yang menggambarkan situasi Pilpres yang berlangsung pada 8 Juli 2009.</p> <p><i>“RESMILAH sudah perceraian Jusuf Kalla dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pasangan presiden dan wakil presiden itu bukan hanya bercerai, keduanya bahkan akan bersaing pada pemilu presiden nanti.”</i></p> <p>(paragraf 1)</p> <p><i>“Kepastian Jusuf Kalla menjadi calon presiden itu diputuskan Rapimnas Khusus Golkar kemarin.</i></p>

Rapimnas khusus juga memberi mandat kepada Jusuf Kalla melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol untuk membangun koalisi.” (paragraf 2)

“Sekalipun eksplisit tidak disebutkan sebagai hasil rapimnas khusus, kiranya kepada Jusuf Kalla juga diberikan mandat untuk menjajaki siapa yang akan mendampingi menjadi calon wakil presiden.

Sebab, mandat membentuk koalisi akan menjadi mandat yang ompong bila tanpa disertai mandat untuk juga mencari calon wakil presiden.” (paragraf 3)

“Berdasarkan mandat itu, Golkar bisa bergerak lebih lincah dan cepat, sebab manuver politik diserahkan kepada sang calon presiden. Hasilnya pun akan lebih cepat diperoleh jika dibandingkan dengan mandat membentuk koalisi dan mencari calon wakil presiden yang diserahkan oleh sebuah tim. Sebab, tiap-tiap anggota tim memiliki isi kepala yang berbeda-beda, selera berbeda-beda, bahkan kepentingan berbeda-beda, sehingga tim itu akan lebih banyak berdebat daripada menghasilkan keputusan.” (paragraf 4)

“Pertama, konsisten dengan wacana yang dikembangkan sebelum pemilu legislatif, bahwa sebagai partai yang besar, Golkar harus mencalonkan presiden. Publik pun mencatat kata-kata Jusuf Kalla ketika itu yang mengatakan mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih cepat dan lebih baik.” (paragraf 5 kalimat 2-3)

	<p><i>“Kedua, dengan dicalonkannya Kalla sebagai presiden, Golkar pun konsisten dengan paham kebangsaan yang diusungnya, yaitu siapa pun anak bangsa ini berhak menjadi presiden, tanpa pandang bulu apakah dia Jawa atau bukan Jawa.” (paragraf 6)</i></p>
<i>Causal Interpretation</i>	<p>Popularitas SBY yang diduga akan menjadi calon presiden satu-satunya menggerakkan partai Golkar sebagai salah satu partai besar di Indonesia untuk mengambil sikap dengan memutuskan berpisah koalisi dari partai Demokrat dan menunjuk Jusuf Kalla sebagai calon presiden pada Pilpres 2009, sehingga SBY-JK harus berpisah juga.</p> <p><i>“Yang juga penting ialah dengan Golkar mengusung calon presiden, persaingan merebut kursi presiden tetap seru dan menarik. SBY tidak akan melenggang sendirian dalam arti seakan sudah pasti terpilih lagi menjadi presiden hanya karena popularitasnya yang paling tinggi dan partainya meraih suara terbanyak. Bukankah KPU pernah melontarkan pikiran perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengantisipasi terjadinya calon tunggal? Sungguh pikiran yang merendahkan martabat banyak partai.” (paragraf 11)</i></p> <p><i>“RESMILAH sudah perceraian Jusuf Kalla dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pasangan presiden dan</i></p>

	<p>wakil presiden itu bukan hanya bercerai, keduanya bahkan akan bersaing pada pemilu presiden nanti.”</p> <p>(paragraf 1)</p> <p>“Kepastian Jusuf Kalla menjadi calon presiden itu diputuskan Rapimnas Khusus Golkar kemarin. Rapimnas khusus juga memberi mandat kepada Jusuf Kalla melakukan komunikasi politik dengan berbagai parol untuk membangun koalisi.” (paragraf 2)</p>
<p>Moral Evaluation</p>	<p>Jusuf Kalla yang mencalonkan diri sebagai capres 2009 dianggap sebagai tokoh politik yang memiliki catatan penting dalam sejarah kepresidenan Indonesia, terutama dalam persaingannya di Pemilu.</p> <p>Hal ini berkaitan tentang latar belakang Jusuf Kalla yang berasal dari luar Jawa dan sepak terjangnya ketika menjadi wapres menjalankan roda pemerintahan sebelumnya.</p> <p>“Bukankah KPU pernah melontarkan pikiran perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengantisipasi terjadinya calon tunggal? Sungguh pikiran yang merendahkan martabat banyak partai.” (paragraf 11 kalimat 3-4)</p> <p>“Yang jelas, penetapan Kalla sebagai calon presiden merupakan pembuktian bahwa Golkar adalah partai yang konsisten. Pertama, konsisten dengan wacana yang dikembangkan sebelum pemilu legislatif, bahwa</p>

sebagai partai yang besar, Golkar harus mencalonkan presiden. Publik pun mencatat kata-kata Jusuf Kalla ketika itu yang mengatakan mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih cepat dan lebih baik.” (paragraf 5)

“Kedua, dengan dicalonkannya Kalla sebagai presiden, Golkar pun konsisten dengan paham kebangsaan yang diusungnya, yaitu siapa pun anak bangsa ini berhak menjadi presiden, tanpa pandang bulu apakah dia Jawa atau bukan Jawa.” (paragraf 6)

“Republik ini pernah memiliki presiden yang bernama BJ Habibie yang bukan Jawa, tetapi Habibie menjadi presiden adalah akibat jatuhnya Pak Harto. Ia menjadi presiden bukan karena dirancang dan dikehendaki menjadi presiden. Dia adalah wakil presiden, ban serep yang naik kelas menjadi ban utama karena ban utama pecah di tengah jalan.” (paragraf 8)

“Sejarah mencatat Habibie yang bukan Jawa itu sanggup menjadi presiden. Bahkan dialah presiden yang pertama kali menyelenggarakan pemilu demokratis di zaman reformasi. (paragraf 9)

Pencalonan Kalla yang bukan Jawa jelas sebuah lompatan sejarah yang sangat jauh dan bermakna bagi perjalanan demokrasi di negeri ini.” (paragraf 7)

	<p><i>“Jawa dan bukan Jawa tidak lagi relevan. Semuanya adalah anak kandung bangsa ini. Semuanya harus menyatu sebagai pemilik NKRI. Ideologi kebangsaan itulah yang konsisten diusung Golkar.”</i> (paragraf 10)</p>
<i>Treatment Recommendation</i>	<p>Partai politik dan calon presiden yang diusung oleh partai politik segera menentukan pasangannya sebagai cawapres untuk maju dalam Pilpres 2009.</p> <p><i>“Pertarungan merebut kursi RI-1 itu tidak lama lagi akan berlangsung. Inilah pertarungan yang hingga saat ini masih menyisakan misteri karena belum seorang pun yang telah dipastikan menjadil calon wakil presiden. Padahal, bukan mustahil kecerdikan memilih calon wapres itulah yang justru menjadi faktor yang menentukan pilihan rakyat.”</i> (paragraf 12)</p>

Dokumentasi Naskah

Edisi: 4 Mei 2009
Halaman: 01-05

Penulis:
Rubrik: Editorial



Titik Terang Konstelasi Politik

KONSTELASI politik menuju pemilihan presiden 8 Juli nanti kian jelas. Adalah pasangan Jusuf Kalla-Wiranto yang membuat peta politik pilpres menemukan titik terang melalui deklarasi keduanya menjadi capres-cawapres.

Publik tidak lagi disodori teka-teki rumit ihwal proses memilih pemimpin bangsa lima tahun ke depan. Dengan dideklarasikannya pasangan JK-Wiranto oleh Partai Golkar dan Partai Hanura, sekarang setidaknya secara politis sudah ada calon presiden dan wakil presiden yang definitif.

Asal usul keduanya pun jelas. Keduanya mengusung paham kebangsaan. Keduanya kombinasi yang komplet, yaitu kombinasi sipil dan militer serta kombinasi luar Jawa dan Jawa. Kiranya sejarah kelak akan mencatat inilah pertama kali seorang luar Jawa dicalonkan menjadi presiden. Bahkan, lebih spesifik lagi, dipertarungkan melalui pemilu langsung.

Bagi Partai Golkar, deklarasi pasangan JK-Wiranto sekaligus merupakan jalan keluar atas kemelut yang melilit partai itu. Elite partai terbelah menjadi dua faksi, yakni faksi yang berorientasi jangka panjang dengan mengusung calon presiden sendiri dan faksi yang mendesak keinginan jangka pendek dengan memilih jalan gampang merapat kepada SBY. SBY sendiri yang diusung Partai Demokrat untuk menjadi capres juga kian mengerucutkan calon pendampingnya. Ia menyatakan cawapresnya akan berasal dari partai politik. Partai yang telah mendeklarasikan berkoalisi dengan SBY adalah PKS, PAN, PKB, dan mungkin PPP. Hal itu menunjukkan Partai Demokrat berkoalisi dengan partai yang berbasis Islam.

Yang telah disebut-sebut untuk mendampingi SBY adalah Hatta Rajasa dari PAN, Hidayat Nur Wahid dari PKS, dan mungkin Bachtiar Chamsyah dari PPP bila partai berlambang Kabah itu akhirnya ikut bergabung.

Kombinasi Jawa dan luar Jawa akan dipenuhi bila SBY berpasangan dengan Hatta Rajasa atau Bachtiar Chamsyah, sekaligus juga memenuhi kombinasi militer-sipil.

Yang belum menentukan arah pilihan adalah Megawati Soekarnoputri yang diusung PDI Perjuangan. Sesungguhnya tidak banyak lagi pilihan bagi PDI Perjuangan, kecuali berkoalisi dengan Gerindra serta sejumlah partai guram yang mendapat suara di bawah ambang batas.

Tapi siapakah yang akan dicalonkan menjadi presiden? Bukankah Megawati dan Prabowo sama-sama diusung partai masing-masing untuk menjadi capres?

Bagaimana Megawati dan Prabowo menyelesaikan persoalan itu akan turut menentukan jalannya pertarungan pemilu presiden nanti. Bila jawabannya adalah munculnya alternatif baru, persaingan merebut kursi RI-1 akan semakin seru dan semarak.

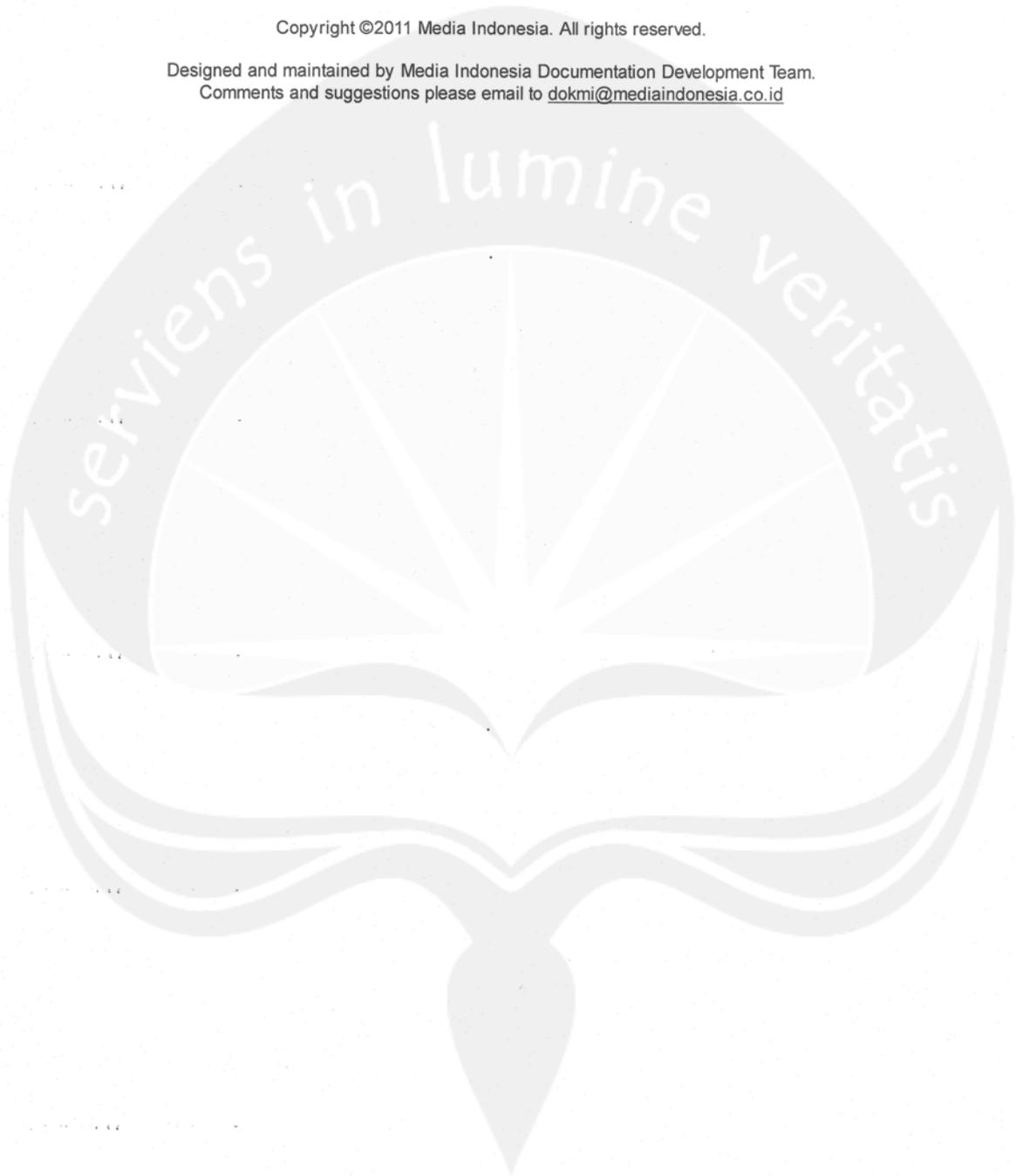
Publik tentu saja berharap semakin cepat diumumkan semakin baik. Semakin baik karena dengan demikian, warga yang memiliki hak suara memiliki cukup banyak waktu untuk mempelajari rekam jejak masing-masing.

Oleh karena itu, sebaiknya SBY cepat-cepat mendeklarasikan cawapres yang akan mendampinginya. Begitu pula Megawati dan Prabowo pun segera mengambil keputusan sehingga konstelasi politik pilpres semakin terang benderang.

Teaser: Sebaiknya SBY cepat-cepat mendeklarasikan cawapres yang akan mendampingiya. Begitu pula Megawati dan Prabowo pun segera mengambil keputusan.

Copyright ©2011 Media Indonesia. All rights reserved.

Designed and maintained by Media Indonesia Documentation Development Team.
Comments and suggestions please email to dokmi@mediaindonesia.co.id



CODING SHEET TEKS EDITORIAL 2

Judul Editorial : Titik Terang konstelasi Politik
Rubrik : Halaman Muka Media Indonesia
Edisi : Senin, 4 Mei 2009
Penulis : -

PERANGKAT ENTMAN	TEMUAN TEKS (INPUT KALIMAT)
<i>Problem Identification</i>	<p>Kepastian Jusuf Kalla-Wiranto menjadi pencerahan bagi arah pemetaan politik pilpres namun di sisi lain belum ada daftar nama capres-cawapres lainnya. Semua masih dalam perundingan koalisi yang belum menemukan titik temu.</p> <p><i>“KONSTELASI politik menuju pemilihan presiden 8 Juli nanti kian jelas. Adalah pasangan Jusuf Kalla-Wiranto yang membuat peta politik pilpres menemukan titik terang melalui deklarasi keduanya menjadi capres-cawapres.”</i> (paragraf 1)</p> <p><i>“Publik tidak lagi disodori teka-teki rumit ihwal proses memilih pemimpin bangsa lima tahun ke depan.</i></p>

Dengan dideklarasikan pasangan JK-Wiranto oleh partai Golkar dan Partai Hanura, sekarang setidaknya secara politis sudah ada calon presiden dan wakil presiden yang definitif.” (paragraf 2)

“Bagi Partai Golkar, deklarasi pasangan JK-Wiranto sekaligus merupakan jalan keluar atas kemelut yang melilit partai itu. Elite partai terbelah menjadi dua faksi, yakni faksi yang berorientasi jangka panjang dengan mengusung calon presiden sendiri dan faksi yang mendesakkan keinginan jangka pendek dengan memilih jalan gampang merapat kepada SBY.” (paragraf 4)

“SBY sendiri yang diusung Partai Demokrat untuk menjadi capres juga kian mengerutkan calon pendampingnya. Ia menyatakan cawapresnya akan berasal dari partai politik. Partai yang telah mendeklarasikan berkoalisi dengan SBY adalah PKS, PAN, PKB dan mungkin PPP. Hal itu menunjukkan Partai Demokrat berkoalisi dengan partai yang berbasiskan Islam.” (paragraf 5)

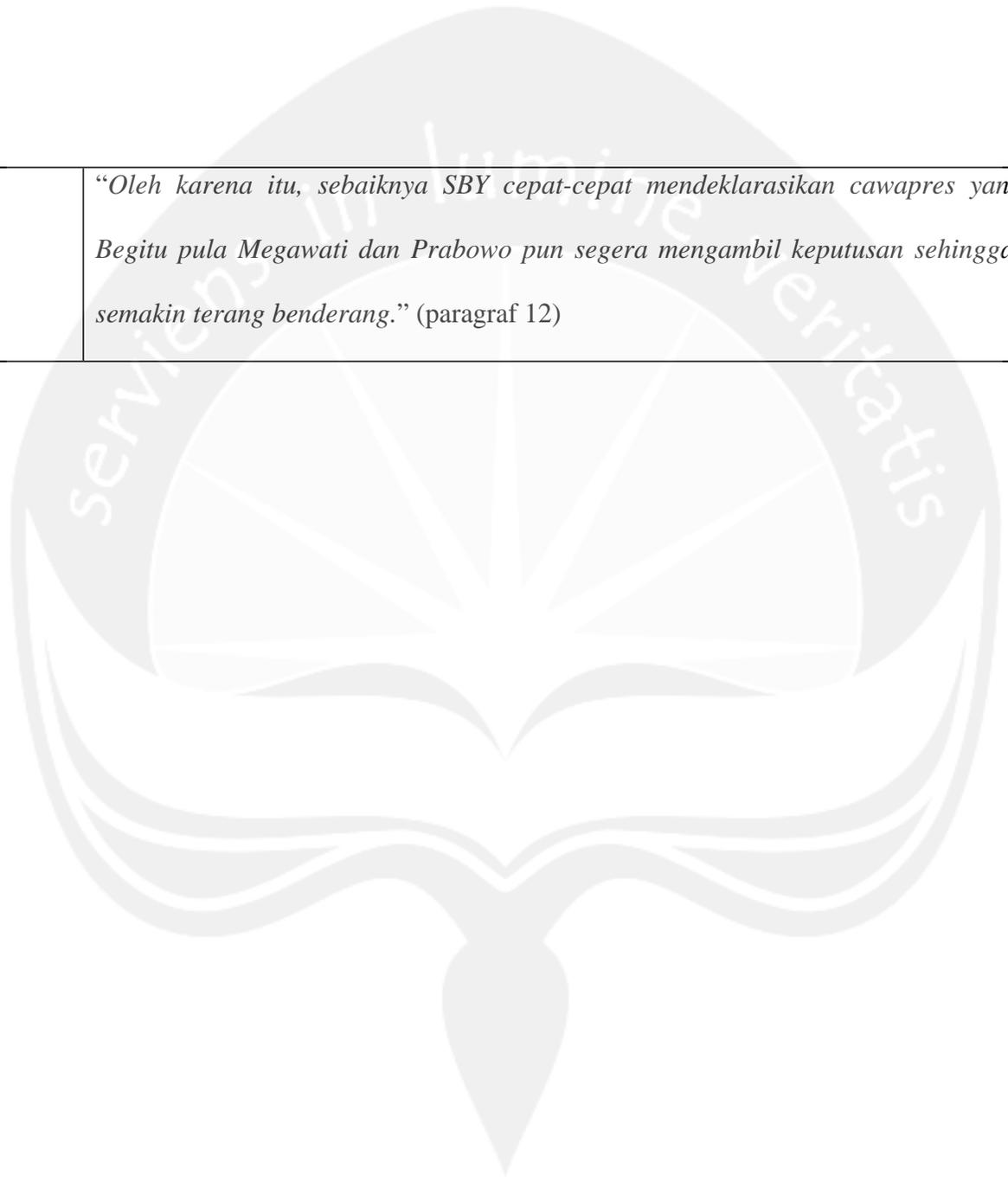
“Yang telah disebut-sebut untuk mendampingi SBY adalah Hatta Rajasa dari PAN, Hidayat Nur Wahid dari PKS, dan mungkin Bachtiar Chamsyah dari PPP bila partai berlambang Kabah itu akhirnya ikut bergabung.” (paragraf 6)

“Yang belum menentukan arah pilihan adalah Megawati Soekarnoputri yang diusung PDI Perjuangan.

	<p><i>Sesungguhnya tidak banyak lagi pilihan bagi PDI Perjuangan, kecuali berkoalisi dengan Gerindra serta sejumlah partai guram yang mendapat suara di bawah ambang batas.” (paragraf 8)</i></p> <p><i>“Tapi siapakah yang akan dicalonkan menjadi presiden? Bukankah Megawati dan Prabowo sama-sama diusung partai masing-masing untuk menjadi capres?” (paragraf 9)</i></p> <p><i>“Bagaimana Megawati dan Prabowo menyelesaikan persolan itu akan turut menentukan jalannya pertarungan pemilu presiden nanti. Bila jawabannya adalah munculnya alternatif baru, persaingan merebut kursi RI-1 akan semakin seru dan semarak.” (paragraf 10)</i></p>
<p><i>Causal Interpretation</i></p>	<p>SBY dan Mega yang tak kunjung menentukan pasangannya dan masih disibukkan dengan perihal koalisi membuat publik dalam kondisi yang masih dirundung rasa penasaran. Wacana terlalu banyak pertimbangan koalisi membuat publik masih bingung dan belum paham arah politik SBY dan Mega.</p> <p><i>“SBY sendiri yang diusung Partai Demokrat untuk menjadi capres juga kian mengerutkan calon pendampingnya. Ia menyatakan cawapresnya akan berasal dari partai politik. Partai yang telah mendeklarasikan berkoalisi dengan SBY adalah PKS, PAN, PKB dan mungkin PPP. Hal itu menunjukkan Partai Demokrat berkoalisi dengan partai yang berbasiskan Islam.” (paragraf 5)</i></p>

	<p><i>“Yang telah disebut-sebut untuk mendampingi SBY adalah Hatta Rajasa dari PAN, Hidayat Nur Wahid dari PKS, dan mungkin Bachtiar Chamsyah dari PPP bila partai berlambang Kabah itu akhirnya ikut bergabung.”</i> (paragraf 6)</p> <p><i>“Kombinasi Jawa dan luar Jawa akan dipenuhi bila SBY berpasangan dengan Hatta Rajasa atau Bachtiar Chamsyah, sekaligus juga memenuhi kombinasi militer-sipil.”</i> (paragraf 7)</p> <p><i>“Yang belum menentukan arah pilihan adalah Megawati Soekarnoputri yang diusung PDI Perjuangan. Sesungguhnya tidak banyak lagi pilihan bagi PDI Perjuangan, kecuali berkoalisi dengan Gerindra serta sejumlah partai guram yang mendapat suara di bawah ambang batas.”</i> (paragraf 8)</p> <p><i>“Tapi siapakah yang akan dicalonkan menjadi presiden? Bukankah Megawati dan Prabowo sama-sama diusung partai masing-masing untuk menjadi capres?”</i> (paragraf 9)</p>
<p><i>Moral Evaluation</i></p>	<p>Jusuf Kalla-Wiranto telah memberikan contoh yang pertama dan tercepat dalam memutuskan untuk maju sebagai pasangan capres-cawapres 2009 jika dibandingkan dengan SBY dan Mega. Tindakan Jusuf Kalla dianggap langkah baik sebagai jalan keluar dari kebingungan publik.</p> <p><i>“KONSTELASI politik menuju pemilihan presiden 8 Juli nanti kian jelas. Adalah pasangan Jusuf Kalla-</i></p>

	<p><i>Wiranto yang membuat peta politik pilpres menemukan titik terang melalui deklarasi keduanya menjadi capres-cawapres.” (paragraf 1)</i></p> <p><i>“Publik tidak lagi disodori teka-teki rumit ihwal proses memilih pemimpin bangsa lima tahun ke depan. Dengan dideklarasikan pasangan JK-Wiranto oleh partai Golkar dan Partai Hanura, sekarang setidaknya secara politis sudah ada calon presiden dan wakil presiden yang definitif.” (paragraf 2)</i></p> <p><i>“Asal usul keduanya pun jelas. Keduanya mengusung paham kebangsaan. Keduanya kombinasi yang komplet, yaitu kombinasi sipil-militer serta kombinasi luar Jawa dan Jawa. Kiranya sejarah kelak akan mencatat inilah pertama kali seorang luar Jawa dicalonkan menjadi presiden. Bahkan, lebih spesifik lagi, dipertarungkan melalui pemilu langsung.” (paragraf 3)</i></p>
<p><i>Treatment Recommendation</i></p>	<p>Para kandidat pasangan capres-cawapres 2009 dihimbau untuk secepatnya mengumumkan diri dan menentukan siapa pasangannya. Hal ini terutama diperuntukkan bagi SBY dan Mega.</p> <p><i>“Publik tentu saja berharap semakin cepat diumumkan semakin baik. Semakin baik karena dengan demikian, warga yang memiliki hak suara memiliki cukup banyak waktu untuk mempelajari rekam jejak masing-masing.” (paragraf 11)</i></p>



	<p><i>“Oleh karena itu, sebaiknya SBY cepat-cepat mendeklarasikan cawapres yang akan mendampinginya. Begitu pula Megawati dan Prabowo pun segera mengambil keputusan sehingga konstelasi politik pilpres semakin terang benderang.” (paragraf 12)</i></p>
--	---

Dokumentasi Naskah

Edisi: 18 Mei 2009
Halaman: 01-05

Penulis:
Rubrik: Editorial



Pilpres Cuci Gudang

TIGA pasang calon presiden dan calon wakil presiden resmi mengikuti pemilihan presiden pada 8 Juli 2009. Mereka adalah Jusuf Kalla-Wiranto dari Partai Golkar dan Hanura, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dari Partai Demokrat dan mitra koalisinya, serta Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dari PDIP dan Gerindra.

Ketiga pasangan capres-cawapres tersebut telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada Sabtu (16/5), hari terakhir pendaftaran. Satu lagi bukti, elite bangsa ini selalu memilih detik-detik terakhir, padahal pendaftaran dibuka sejak 11 Mei. Filsafat yang dipakai adalah bila bisa besok, mengapa harus sekarang? Maka jangan heran jika banyak urusan ditunda-tunda di Republik ini.

Jika dibedah, ketiga pasangan tersebut memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Kesamaannya, ketiga pasangan menggabungkan unsur sipil dan militer, suatu kombinasi yang masih dibutuhkan dalam budaya politik negeri ini. Selain itu, ketiganya juga mencerminkan pasangan paham kebangsaan, suatu bukti bahwa politik aliran berbasis agama kian tidak menemukan tempat berpijak di sini.

Dari ketiga pasangan itu yang paling tua adalah Jusuf Kalla (67 tahun), diikuti Boediono (66 tahun), Mega dan Wiranto (masing-masing 62 tahun) serta SBY 60 tahun. Yang paling muda adalah Prabowo (58 tahun).

Jadi, belum muncul pemimpin bangsa yang berumur 40-an. Ini sebuah kemunduran karena Bung Karno menjadi presiden pada umur 44 tahun dan Pak Harto pada umur 45 tahun.

Ada beberapa hal yang membedakan ketiga pasangan itu. JK-Wiranto memenuhi unsur Jawa-luar Jawa, suatu realitas politik yang juga masih harus dipertimbangkan secara serius. Megawati-Prabowo masih memenuhi unsur Jawa-luar Jawa dengan kadar campuran. Megawati mewarisi darah campuran Jawa-Sumatra, dan Prabowo adalah peranakan Jawa-Sulawesi Utara. Sedangkan SBY-Boediono keduanya murni dari Jawa, dan lebih sempit lagi dari Jawa Timur. SBY dari Pacitan dan Boediono dari Blitar.

Hal lain yang membedakan adalah hanya SBY-Boediono yang merupakan kombinasi parpol-nonparpol. Boediono dari dunia kampus, sedangkan dua pasangan lain berasal dari parpol.

Periode 2009-2014 kiranya dapatlah digolongkan sebagai masa 'cuci gudang'. Siapa pun yang menjadi presiden, selesailah sampai di situ. Selesailah sudah era bagi SBY, JK, Mega, dan Wiranto untuk mencalonkan diri kembali menjadi presiden pada 2014. Juga mestinya akhir bagi Boediono yang saat itu telah berumur 71 tahun. Yang tersisa tinggalah Prabowo dengan usia pada waktu itu 63 tahun.

Oleh karena itu, periode ini menjadi amat strategis bagi kaum muda untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin nasional lima tahun mendatang. Saat itu tantangan bangsa ini sudah jauh berubah.

Siapa pun pemimpin muda yang tampil kelak harus mempertahankan identitas bangsa ini sebagai puak yang majemuk. Hanya dengan mempertahankan identitas keragaman itulah bangsa ini masih bisa melangkah tegap di tengah jagat ini. Identitas itu tidak boleh diabaikan, apalagi diberangus secara sadar oleh mereka yang berkuasa.

Hasil pemilu legislatif tahun 2009 dan tiga pasang capres-cawapres yang maju bertarung pada Pilpres 8 Juli 2009 menunjukkan bahwa terjadi pergeseran serius dalam khazanah politik Indonesia. Partai berbasis agama tidak berkembang, bahkan mengalami stagnasi.

Pasangan capres-cawapres kali ini pun tidak memperlihatkan kombinasi nasionalis-agamais. Semua pasangan capres dan cawapres kali ini terutama berbasiskan paham kebangsaan.

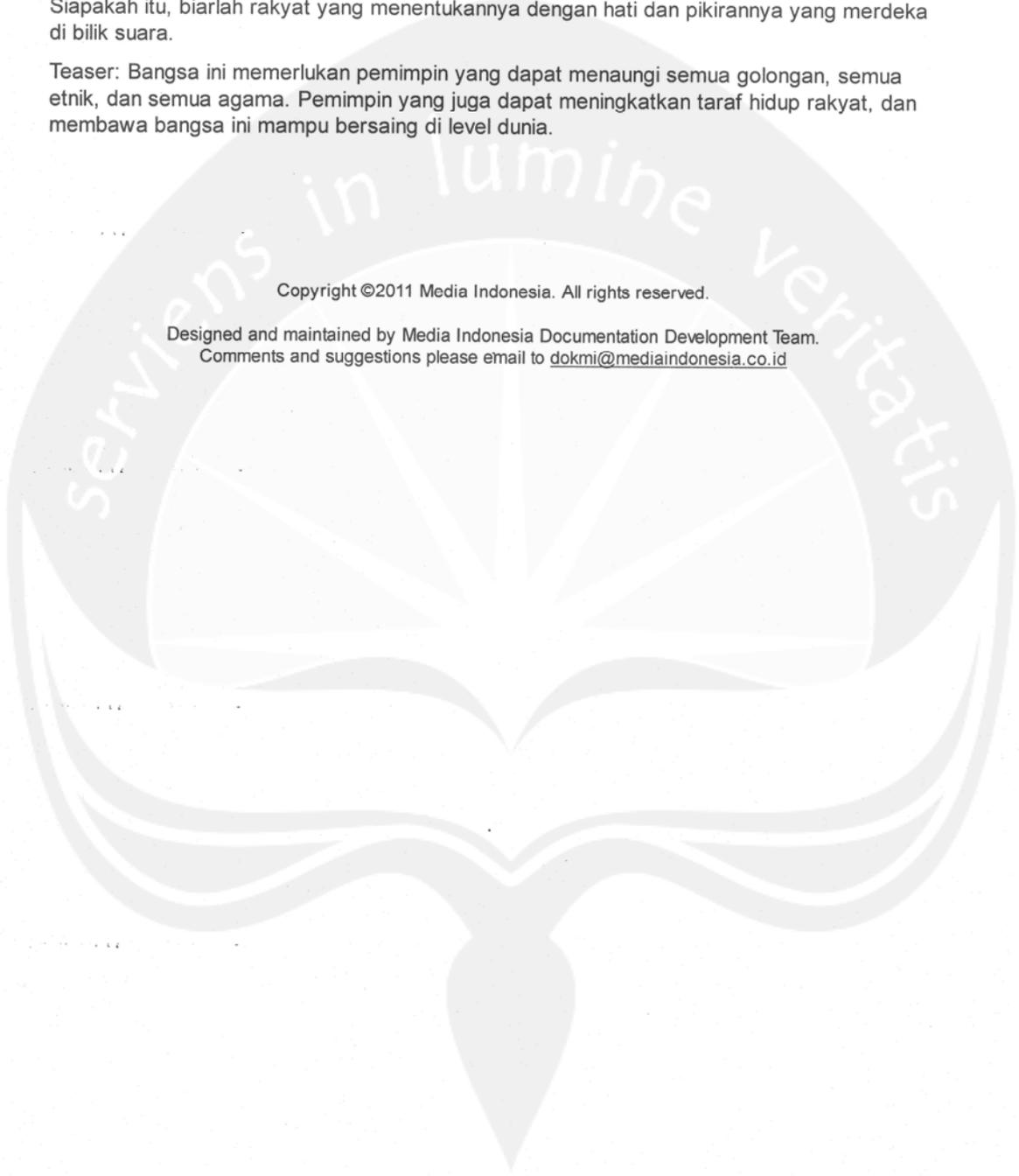
Bangsa ini memang memerlukan pemimpin yang dapat menaungi semua golongan, semua etnik, dan semua agama. Pemimpin yang juga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, dan membawa bangsa ini mampu bersaing di level dunia.

Siapakah itu, biarlah rakyat yang menentukannya dengan hati dan pikirannya yang merdeka di bilik suara.

Teaser: Bangsa ini memerlukan pemimpin yang dapat menaungi semua golongan, semua etnik, dan semua agama. Pemimpin yang juga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, dan membawa bangsa ini mampu bersaing di level dunia.

Copyright ©2011 Media Indonesia. All rights reserved.

Designed and maintained by Media Indonesia Documentation Development Team.
Comments and suggestions please email to dokmi@mediaindonesia.co.id



CODING SHEET TEKS EDITORIAL 3

Judul Editorial : Pilpres Cuci Gudang
Rubrik : Halaman Muka Media Indonesia
Edisi : Jumat, 18 Mei 2009
Penulis : -

PERANGKAT ENTMAN	TEMUAN TEKS (INPUT KALIMAT)
Problem Identification	<p>Latar belakang calon pemimpin baik dari segi usia, budaya dan golongan mempengaruhi karakteristik kepemimpinan bangsa.</p> <p><i>“TIGA pasang calon presiden dan wakil presiden resmi mengikuti pemilihan presiden pada 8 Juli 2009. Mereka adalah Jusuf Kalla-Wiranto dari Partai Golkar dan Hanura, Yudhoyono-Boediono dari Partai Demokrat dan mitra koalisinya, serta Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dari PDIP dan Gerindra.”</i> (paragraf 1)</p> <p><i>“Dari ketiga pasangan itu yang paling tua adalah Jusuf Kalla (67 tahun), diikuti Boediono (66 tahun), Mega</i></p>

	<p>dan Wiranto (masing-masing 62 tahun) serta SBY 60 tahun. Yang paling muda adalah Prabowo (58 tahun).” (paragraf 4)</p> <p>“Jika dibedah, ketiga pasangan tersebut memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Kesamaannya, ketiga pasangan menggabungkan unsur sipil dan militer, suatu kombinasi yang masih dibutuhkan dalam budaya politik negeri ini. Selain itu, ketiganya juga mencerminkan pasangan paham kebangsaan, suatu bukti bahwa politik aliran berbasis agama kian tidak menemukan tempat berpijak di sini.” (paragraf 3)</p> <p>“Ada beberapa hal yang membedakan ketiga pasangan itu. JK-Wiranto memenuhi unsur Jawa-Luar Jawa, suatu realitas politik yang juga masih harus dipertimbangkan secara serius. Megawati-Prabowo masih memenuhi unsur Jawa-Luar Jawa dengan kadar campuran. Megawati mewarisi darah campuran Jawa-Sumatra dan Prabowo adalah peranakan Jawa-Sulawesi Utara. Sedangkan SBY-Boediono keduanya murni dari Jawa, dan lebih sempit lagi dari Jawa Timur. SBY dari Pacitan dan Boediono dari Blitar.” (paragraf 6)</p> <p>“Hal lain yang membedakan adalah hanya SBY-Boediono yang merupakan kombinsai parpol-nonparpol. Boediono dari dunia kampus, sedangkan dua pasangan lain berasal dari parpol.” (paragraf 7)</p>
Causal Interpretation	Ketiga pasangan capres-cawapres yang lebih memilih jadwal hari terakhir untuk mendaftarkan diri

menunjukkan pemimpin bangsa ini didominasi oleh kebiasaan lama. Hal ini dapat dianggap wajar karena sebagian besar usia ketiga pasangan tersebut masuk ke dalam generasi tua, generasi yang terbiasa dengan budaya kepemimpinan. Situasi tersebut cukup menjadi catatan tersendiri bahwa tampak regenerasi kepemimpinan di negeri ini berjalan sangat lambat.

“Dari ketiga pasangan itu yang paling tua adalah Jusuf Kalla (67 tahun), diikuti Boediono (66 tahun), Mega dan Wiranto (masing-masing 62 tahun) serta SBY 60 tahun. Yang paling muda adalah Prabowo (58 tahun).”

(paragraf 4)

“Ketiga pasangan capres-cawapres tersebut telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada Sabtu (16/5), hari terakhir pendaftaran. Satu lagi bukti, elite bangsa ini selalu emilih detik-detik terakhir, padahal pendaftaran dibuka sejak 11 Mei. Filsafat yang dipakai adalah bila bisa besok, mengapa harus sekarang? Maka jangan heran jika banyak urusan ditunda-tunda di Republik ini.” (paragraf 2)

“Jadi, belum muncul pemimpin yang berumur 40-an. Ini sebuah kemunduran karena Bung Karno jadi presiden pada umur 44 tahun dan Pak Harto pada umur 45 tahun.” (paragraf 5)

“Hasil pemilu legislatif tahun 2009 dan tiga capres-cawapres yang maju bertarung pada Pilpres 8 Juli 2009

	<p><i>menunjukkan bahwa terjadi pergeseran serius dalam khazanah politik Indonesia.” (paragraf 11 kalimat 1)</i></p> <p><i>“Partai berbasis agama tidak berkembang, bahkan mengalami stagnasi. Pasangan capres-cawapres kali ini pun tidak memperlihatkan kombinasi nasionalis-agamais. Semua pasangan capres-cawapres kali ini terutama berbasiskan paham kebangsaan.” (paragraf 11 kalimat 2-4)</i></p>
<p>Moral Evaluation</p>	<p>Periode pilpres 2009-2014 ini memberikan peluang kesempatan kepada generasi muda untuk saatnya tampil di depan masyarakat luas karena para calon pemimpin bangsa periode 2009 telah memasuki batas usia purna tugas.</p> <p><i>“Periode 2009-2014 kiranya dapatlah digolongkan sebagai masa ‘cuci gudang’. Siapa pun yang menjadi presiden, selesailah sampai di situ. Selesailah sudah era bagi SBY, JK, Mega dan Wiranto untuk mencalonkan diri kembali menjadi presiden pada 2014. Juga mestinya akhir bagi Boediono yang saat itu telah berumur 71 tahun. Yang tersisa tinggallah Prabowo dengan usia pada waktu itu 63 tahun.” (paragraf 8)</i></p> <p><i>“Oleh karena itu, periode ini menjadi amat strategis bagi kaum muda untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin nasional lima taun mendatang. Saat itu tantangan bangsa ini sudah jauh berubah.” (paragraf 9)</i></p>

<p><i>Treatment Recommendation</i></p>	<p>Calon pemimpin muda yang akan bersaing pada pilpres mendatang dihibau untuk mampu mewakili dari berbagai macam budaya dan golongan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.</p> <p><i>“Siapa pun pemimpin muda yang akan tampil kelak harus mempertahankan identitas bangsa ini sebagai puak yang majemuk. Hanya dengan mempertahankan identitas keragaman itulah bangsa ini masih bisa melangkah tegap di tengah jagat ini. Identitas itu tidak boleh diabaikan, apalagi diberangus secara sadar oleh mereka yang berkuasa.”</i> (paragraf 10)</p> <p><i>“Bangsa ini memang memerlukan pemimpin yang dapat menaungi semua golongan, etnik dan semua agama. Pemimpin yang juga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, dan membawa bangsa ini mampu bersaing di level dunia.”</i> (paragraf 12)</p> <p><i>“Siapakah itu, biarlah rakyat yang menentukannya dengan hati dan pikirannya yang merdeka di bilik suara.”</i> (paragraf 13)</p>
---	---

Dokumentasi Naskah

Edisi: 22 Mei 2009
Halaman: 01-05

Penulis:
Rubrik: Umum



Agenda Ekonomi Capres-Cawapres

KOMPETISI menuju pemilihan presiden (pilpres) sudah dimulai. Rakyat kini memiliki tiga pilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan agenda masing-masing.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian luas adalah program ekonomi.

Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, Megawati-Prabowo, dan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mulai membuka visi ekonomi kerakyatan, tetapi jalan yang mereka pilih tidak sama. Maka, inilah pemilihan presiden dengan agenda ekonomi paling beragam jika dibandingkan dengan pilpres sebelumnya.

Pasangan JK-Wiranto memilih perbaikan sektor riil lebih cepat dan lebih baik. Dalam dialog dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, awal pekan ini, Kalla menegaskan tidak akan menggantungkan sistem perekonomian Indonesia pada pasar modal semata.

Itu disebabkan hajat hidup masyarakat Indonesia justru bergantung kepada keberlangsungan sektor riil. Secara lugas Kalla mencontohkan anjloknya pasar modal hanya bersifat sesaat dengan akibat yang tidak masif. Akan tetapi, jika yang hancur adalah Pasar Tanah Abang Jakarta dan Pasar Klewer Solo, dampaknya ke seluruh Indonesia.

Kalla juga menyoroti lambannya birokrasi, tingginya suku bunga kredit, buruknya infrastruktur, serta tingginya alokasi APBN untuk subsidi dan membayar utang sebagai biang kerok lambatnya pertumbuhan ekonomi. Capres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura ini pun berjanji memperbaiki semua itu dengan target mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% mulai 2011.

Caranya dengan menyelesaikan konversi minyak tanah ke gas pada 2010 dan merampungkan proyek listrik 10.000 megawatt. Jika terealisasi, anggaran bisa dihemat hingga Rp200 triliun. Dana itulah yang akan digunakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan Kalla, SBY mengemukakan agenda pembangunan ekonomi untuk semua. Ia tidak mengkhususkan pada satu segi. Ia pun hanya menjanjikan rata-rata pertumbuhan ekonomi 7% pada akhir 2014.

Alasannya Indonesia masih dipengaruhi buruknya perekonomian dunia dan masih dalam tahap pemulihan ekonomi pascareseksi global. Selain itu, masih banyak agenda di APBN yang perlu dibiayai, di antaranya program *social safety net*. SBY memilih untuk tetap mengedepankan stabilitas makroekonomi. Ia menargetkan konsumsi domestik 5% dan inflasi di bawah 6%.

Akan halnya pasangan Mega-Prabowo amat gamblang menitikberatkan agenda ekonomi kerakyatan. Misalnya, menggenjot pertanian dengan mencetak 7 juta hektare sawah. Selain itu, Mega-Prabowo akan memaksimalkan potensi penghasilan laut dengan memberikan akses yang luas kepada nelayan. Pasar-pasar tradisional pun digenjot. Prabowo pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga 10% dalam kurun lima tahun mendatang.

Amatlah jelas, ketiga pasangan memiliki agenda dan cara masing-masing untuk menarik pemilih. Namun, dengan tahapan seperti apa dan dengan cara bagaimana sasaran ekonomi itu diraih, masyarakat belum mendapatkan gambaran yang jelas.

Gambaran yang jelas itu mestinya akan diperoleh pada masa kampanye nanti. Di situlah tiap-tiap pasangan capres-cawapres memaparkan dengan gamblang bagaimana semua janji ekonomi itu dapat diwujudkan. Dari sanalah kita bisa mengkaji apakah yang ditawarkan

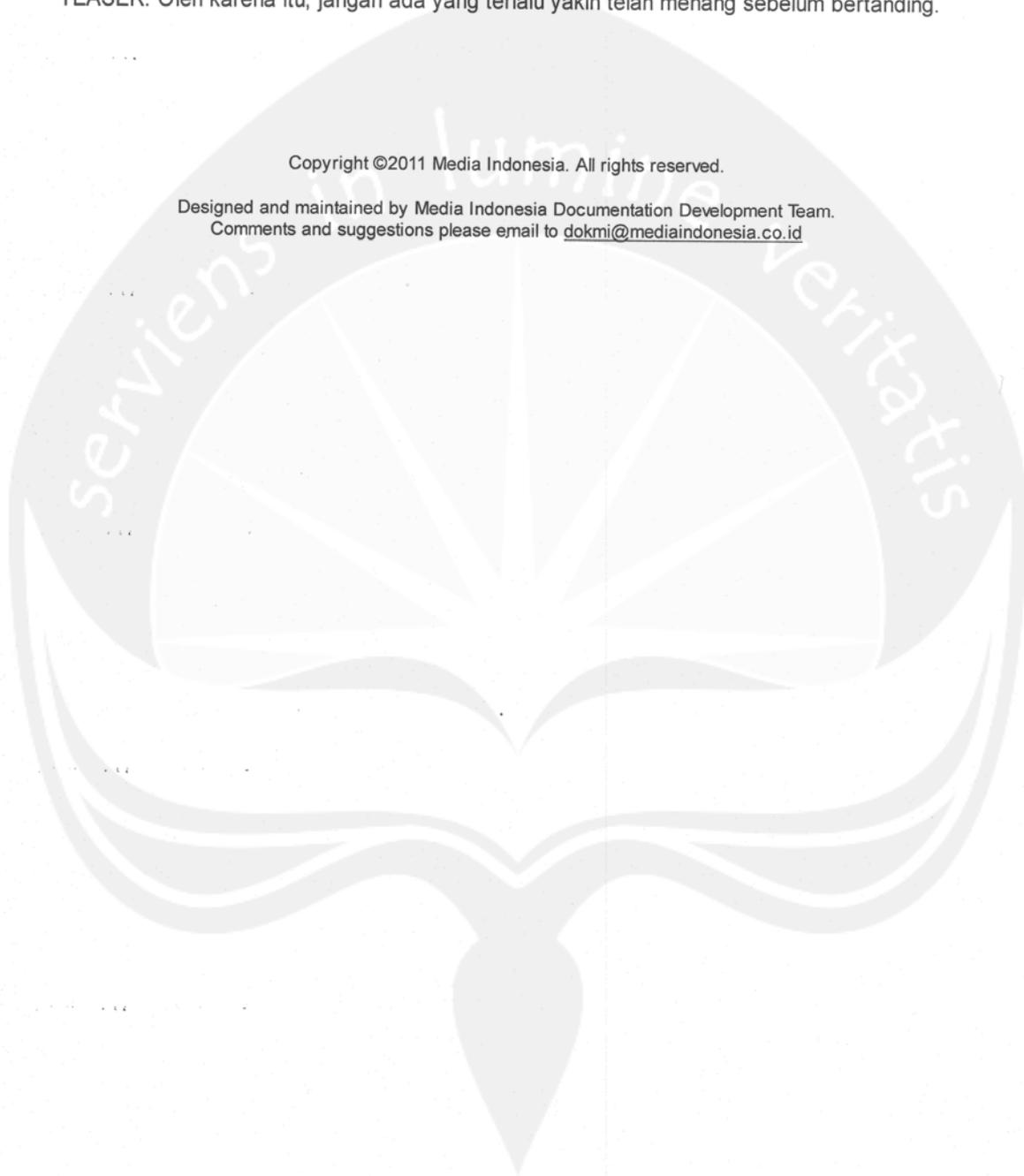
dapat diwujudkan atau tidak. Berdasarkan itu lalu memutuskan manakah pasangan capres-cawapres yang layak dipilih.

Siapakah yang akan menjadi presiden 2009-2014 masih merupakan pertanyaan yang terbuka. Rakyat yang akan menentukan dan rakyat bisa berubah pilihan. Oleh karena itu, jangan ada yang terlalu yakin telah menang sebelum bertanding.

TEASER: Oleh karena itu, jangan ada yang terlalu yakin telah menang sebelum bertanding.

Copyright ©2011 Media Indonesia. All rights reserved.

Designed and maintained by Media Indonesia Documentation Development Team.
Comments and suggestions please email to dokmi@mediaindonesia.co.id



CODING SHEET TEKS EDITORIAL 4

Judul Editorial : Agenda Ekonomi Capres-Cawapres

Rubrik : Halaman Muka Media Indonesia

Edisi : Jumat, 22 Mei 2009

Penulis :-

PERANGKAT ENTMAN	TEMUAN TEKS (INPUT PARAGRAF atau KALIMAT)
<i>Problem Identification</i>	<p>Begitu banyak pilihan program ekonomi dalam salah satu agenda yang dirancang ketiga pasangan capres-cawapres membuka banyak pertimbangan pemikiran untuk menentukan pilihan bagi masyarakat pemilih.</p> <p><i>“KOMPETISI menuju pemilihan presiden (pilpres) sudah dimulai. Rakyat kini memiliki tiga pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan agenda masing-masing.”</i> (paragraf 1)</p> <p><i>“Salah satu agenda yang menjadi perhatian luas adalah program ekonomi.”</i> (paragraf 2)</p> <p><i>“Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, Megawati-Prabowo dan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mulai membuka visi ekonomi kerakyatan, tetapi jalan yang mereka pilih tidak sama. Maka, inilah pemilihan</i></p>

	<p><i>presiden dengan agenda ekonomi paling beragam jika dibandingkan dengan pilpres sebelumnya.” (paragraf 3)</i></p> <p><i>“Pasangan JK-Wiranto memilih perbaikan sektor riil lebih cepat dan lebih baik. Dalam dialog dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, awal pekan ini, Kalla menegaskan tidak akan menggantungkan sistem perekonomian Indonesia pada pasar modal semata.” (paragraf 4)</i></p> <p><i>“Itu disebabkan hajat hidup masyarakat Indonesia justru bergantung kepada keberlangsungan sektor riil. Secara lugas, Kalla mencontohkan anjloknya pasar modal hanya bersifat sesaat dengan akibat yang tidak masif. Akan tetapi, jika yang hancur adalah Pasar Tanah Abang Jakarta dan Pasar Klewer Solo, dampaknya ke seluruh Indonesia.” (paragraf 5)</i></p> <p><i>“Kalla juga menyoroti lambannya birokrasi, tingginya suku bunga kredit , buruknya infrastruktur, serta tingginya alokasi APBN untuk subsidi dan membayar utang sebagai biang kerok lambatnya pertumbuhan ekonomi. Capres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura ini pun berjanji memperbaiki semua itu dengan target mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% mulai 2011.” (paragraf 6)</i></p> <p><i>“Caranya dengan menyelesaikan konversi minyak tanah ke gas pada 2010 dan merampungkan proyek listrik</i></p>
--	--

10.000 megawatt. Jika terealisasi, anggaran bisa di hemat hingga Rp 200 triliun. Dana itulah yang akan digunakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.” (paragraf 7)

“Berbeda dengan Kalla, SBY mengemukakan agenda pembangunan ekonomi untuk semua. Ia tidak mengkhususkan pada satu segi. Ia pun hanya menjanjikan rata-rata pertumbuhan ekonomi 7% pada akhir 2014.” (paragraf 8)

“Alasannya Indonesia masih dipengaruhi buruknya perekonomian dunia dan masih dalam tahap pemulihan ekonomi pascareresi global. Selain itu, masih banyak agenda APBN yang perlu dibiayai, di antaranya program social safety net. SBY memilih untuk tetap mengedepankan stabilitas makroekonomi. Ia menargetkan konsumsi domestik 5% dan inflasi di bawah 6%.” (paragraf 9)

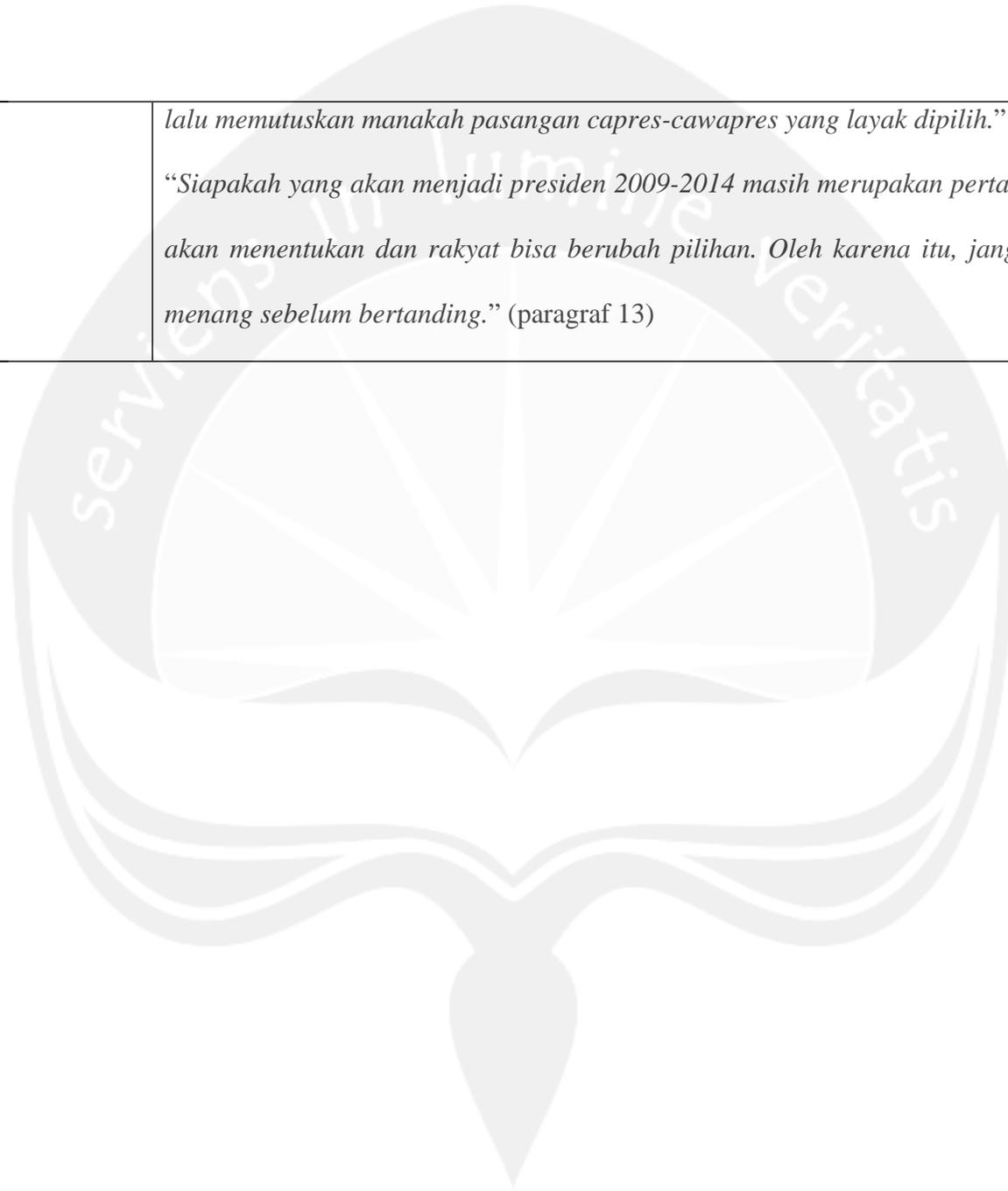
“Akan halnya pasangan Mega-Prabowo amat gamblang menitikberatkan agenda ekonomi kerakyatan. Misalnya, menggenjot pertanian dengan mencetak 7 juta hektare sawah. Selain itu, Mega-Prabowo akan memaksimalkan potensi penghasilan laut dengan memberikan akses yang luas kepada nelayan. Pasar-pasar tradisional pun digenjot. Prabowo pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga 10% dalam kurun waktu lima tahun mendatang.” (paragraf 10)

<p>Causal Interpretation</p>	<p>Program-program ekonomi yang direncanakan ketiga pasangan capres-cawapres belum rinci dalam level prakteknya, sehingga masyarakat pemilih masih dalam kondisi bingung untuk menentukan pilihannya.</p> <p><i>“Capres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura ini pun berjanji memperbaiki semua itu dengan target mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% mulai 2011.”</i> (paragraf 6 kalimat 2)</p> <p><i>“Caranya dengan menyelesaikan konversi minyak tanah ke gas pada 2010 dan merampungkan proyek listrik 10.000 megawatt. Jika terealisasi, anggaran bisa di hemat hingga Rp 200 triliun. Dana itulah yang akan digunakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.”</i> (paragraf 6 kalimat 7)</p> <p><i>“Berbeda dengan Kalla, SBY mengemukakan agenda pembangunan ekonomi untuk semua. Ia tidak mengkhususkan pada satu segi. Ia pun hanya menjanjikan rata-rata pertumbuhan ekonomi 7% pada akhir 2014.”</i> (paragraf 8)</p> <p><i>“Akan halnya pasangan Mega-Prabowo amat gamblang menitikberatkan agenda ekonomi kerakyatan. Misalnya, menggenjot pertanian dengan mencetak 7 juta hektare sawah. Selain itu, Mega-Prabowo akan memaksimalkan potensi penghasilan laut dengan memberikan akses yang luas kepada nelayan. Pasar-pasar tradisional pun digenjot. Prabowo pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga 10% dalam kurun</i></p>
-------------------------------------	---

	<p>waktu lima tahun mendatang.” (paragraf 10)</p> <p>“Namun, dengan tahapan seperti apa dan dengan cara bagaimana sasaran ekonomi itu diraih, masyarakat belum mendapatkan gambaran yang jelas.” (paragraf 11 kalimat 2)</p>
Moral Evaluation	<p>Semua janji-janji yang telah diprogramkan harus dipertanggungjawabkan secara lebih rinci dan jelas ketika masa Kampanye sudah ditentukan.</p> <p>“Amatlah jelas, ketiga pasangan memiliki agenda dan cara masing-masing untuk menarik pemilih.” (paragraf 11 kalimat 1)</p> <p>“Gambaran yang jelas itu mestinya akan diperoleh pada masa kampanye nanti. Di situlah tiap-tiap pasangan capres-cawapres memaparkan dengan gamblang bagaimana semua janji ekonomi itu dapat diwujudkan. Dari sanalah kita bisa mengkaji apakah yang ditawarkan dapat diwujudkan atau tidak. Berdasarkan itu lalu memutuskan manakah pasangan capres-cawapres yang layak dipilih.” (paragraf 12)</p>
Treatment Recommendation	<p>Ketiga pasangan kandidat capres-cawapres dihibau untuk tidak membanggakan diri terhadap program-programnya, karena penentuan menang kalah pada Pilpres ada di tangan masyarakat pemilih.</p> <p>“Dari sanalah kita bisa mengkaji apakah yang ditawarkan dapat diwujudkan atau tidak. Berdasarkan itu</p>

lalu memutuskan manakah pasangan capres-cawapres yang layak dipilih.” (paragraf 12 kalimat 3-4)

“Siapakah yang akan menjadi presiden 2009-2014 masih merupakan pertanyaan yang terbuka. Rakyat yang akan menentukan dan rakyat bisa berubah pilihan. Oleh karena itu, jangan ada yang terlalu yakin telah menang sebelum bertanding.” (paragraf 13)



Dokumentasi Naskah

Edisi: 3 Juli 2009
Halaman: 01-05

Penulis:
Rubrik: **Editorial**



Pengerdilan Demokrasi

DEMOKRASI kita hari-hari ini dikepung berbagai pernyataan picik yang mengerdilkan serta membodohi. Yang lebih menyedihkan, pengerdilan dan pembodohan itu muncul dari orang yang sangat paham demokrasi.

Itulah yang terjadi ketika Andi Mallarangeng, seorang doktor ilmu politik, mengatakan belum saatnya orang Sulawesi Selatan menjadi presiden.

Andi yang juga juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu melontarkan pernyataan itu ketika berorasi dengan penuh semangat di depan pendukung capres-cawapres SBY-Boediono di Makassar, Sulawesi Selatan.

Banyak yang marah atas pernyataan Andi itu. Kemarahan yang sangat wajar karena demokrasi yang dengan susah payah ditegakkan, bahkan dengan darah dan air mata anak bangsa, hendak dimundurkan puluhan abad ke belakang.

Secara umum ada dua penilaian terhadap pernyataan Andi Mallarangeng itu. Pertama, penilaian yang agak halus yang menyebut Andi tak paham konstitusi yang mendudukan segenap anak bangsa ini pada posisi yang sama, baik untuk memilih maupun dipilih. Semua suku, semua agama, semua asal usul, memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi presiden.

Dalam perspektif hak konstitusional itu, majunya pasangan JK-Wiranto menjadi capres-cawapres justru sebuah langkah besar sejarah karena JK berasal dari Sulawesi Selatan berpasangan dengan Wiranto yang berasal dari Jawa. JK-Wiranto mendobrak kungkungan sejarah bahwa hanya seorang Jawa yang layak menjadi presiden.

Pasangan Mega-Prabowo pun merupakan pasangan yang unik dari segi asal usul. Mega merupakan hasil perkawinan seorang ayah Soekarno yang merupakan campuran Jawa dan Bali serta ibu Fatmawati yang berasal dari Bengkulu, Sumatra.

Dari sudut asal usul itu justru hanya pasangan SBY-JK yang berasal dari daerah tertentu, yaitu keduanya berasal dari Jawa Timur. Oleh karena itu, pernyataan Andi Mallarangeng itu jelas dapat dinilai sebagai pernyataan yang hendak kembali mengukuhkan yang pantas menjadi presiden hanya orang Jawa. Selebihnya adalah warga negara kelas dua, kelas tiga, bahkan kelas empat.

Adalah tidak masuk akal seorang Andi Mallarangeng tidak paham konstitusi dan hak-hak demokrasi. Karena itu, muncul penilaian yang kedua, penilaian yang kasar bahwa seorang Andi Mallarangeng menghalalkan segala cara agar jagonya menang. Dalam hal ini tidak ada urusan dengan atribut doktor, jabatan juru bicara presiden, serta posisi ketua partai yang disandangnya. Semua itu lenyap, asalkan calon presiden yang diusungnya menang.

Maka, celakalah negeri ini bila menang dengan cara apa pun menjadi pilihan moral untuk berkuasa. Inilah moral yang tak bermoral.

Maka, melalui forum ini kita imbau rakyat untuk kritis menggunakan hak demokrasi. Pilihlah presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati nurani setelah menimbang dengan matang siapakah yang paling jujur dan tulus di antara mereka, termasuk juru kampanyenya. Tak kalah penting, jangan mau digiring hanya untuk satu putaran dengan alasan apa pun. Setelah mencontreng, bersedialah menjadi sukarelawan untuk mengawal hasil penghitungan suara dari TPS hingga setidaknya ke kecamatan.

TEASER: Maka, celakalah negeri ini bila menang dengan cara apa pun menjadi pilihan moral

untuk berkuasa. Inilah moral yang tak bermoral.

Copyright ©2011 Media Indonesia. All rights reserved.

Designed and maintained by Media Indonesia Documentation Development Team.
Comments and suggestions please email to dokmi@mediaindonesia.co.id



CODING SHEET TEKS EDITORIAL 5

Judul Editorial : Pengerdilan Demokrasi
Rubrik : Halaman Muka Media Indonesia
Edisi : Jumat, 3 Juli 2009
Penulis :-

PERANGKAT ENTMAN	TEMUAN TEKS (INPUT PARAGRAF atau KALIMAT)
Problem Identification	<p>Adanya deskriminasi terhadap praktek demokrasi dalam proses pemilihan presiden.</p> <p><i>“DEMOKRASI kita hari-hari ini dikepung berbagai pernyataan picik yang mengerdikan serta membodohi. Yang lebih menyedihkan, pengerdilan dan pembodohan itu muncul dari orang yang sangat paham demokrasi.”</i> (paragraf 1)</p> <p><i>“Itulah yang terjadi ketika Andi Mallarangeng, seorang doktor ilmu politik, mengatakan belum saatnya orang Sulawesi Selatan menjadi presiden.”</i> (paragraf 2)</p> <p><i>“Andi juga juru bicara PResiden Susilo Bambang Yudhoyono itu melontarkan pernyataan itu ketika berorasi</i></p>

	<p><i>dengan penuh semangat di depan pendukung capres-cawapres SBY-Boediono di Makasar, Sulawesi Selatan.” (paragraf 3)</i></p> <p><i>“Banyak yang marah atas pernyataan Andi itu. Kemarahan yang sangat wajar karena demokrasi yang dengan susah payah ditegakkan, bahkan dengan darah dan air mata anak bangsa, hendak dimundurkan puluhan abad ke belakang.” (paragraf 4)</i></p> <p><i>“Oleh karena itu, pernyataan Andi Mallarangeng itu jelas dapat dinilai sebagai pernyataan yang hendak kembali mengukuhkan yang pantas menjadi presiden hanya orang Jawa. Selebihnya adalah warga negara kelas dua, kelas tiga, bahkan kelas empat.” (paragraf 8 kalimat 2-3)</i></p>
<p><i>Causal Interpretation</i></p>	<p>Pidato Andi Mallarangeng pada saat kampanye pasangan SBY-Boediono di Sulawesi Selatan sangat melecehkan orang Sulawesi Selatan. Pernyataan tersebut jelas menunjuk kepada Jusuf Kalla yang berasal dari Makasar menjadi rival SBY sebagai capres 2009.</p> <p><i>”Itulah yang terjadi ketika Andi Mallarangeng, seorang doktor ilmu politik, mengatakan belum saatnya orang Sulawesi Selatan menjadi presiden.” (paragraf 2)</i></p> <p><i>“Yang lebih menyedihkan, pengerdilan dan pembodohan itu muncul dari orang yang sangat paham</i></p>

	<p><i>demokrasi.” (paragraf 1 kalimat 2)</i></p> <p><i>“Banyak yang marah atas pernyataan Andi itu. Kemarahan yang sangat wajar karena demokrasi yang dengan susah payah ditegakkan, bahkan dengan darah dan air mata anak bangsa, hendak dimundurkan puluhan abad ke belakang.” (paragraf 4)</i></p> <p><i>“Dalam perspektif hak konstitusional itu, majunya pasangan JK-Wiranto menjadi capres-cawapres justru sebuah langkah besar sejarah karena JK berasal dari Sulawesi Selatan berpasangan dengan Wiranto yang berasal dari Jawa. JK-Wiranto mendobrak kungkungan sejarah bahwa hanya seorang Jawa yang layak menjadi presiden.” (paragraf 6)</i></p> <p><i>“Pasangan Mega-Prabowo pun merupakan pasangan yang unik dari segi asal-usul. Mega merupakan hasil perkawinan seorang ayah Soekarno yang merupakan campuran Jawa dan Bali serta ibu Fatmawati yang berasal dari Bengkulu, Sumatra.” (paragraf 7)</i></p> <p><i>“Dari sudut asal-usul itu justru hanya pasangan SBY-Boediono yang berasal dari daerah tertentu, yaitu keduanya berasal dari Jawa Timur.” (paragraf 8 kalimat 1)</i></p>
<i>Moral Evaluation</i>	Andi Mallarangeng yang memiliki latar belakang pendidikan doctor politik dianggap tidak memiliki

pemahaman tentang praktek demokrasi dan hak warga Negara secara konstitusi serta dianggap tidak memiliki moral yang baik.

“Secara umum ada dua penilaian terhadap pernyataan Andi Mallarangeng itu. Pertama, penilaian yang agak halus yang menyebut Andi tak paham konstitusi yang mendudukan segenap bangsa ini pada posisi yang sama, baik untuk memilih maupun dipilih. Semua suku, semua agama, semua asal-usul, memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi presiden.” (paragraf 5)

“Adalah tidak masuk akal seorang Andi Mallarangeng tidak paham konstitusi dan hak-hak demokrasi. Karena itu, muncul penilaian yang kedua, penilaian yang kasar bahwa seorang Andi Mallarangeng menghalalkan segala cara agar jagonya menang. Dalam hal ini tidak ada urusan dengan atribut doktor, jabatan juru bicara presiden, serta posisi ketua partai yang disandangnya. Semua itu lenyap, asalkan calon presiden yang diusungnya menang.” (paragraf 9)

“Maka, celakalah negeri ini bila menang dengan cara apa pun menjadi pilihan moral untuk berkuasa. Inilah yang tak bermoral.” (paragraf 10)

	<p>Selain itu, malah kehadiran Jusuf Kalla yang berasal dari Sulawesi Selatan mencalonkan diri dianggap sebagai sosok penyelamat bagi budaya sejarah kepresidenan yang terkurung oleh pemahaman sempit.</p> <p><i>“Dalam perspektif hak konstitusional itu, majunya pasangan JK-Wiranto menjadi capres-cawapres justru sebuah langkah besar sejarah karena JK berasal dari Sulawesi Selatan berpasangan dengan Wiranto yang berasal dari Jawa. JK-Wiranto mendobrak kungkungan sejarah bahwa hanya seorang Jawa yang layak menjadi presiden.”</i> (paragraf 6)</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i></p>	<p>Masyarakat pemilih diajak untuk ikut andil dalam proses pemilihan presiden yang berlangsung di TPS supaya masyarakat dapat memantau dan mengurangi upaya kecurangan yang kemungkinan dapat terjadi.</p> <p><i>“Dalam hal ini tidak ada urusan dengan atribut doktor, jabatan juru bicara presiden, serta posisi ketua partai yang disandangnya. Semua itu lenyap, asalkan calon presiden yang diusungnya menang.”</i> (paragraf 9 kalimat 3-4)</p> <p><i>“Maka, melalui forum ini kita imbau rakyat untuk kritis menggunakan hak demokratisnya. Pilihlah presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati nurani setelah menimbang dengan matang siapakah yang paling jujur dan tulus diantara mereka, termasuk juru kampanyenya. Tak kalah penting jangan mau digiring hanya</i></p>

	<p><i>untuk satu putaran dengan alasan apa pun. Setelah mencotreng, bersedialah menjadi sukarelawan untuk mengawal hasil penghitungan suara dari TPS hingga setidaknya ke kecamatan.” (paragraf 11)</i></p>
--	---





LAMPIRAN II

SURAT KETERANGAN

NO.170/Srt.Penelitian/Sekred/MI/IX/2011

Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta di bawah ini :

Nama : Elisabeth Arum Dian Prawesti
NIM : 05 09 02763/ KOM
Fakultas : Komunikasi, Ilmu Sosial dan Politik

Telah melakukan penelitian di redaksi **Media Indonesia** sebagai bahan referensi untuk skripsi dengan judul "**Jusuf Kalla Di Mata Surat Kabar Harian (Analisis Framing Pencitraan Jusuf Kalla masa Pencalonan Presiden Pemilu 2009 dalam ulasan Editorial SKH Media Indonesia periode April – Juli 2009)**" pada tanggal 12 September 2011.

Demikian surat keterangan ini kami buat, harap dipergunakan semestinya.

Jakarta, 15 September 2011

Hormat kami,



PT CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

Teguh Nirwahyudi
Sekretaris Redaksi

BIODATA NARASUMBER

- 1. Nama Lengkap : SAUDENSIOS SUTARDI
- 2. Nama panggilan : SAUDENSI
- 3. Jabatan / pekerjaan : KADU Content Engineer
- 4. TTL : ~~KADU~~ Micon
- 5. Jenis kelamin : Flower 17 MEI 1985
- 6. Agama : KATOLIK
- 7. Hobi : BACA
- 8. Status Perkawinan : KAWIN
- 9. Jumlah anak : 3
- 10. Suku : Flores
- 11. Kota Asal : Manggarai
- 12. Alamat Rumah : 26 Prabal IV NO 8, Pukamani, Tapes, Depok
- 13. Telp. / Hp : 08129491423
- 14. Email : saudensios@indosat.net.id / saudensios@gmail.com
- 15. Masuk MI sejak : Tahun 1990
- 16. Sejarah Pendidikan
 - TK : Tahun di +
 - SD : Tahun 75 di Flores
 - SMP : Tahun 82 di Flores
 - SMU : Tahun 87 di Banyuwangi
 - PT : Tahun 1993 di - P. Banyuwangi
- 17. Sejarah Pekerjaan

Periode Tahun	Pekerjaan
1990 - 1993	Miy
- 18. Pengalaman Organisasi : -
- 19. Aktivitas di Luar Pekerjaan : -

BIODATA NARASUMBER

1. Nama Lengkap : TEGUH NIRWAHYUDI
2. Nama panggilan : TEGUH
3. Jabatan / pekerjaan : SEKRETARIS REDAKSI
4. TTL : BONDOWOSO, 8 JANUARI 1968.
5. Jenis kelamin : LAKI $\frac{2}{2}$
6. Agama : ISLAM
7. Hobi : MEMBACA
8. Status Perkawinan : MENIKAH
9. Jumlah anak : SATU (1)
10. Suku : JAWA
11. Kota Asal : BANDUNG
12. Alamat Rumah : PONDOK PEKAYON INDAH
BLOK BB 29/10 BEKASI
13. Telp. / Hp : 0811-151349
14. Email : teguh.nirwahyudi@gmail.com
15. Masuk MI sejak : Tahun 1997

16. Sejarah Pendidikan

TK	: Tahun	di
SD	: Tahun 1975	di BANDUNG
SMP	: Tahun 1978	di BANDUNG
SMU	: Tahun 1984	di BANDUNG
PT	: Tahun 1989	di - -

17. Sejarah Pekerjaan

Periode Tahun	Pekerjaan
1991-1995	MAJALAH OTOMOTIF

18. Pengalaman Organisasi : -

19. Aktivitas di Luar Pekerjaan : .

BIODATA NARASUMBER

1. Nama Lengkap : Laurens tato
2. Nama panggilan : Laurens
3. Jabatan / pekerjaan : Redaktur Senior
4. TTL : Flores, 15 Agustus 1955
5. Jenis kelamin : Pria
6. Agama : Katolik
7. Hobi : travelling
8. Status Perkawinan : Menikah
9. Jumlah anak : 2
10. Suku : Flores
11. Kota Asal : Flores
12. Alamat Rumah : Vila Bintaro Rejensi Blok A3/D
Pondok Aren, Tangerang.
13. Telp. / Hp : 0816909643, 081213777883
14. Email : tato@mediaindonesia.com
15. Masuk MI sejak : Tahun

16. Sejarah Pendidikan

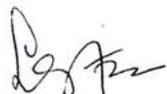
TK	: Tahun	di
SD	: Tahun 1967	di Flores
SMP	: Tahun 1969	di Flores
SMU	: Tahun 1972	di Flores
PT	: Tahun 1980	di Ikt

17. Sejarah Pekerjaan : w7

Periode Tahun	Pekerjaan
1985 - 1986	wawancara Jurnal Ekui
1987	wawancara Harian Prioritas
1989 - sekarang	wawancara media Indonesia

18. Pengalaman Organisasi : Anggota PWI : 1990 - sekarang

19. Aktivitas di Luar Pekerjaan :


(Laurens tato)

PETUNJUK WAWANCARA

UMUM

1. Bagaimana Sejarah dan data SKH Media Indonesia (perkembangannya hingga saat ini dan visi misi)?
2. Bagaimana Sistem Kerja SKH Media Indonesia (pra-pasca produksi)?
3. Bagaimana penentuan Rubrikasi dan fungsinya dalam SKH Media Indonesia?
4. Bagaimana sistem rapat kerja dan penentuan kebijakan redaksional SKH MI?
5. Bagaimana sistem penyeleksian suatu isu atau berita yang akan dimuat?
6. Bagaimana sistem penentuan Editorial SKH MI (pra-pasca produksi) dan penempatan (halaman 1)?
7. Apa saja yang menjadi kekuatan (ciri khas) SKH MI dari SKH yang lain, khususnya dalam pemberitaannya (editorialnya)?
8. Apakah pernah SKH MI menerima protes atas pemberitaannya / editorialnya? Bagaimana sikap redaksi MI?
9. Biodata Narasumber yang di wawancarai.

SEPUTAR PENCALONAN JUSUF KALLA SEBAGAI CAPRES 2009 pada EDITORIAL SKH MI

1. Bagaimana SKH MI memandang berlangsungnya Pemilu 2009, khususnya saat pra Pilpres?
2. Menurut MI, apa yang menjadi penyebab utama 'bercerainya' koalisi partai demokrat dan golkar menuju Pemilu 2009?
3. Apakah yang menyebabkan pasangan SBY-JK tidak lagi maju sebagai capres-cawapres pada Pemilu 2009? Adakah permasalahan baik secara eksternal maupun internal yang terjadi antara SBY-JK yang diketahui MI? Apa saja?
4. Bagaimana pendapat MI tentang kandidat capres-cawapres pada Pemilu 2009 yang mengusung JK-Wiranto, SBY-Budiono, Mega-Prabowo?
5. Apakah dalam Editorial, MI memberikan porsi yang sama / berimbang dalam ulasannya (*cover both side*)?
6. Apa yang menjadi pertimbangan/ kebijakan tentang penempatan Editorial MI di halaman muka? (satu-satunya SKH Nasional)
7. Siapa atau kebijakan seperti apa yang menentukan wartawan mana yang akan menulis editorial MI?
8. Bagaimana cara/ struktur penulisan yang berlaku di SKH MI?
9. Dalam memilih topik/ judul editorial, apa saja yang menjadi pertimbangan? Apakah otoritas wartawan editorial atau keputusan redaksi?
10. Apakah MI mendukung majunya JK sebagai capres pada pemilu 2009? Alasannya?
11. Bagaimana posisi MI (saat itu masih Surya Paloh masih di Golkar) terkait dengan pencalonan JK sebagai capres 2009?

12. Mengapa dalam ulasan editorial MI terkait capres-cawapres pemilu 2009, kecenderungan pasangan JK-Wiranto diletakkan pada ulasan awal? Apakah kebijakan penulis editorial atau redaksi?
13. Apa saja yang menjadi kekuatan/ ciri khas SKH MI dalam editorialnya?
14. Pernahkan SKH MI di protes oleh pihak-pihak yang di ulas dalam editorial? Bagaimana menyikapinya?
15. Kendala apa saja yang ditemui saat produksi editorial MI?
16. Apa pendapat MI tentang kombinasi pasangan capres-cawapres JK-Wiranto?
17. Bagaimana pandangan MI terhadap pencalonan JK sebagai capres Pemilu 2009 yang masih menjabat sebagai wakil Presiden 2004-2009?
18. Bagaimana pandangan MI terhadap sosok JK yang tergolong satu-satunya capres 2009-2014 yang tidak memiliki darah 'Jawa'?
19. Berdasarkan ulasan Editorial MI mengenai pencalonan Jusuf Kalla sebagai capres pemilu 2009, opini seperti apa yang ingin di bentuk SKH MI pada publik?

Pertanyaan untuk penulis Editorial

1. Bagaimana anda melihat pemilu 2009, terutama saat pra pilpres?
2. Secara pribadi, bagaimana anda melihat pencalonan JK sebagai capres 2009?
3. Apakah anda mendukung pencalonan JK sebagai capres 2009? Alasannya?
4. Menurut anda, bagaimana kinerja JK? Bagaimana kinerja saat masih sebagai wapres 2004-2009 dan jika menjadi capres 2009-2014?
5. Apa saja yang dilakukan untuk menuliskan sebuah topik ke dalam editorial? (pra-pasca produksi editorial)
6. Bagaimana pemilihan topik, judul, hingga isi dalam editorial MI?
7. Apakah ada hambatan dalam penulisan editorial mengenai pencalonan capres-cawapres pemilu 2009? Bagaimana pengalaman anda?
8. Adakah rutinitas redaksi SKH MI yang mempengaruhi anda dalam membuat Editorial? Seperti apa? Khususnya dalam ulasan editorial tentang pencalonan capres-cawapres?
9. Seberapa besar pengaruh isu mengenai pencalonan JK sebagai capres 2009 dan keterlibatan partai Golkar (partai yang dianut Surya Paloh saat itu) dalam penulisan editorial yang dilakukan SKH MI?
10. Bagaimana SKH MI memandang isu tersebut?
11. Apakah anda sebagai redaktur yang menulis editorial SKH MI pernah menerima 'suap' dari JK atau Golkar?
12. Mengapa pasangan capres-cawapres JK-Wiranto cenderung menjadi ulasan awal pada editorial MI?

13. Berdasarkan ulasan editorial MI tentang pencalonan presiden, frame seperti apa yang ingin dibentuk oleh MI tentang *profiling* Jusuf Kalla? Apa saja yang mendasari frame tersebut?
14. Bagaimana frame tersebut dijelaskan SKH MI pada wartawan yang menulis editorial maupun berita?
15. Bagaimana rapat redaksi berlangsung? Siapa yang memimpin dan kebijakan-kebijakan apa yang dimunculkan? Apa saja yang dibahas?

Tambahan Pertanyaan:

1. Dalam sehari rapat redaksi diadakan berapa kali? Siapa saja yang wajib hadir? Siapa pihak pengambil keputusan/kebijakan?
2. Siapa yang berwenang untuk mengarahkan tentang editorial yang akan diulas?
3. Dalam proses pembuatan editorial, apakah pernah ada kasus mengenai pengemasan ulasan tertentu yang kurang sesuai oleh pimred/pembuat kebijakan editorial, sehingga terpaksa harus diubah kembali?
4. Seberapa besar keterlibatan Surya Paloh dalam editorial SKH MI?
5. Kapan pergantian pemimpin redaksi MI berganti? Berapa periode?
6. Bagaimana MI melihat 'perceraian' antara SBY-JK, yang kemudian saling bersaing pada Pilpres 2009?
7. Menurut anda, capres-cawapres yang ideal itu seperti apa? Apakah harus bersuku tertentu dari golongan tertentu, atau bagaimana?
8. Bagaimana pandangan anda mengenai Andi Mallarangeng selaku jubiir SBY yang terkesan meremehkan JK tidak layak jadi presiden RI?

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

SUMBER 1

GAUDENSIUS SUHARDI

Kadiv. Content Enrichment

Waktu : Senin, 12 September 2011 / pukul 16:07-17:52 wib

Tempat : Redaksi SKH Media Indonesia

Ket: A = peneliti

B = narasumber 1

A : Mengenai editorial...?

B : Editorial Media Indonesia itu dari hari Senin sampai Sabtu, hari libur pun ada editorial, walaupun cetaknya tidak terbit di hari libur nasional, editorial media indonesia tetap ada dan itu diisi di *onlinenya*, Media Indonesia online/ Micom..dan juga dibedah di Metro TV. Antara pembedah di Metro TV dan yang menulis tidak selalu sama, tapi mereka satu tim. Penulisnya itu sekitar 6-7 orang, di bagian bedah editorial itu 6 orang juga tapi beda-beda. Kalo saya bedah di Metro TV itu hari Rabu. Saya juga pembedah dan penulis. Makanya, ketika anda bertanya siapa yang menulis ini, itu yang saya tidak bisa beritahukan. Tapi yang bisa saya beritahu itu editorial ditulis oleh sebuah tim, tim ini rapat tiap hari, kecuali hari Sabtu tentunya, Senin sampai Jumat kita rapat. Rapatnya jam dua. Di dalam rapat itulah, yang ditentukan topiknya apa, siapa penulisnya dan titik berdiri / sudut pandang media itu apa. Sebagai contoh untuk editorial besok...besok kami bicara tentang Ambon..sudah ditentukan siapa yang menulis. Bahkan untuk hari Rabu, sudah ditetapkan temanya apa...temanya Rabu itu tentang pencemaran nama baik..itu ditetapkan dalam rapat. Kadang-kadang kita bisa menetapkan 2-3 hari ke depan, tapi itu direvisi setiap hari. Ketika kita menentukan sampai Rabu, besok rapat lagi..bisa saja temanya berubah. Ya..cuma itu yang bisa dijelaskan tentang editorial.

A : bentuk penulisan editorial itu diseragamkan seperti apa?

B : sebetulnya...hampir kita tidak mengenal lagi siapa yang menulis karena polanya sudah hampir sama..bahkan sampai gaya bahasa pun ketika editorial ini dilepas...kita tidak tahu lagi siapa yang menulis...

A : kebijakan pola penulisan yang seperti apa..

B : kebijakan itu...rapat hanya menentukan kebijakan umumnya...tentang arah editorial itu kemana..selebihnya.. soal bagaimana menulisnya itu diserahkan kepada penulisnya....di dalam penelitiannya... (di sela minta buku pada pak Teguh...dan telpon)

Jadi, bagaimana selanjutnya..tergantung dari yang menulisnya...ambil contoh, editorial hari ini misalnya...rapat hanya menentukan editorial hari Senin itu tentang seleksi calon pimpinan KPK...bagaimana mengelaborasi tema tersebut diserahkan pada penulisnya..setelah ditulis akan kembali diedit...ada editornya..karena yang ditulis itu sikap ya..sikap resmi institusi...ini dia contoh (dibuka buku 'jujur bersuara' editorial MI) di sini...sudah ditemukan, sudah diteliti berapa lama rata-rata seseorang itu membutuhkan waktu untuk menulis editorial.

A : yang saya mau tanyakan itu struktur penulisan editorial itu...?

B : itu teoritis sekali ya...ada dua struktur penulisan editorial. Ada induktif ada deduktif. Biasanya, editorial itu harus memahami *grand design*nya apa, *grand theory*nya apa...katakan bicara tentang...ambil contoh hari ini tentang seleksi pimpinan KPK. Itu kan *grand theory*nya...kewenangan menentukan itu sebetulnya ada di siapa..apakah pada proses politiknya di DPR..ataukah tim profesional yang ditentukan oleh presiden, di situ pertarungan idenya. Jadi bisa saja editorial itu hal umum ke khusus, atau khusus ke umum. Ada juga teknisnya...meski tidak selengkap di *hard news*, tapi selalu ada pastinya...itu struktur penulisannya. Selebihnya..tergantung gaya penulisan setiap orang.

A : editorial yang jadi obyek penelitian saya itu rata-rata paragrafnya sekitar 11-12, itu apakah ada aturannya atau bagaimana?

B : oh itu...bukan aturan tapi lebih kepada teknis...ketika logo masih di atas itu 57 baris...nah logo yang baru sekitar 47 baris...jadi bukan aturan tim editorial...itu berdasarkan baris di komputer, kami menggunakan slide...

A : di akhir editorial itu seperti ada semacam kesimpulan...?

B : di akhir itu selalu sikap. Apakah setuju, tidak setuju atau sama sekali tidak bersikap..tidak bersikap pun artinya kami tidak menyikapi suatu isu itupun merupakan bagian dari sikap...itu bagian akhir.

A : kalau editorial MI menggunakan struktur piramida atau struktur apa...?

B : kami pakai struktur *blog*. Jadi semua penting...kalo berita itu kan piramida terbalik. Kami tidak. Kalau blog itu susah memotongnya...dia menjadi satu kesatuan.

Jadi, begini...sistem editorial kita itu agak lain...kita sistemnya antar satu alinea ke alinea berikutnya..kita pakai kata kunci sebagai penghubung...sehingga dari atas sampai bawah itu menjadi satu kesatuan.

A : bagaimana penulis menuangkan topik isu tersebut? Sendiri atau bersama-sama?

B : di rapat diputuskan kemana arah editorial itu...seluruh pikiran si penulis itu menuju pada apa yang telah ditetapkan, tidak mungkin melenceng lagi. Rapat yang menentukan arah editorial kemana...sikap kita apa...kemudian itu diproses internalisasi pada penulisnya, kemudian nanti ada pemeriksanya.

A : biasanya yang mengarah/ memimpin kebijakan itu? Yang memutuskan kebijakan?

B : tidak...tidak ada yang memimpin rapat....rapat editorial itu ya proses diskusi, jadi tidak di 'ketok' seperti rapat biasa...jadi ya diskusi saja...setiap orang berbicara di situ...lalu diputuskan garis besar...sikapnya apa..selanjutnya diserahkan pada si penulisnya.

A : sikap/ kebijakan yang diputuskan itu berdasarkan pertimbangan apa saja?

B : ya banyak pertimbangannya...kami meggunakan akal sehat saja...

A : maksudnya?

B : jadi begini...misalnya...apakah pro 10 atau 8 jumlah pimpinan KPK...itu kan perdebatan ya..bagi kami sesuatu yang tidak *logic* kalau DPR minta 10 karena sudah diserahkan 8 nama, berarti dia menentukan 4, karena apa...karena yang 1 otomatis sudah jadi anggota karena sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi...jadi, lebih pada akal sehatnya saja.

A : jadi, lebih menggunakan logika pikir terhadap sebuah kasus?

B : iya..

A : ini tentang penempatan editorial..

B : itu bisa dibaca di buku...itu ada dari sejarah kami di dalam sampai kami di luar..pergeseran dari awal mula prioritas dibredel...jadi Media Indonesia, editorial dari di dalam sampai di depan...ada semua disini.

A : kalau begitu langsung ke studi kasus, bagaimana pandangan MI tentang pencalonan presiden masa pemilu presiden 2009 yang diawali dengan pecah koalisi Demokrat dan Golkar?

B : pandangan kami seperti apa yang kami tulis...tapi untuk mengingatkan kembali, sebenarnya Demokrat Golkar pecah itu gara-gara pernyataan mubarak..yang ditanggapi oleh JK dan kemudian mereka pecah.

Waktu pemilu 2004, dimulai pemilu presiden secara langsung dimenangkan oleh SBY-JK, pemegang dukungan suara di parlemen pada saat itu sebenarnya Golkar lebih besar dari Demokrat. Kalau kita bicara lebih jauh sedikit dari 2004...berarti waktu 99 itu dimenangkan oleh PDI-P, nomor urut 2 itu Golkar, presiden ketika itu Megawati...Gusdur dulu baru Megawati..dimana di dalamnya ada SBY. Pecah kongsi antara Mega dan SBY itu gara-gara pernyataan Taufik Kemas, suami Mega yaitu "ini jenderal anak-anak"...tanpa disebutkan, sebetulnya SBY sudah menyiapkan perahu secara diam-diam membentuk partai yang bernama Demokrat...waktu itu yang mengetahui itu istrinya. Setelah resmi pecah dengan PDI-P Megawati..akhirnya SBY menampilkan dirinya di 2004 sebagai orang yang tidak disukai yaitu korban..yang tampil bersama JK. Dua-duanya SBY-JK dari perahu Megawati..ketika itu Kalla sebagai Menkokesra, SBY Menkopolkam. Mereka bersatu dalam pemilu

2004..ketika itu suara Demokrat tidak banyak..urutan kelima kalau tidak salah...nanti dilihat lagi ya...yang besar suaranya itu Golkar. Ketika menjelang 2009, posisi secara politik itu, ketika pemerintahan itu berhasil keuntungan itu masuk di tabungan SBY, tapi ketika gagal masuk ke tabungannya JK. Karna dari kedua ini, yang lebih aktif JK bukan SBY sebagai presiden. Dari situlah awal pecahnya, setelah ditimbang-timbang siapa lebih untung dari koalisi ini...Golkar beranggapan koalisi ini justru menguntungkan Demokrat. Karena itulah mereka pecah. JK itu dengan Wiranto...Wiranto itu suaranya cuma...tidak sampai 3%.

A : pecah kongsi itu murni persoalan partai atau ada masalah personal?

B : ya kalau dalam kepemimpinan pemerintahan semua orang mengatakan *the real president* itu JK. Karna dia lebih berani mengambil resiko dalam mengambil keputusan...misalnya putusan konversi minyak ke gas...itu programnya Kalla...ketika gas meledak dimana-dimana ya itu tanggungjawab akibatnya Wapres...tapi ketika ada keuntungan di APBN karna konversi, itu yang menikmati Demokrat. Karna itulah sebagian orang di dalam Golkar, menginginkan Golkar sebagai partai besar harus memiliki calon presiden sendiri bukan calon wakil presiden, itu posisinya.

A : itu persoalan gengsi semata atau ada pertimbangan lain?

B : bisa dibilang gengsi bisa persoalan lain...persoalan lain ya itu siapa yang menikmati keuntungan dari koalisi itu...kalau bicara koalisi itu bicara siapa dapat apa...bisa dihitung misalnya jumlah menteri golkar ada berapa pada saat itu... tidak terlalu banyak di tempat strategis. Maka maju sendiri-sendiri di 2009.

Di 2004, Golkar itu menentukan calon presidennya lewat konvensi...mereka yang bertarung pada saat itu adalah Surya Paloh, Akbar Tanjung, Abdurizal Bakri, Prabowo...akhirnya yang menang di dalam konvensi itu...lupa saya. Sampai akhirnya di 2009 keluar masing-masing..

Yang saya maksudkan...ketika 2004, JK sesungguhnya maju sebagai wakil presiden tidak di dukung oleh partai Golkar...jadi, bukan diusulkan partai golkar...golkar punya calon lain..Wiranto kalau tidak salah...coba nanti

dicek. JK itu maju karena hasil pertemanan antara JK dan SBY, sehingga maju. Bukan diusulkan, yang mengusulkan mereka itu partainya Yusril dan partainya Edi Sudrajat...partai apa itu namanya...coba tar dicek. JK itu bukan representasi Golkar ketika dia maju sebagai wakil presiden. Tetapi, ketika setahun kemudian, ada pemilihan ketua umum Golkar di Bali, JK maju sebagai calon ketua umum...akhirnya menang. JK ketua umum...Surya Paloh jadi ketua dewan penasehatnya. Itu posisi ya...jadi, sebetulnya Golkar itu dicangkokkan dukungannya. Dia tidak dukung dari awal SBY-JK.

Masuk ke 2009, berpisah di situ JK-SBY. Karena si JK mengomandoi Golkar dengan suara besar...pemenang pemilu dibandingkan dengan SBY, jadi dia berani maju sendiri. Pemicu pecahnya itu pernyataan Mubarak...nanti anda cek ya..

Sebagai gambaran...sebetulnya awalnya mau dibangun koalisi antara Golkar dengan PDI-P, sehingga dilakukanlah pertemuan dua dewan pembina di Medan...tapi itu gagal. Gagalnya karna siapa yang harus jadi orang nomor satu, Megawatikah atau JK...sementara JK diberi mandat oleh partainya untuk jadi calon presiden bukan calon wakil presiden. Sehingga itu pecah, tidak jadi koalisi besar itu. Bahkan koalisi tersebut juga diproklamasikan setelah pemilu legislatif...gagal membendung Demokrat, akhirnya Demokrat keluar suara lebih besar dari partai lainnya.

A : bagaimana posisi tim editorial MI melihat majunya JK?

B : editorial Media Indonesia itu lebih kepada bagaimana memajukan demokrasi... semakin banyak presiden semakin bagus.. bahkan jauh sebelum itu kami sudah mengajukan calon presiden independen tapi tidak diterima.. karena bagi kami, semakin banyak calon semakin bagus. Hanya ketentuan undang-undang yang tidak mengakomodir itu. Kalau *design* undang-undang itu ada prosentase suara untuk bisa memajukan calon karena itu harus ada gabungan dengan partai politik karena tidak ada yang menang mutlak...coba nanti dicek di undang-undang pilpres...kalau

dijumlahkan, paling banyak calon presiden di Indonesia itu tidak lebih dari 3, karena ada *designnya*...berapa partai politik yang bisa mencalonkan.

A : bagaimana editorial MI melihat JK sebagai capres?

B : MI menempatkan diri secara netral...tidak percaya ya?

B : kalau mau lihat posisi MI dari editorial, perlu juga dilihat gimana sikap media dengan calon lainnya...kalau cuma dilihat dari JK itu nanti beda hasilnya...padahal kita betul-betul netral lho..

A : iya pak, tapi disini saya mau khusus terhadap JK sebagai capres yang cukup kontroversial saat itu...

B : kita masuk ke materi ya..tanggal berapa contohnya...

A : tanggal 24 April...

B : editorial ini muncul...setelah partai Golkar memberi mandat kepada JK calon tunggal presiden terlebih dulu, tidak mungkin lagi dia berkoalisi dengan PDI-P. Karena kongres masing-masing partai menetapkan calon presidennya sendiri-sendiri..

Jadi, merebut RI-1 itu kita tidak menunjuk JK tapi kita hanya mau berbicara tentang genderang perang menuju RI-1 sudah dimulai...dimulai ketika golkar sudah menetapkan JK sebagai capres..

A : saya tergelitik dengan judul..'bertarung'?

B : judul itu sebetulnya..kami dibatasi oleh *space*...orang tidak pernah berpikir tentang bagaimana kesulitan tentang membuat editorial, karena yang paling sulit menuangkan pikiran yang keluar ke dalam teks yang berbaris yang sudah ditentukan jumlah barisnya..bukan teori jumlah baris sekian..tapi lebih pada tuntutan teknis.

A : bagaimana tentang karakter dan latarbelakang JK?

B : di dalam editorial itu sebetulnya...tujuannya itu untuk orang lebih memahami saja figur ini..penonjolan watak ya...kalau JK itu lebih cepat lebih baik, SBY juga sering kami tonjolkan...SBY itu lanjutkan malah rusak semuanya...begitu ya...tidak-tidak...baik juga..

Sebetulnya banyak faktor...apa ya menangnya segitu...atau dibantu oleh persoalan administrasi..atau kemenangan itu dibantu oleh persoalan IT,

karena sampai sekarang KPK belum menyentuh sampai kesana...apa iya, fantastis sampai 60,8% menangnya..ini pertanyaan-pertanyaan..tapi secara formal legalitas sudah disahkan...ya kita tentu mendukung itu...tapi editorial media selalu mempersoalkan hal-hal seperti itu...

Banyak sekali...misalnya terungkap kasus di Jawa Timur misalnya...orang mati pun bisa memiliki kartu pemilih...dan itu pun ditemukan pada pilpres kemarin...orang yang pada pemilu sebelumnya punya kartu pemilih, pada pemilu 2009 tidak punya kartu pilih, akhirnya diuji materialkan ke MK supaya boleh menggunakan KTP, MK memutuskan boleh tapi harus memilih setelah jam 12..kan sesuatu yang...kalau habis...kartu suaranya habis..mau gimana orang memilih....begitulah banyak sekali praktek yang terjadi di dalam pemilu ya yang harus diperbaiki...editorial Media Indonesia juga berbicara hal-hal seperti itu.

Kembali ke JK, istilah bertarung menuju RI-1 itu sebagai daya tarik saja...yang hendak dibahas di situ sebetulnya apresiasi terhadap Golkar yang sudah menetapkan capres...sementara yang belum secara resmi menetapkan...

Kemudian..yang lebih diapresiasi dalam tulisan ini sebenarnya pada...kultur...JK ini anti teori orangnya..teorinya itu kan orang Jawa yang mestinya jadi presiden...karna 60% rakyat Indonesia adanya di Jawa...ini orang Sulawesi Selatan ingin bertarung...itu kita apresiasinya dari sudut itu...artinya orang tidak lagi disekap oleh suku ya...agama belum..baru pada suku..tapi suatu saat bukan tidak mungkin bukan islam pun bisa jadi presiden. Karna tidak ada aturan di dalam konstitusi seperti itu...oke boleh semuanya...tapi praktek kita berbangsa dan bernegara..yang selalu mengatakan..yang boleh jadi presiden itu adalah orang Jawa. Itu yang diapresiasi di dalam editorial itu...jadi membuka cakrawala kita bahwa Sulawesi itu juga Indonesia bukan Jawa saja. Itu sebetulnya spirit dari editorial Media Indonesia...bisa dilihat.

A : bagaimana posisi JK yang selalu diulas pada bahasan awal editorial daripada calon yang lain berdasar seluruh editorial yang jadi objek penelitian saya?

B : hmmm...itu tanggal berapa... (sembari buka *file* editorial di komputer)
begini...pada tanggal ini...konstelasi politik baru satu itu yang punya titik terang...yang terang-terangan mau maju bersama itu baru si Jusuf Kalla dan Wiranto...jadi tesisnya..mengapa JK di tanggal 4 mei lebih dulu...karna baru satu itu pasangan yang secara resmi..

A : terus yang berikutnya di tanggal 18 mei..

B : pilpres cuci gudang..yang dimaksud ketika itu ya...ini stok lama semua tidak ada yang baru...pikiran kita waktu itu...ini orang tua semua..itu yang dimaksud. Jadi, usia...Sukarno jadi presiden usia sekitar 30-40 thn...Obama jadi presiden itu di bawah 40...orang Indonesia yang bertarung..orang tua semua ini..itu sebelah kaki sudah menginjak kuburan sebetulnya...maka disebut cuci gudang...media indonesia berpikir ketika itu..orang-orang ini tidak mungkin maju lagi pada 2014...kalau ada Amien Rais dulu..juga sudah tidak mungkin lagi...jadi, yang kami persoalkan itu usia...JK tertua...yang muda itu 58 itu Prabowo.

A : ada juga yang tanggal 22 mei...pada saat di agenda ekonomi capres-cawapres, lagi JK dibahas awal..

B : emang JK nomor urut berapa.... (sembari buka-buka *file* komputer)

A : JK nomor 3, SBY nomor 2...

B : JK itu 1, SBY 2, 3 itu Mega...

A : hmmm...waktu seingat saya waktu lihat TV ada kecurangan KPU itu...SBY nomor 2, JK 3, Mega 1 pak...

B : ini yang bener ya... Mega-Prabowo nomor urut 1, SBY-Budiono 2, JK-Wiranto 3 ya..tapi ini masih tanggal sebelum pengambilan nomor urut...sehingga penulisan ini asal sebut saja...atau mungkin juga...JK dibahas awal karena JK-Wiranto maju lebih dulu daftar ke KPU..

A : tapi ini jauh sebelum kampanye, sebelum...

B : sebetulnya tidak terlalu penting dalam penyebutan...tapi yang pasti sebelum resmi berkampanye..mereka sudah berkampanye semua..coba nanti anda cek...

Yang pasti ada kaitannya dengan pemilik koran ini...adalah ketua dewan pembina..kita tidak mendukung siapa-siapa...penulisan ini lebih kepada...siapa yang menjadi capres itu siapa yang dipilih rakyat...

Jadi begini, di dalam diskusi menentukan tema..kadang-kadang memilih apa yang menarik. Ketika kami membahas agenda ekonomi ini...memang yang lebih masuk akal itu program JK-Wiranto...tetapi dalam membahas kami memberi tempat yang sama...

A : kalau dilihat dari penyebutan prosentase memang mereka semua ditulis, hanya saja JK itu programnya dijelaskan lebih rinci.

B : mungkin diberitakan juga lebih rinci...

A : apakah itu juga dipengaruhi dari konsumsi penulis pada data-data untuk menulis editorial tersebut atau dipengaruhi dari rapat redaksi itu...?

B : oh tidak..tidak. kita di dalam rapat biasanya kebijakan umum yang dipegang..tapi ini tidak menunjuk JK...kalau diukur pakai milimeter jumlahnya sama saja..

A : lalu yang di tanggal 3 juli...

B : oh ini...editorial Media Indonesia selalu menempatkan diri sebagai lokomotif demokrasi. Inti dari demokrasi itu..rohnya ada pada kesamaan..ketika ada orang...apalagi..menurut kita tidak sepatutnya...juru bicara posisi dia..berbicara anti demokrasi...itulah yang dikritik sesungguhnya. Bagaimana mungkin. Tadi di awal..sebetulnya ada benang merah..di awal tadi itu ada apresiasi karna JK orang luar Jawa..disini kami mengkritik habis-habisan Andi Mallarangeng karena dia mengatakan belum saatnya orang luar Jawa menjadi presiden...itu kan anti demokrasi dia..

Jelas ini, menghimbau rakyat menggunakan hak demokrasi, pilih capres-cawapres dengan hati nurani..setelah menimbang dengan matang siapa calon yang jujur..tulus..kita tidak sebut JK itu tulus ya...

A : seberapa pengaruh kehadiran surya paloh sebagai owner MI dan juga teman JK?

B : yang pasti Surya Paloh tidak pernah ikut di dalam dapur redaksi..tidak pernah mengintervensi sekalipun. Editorial MI itu sangat independen. Nama penulis saja tidak pernah keluar...ini anonim semua..sampai kapanpun dicari namanya kita gak akan pernah tau. Jadi, tidak ada pengaruhnya. Editorial punya cara sendiri...yang paling penting dalam sebuah editorial itu bagaimana kita dalam melihat fenomena...

A : ada unsur mendukung JK untuk jadi capres..?

B : kalau MI itu tidak pernah mendukung pada orang...pada proses. Ketika dia didukung oleh partainya, kita beranggapan bahwa itulah yang benar. Dari partainya yang mendukung bukan medianya. Kita mengambil sikap terhadap suatu peristiwa. Sikap kita menghormati kepada Golkar yang sudah lebih dulu dari yang untuk menetapkan calonnya. Kalau dilihat dari editorial MI...kita mendukung yang benar...yang salah kita sikat.. tidak pernah kita mendesign...

A : kalau menurut bapak secara pribadi...

B : saya kan golput...tidak pernah ikut pemilu..

A : kenapa pak? Bisa dibagi?

B : saya tidak percaya...sama calon-calon yang ada...yang benar-benar serius berpikir untuk rakyat itu tidak ada...saya bukan pendukung SBY, bukan pendukung Kalla bukan juga Mega..

A : lepas dari itu, bagaimana pandangan bapak melihat JK yang masih jadi wapres tapi juga jadi capres..?

B : ya memang kelemahan undang-undang di Indonesia itu ya...tidak ada undang-undang yang mengatur bagaimana orang sampai di akhir masa jabatannya. Mestinya kalau misalnya kita ingin menjaga kekompakan presiden dan wakil presiden... dibuat aturan misalnya yang jadi wakil presiden tidak boleh maju lagi jadi capres berikutnya...kalau ini diatur dengan rinci..barangkali tidak terjadi apa yang dialami JK ini... kalau dilihat seluruh editorial MI di akhir... MI memberi apresiasi terhadap JK

karena dia menelpon SBY memberikan ucapan selamat, walaupun belum diputuskan secara resmi oleh KPU, tapi di *quick account* menunjukkan SBY menang... pada poin itu, MI memberikan apresiasi. Karna begini...secara politik itu, antara presiden dengan pendahulunya dalam sejarah presiden.. tidak pernah akur. Ketika Suharto mengambil alih kekuasaan Sukarno, hubungan Suharto dan Sukarno menjadi retak, tidak ada hubungan sama sekali... dan itu dilestarikan ketika Habibie menjadi presiden... tidak ada akses ke Suharto, bahkan sampai Suharto meninggal. Tidak ada komunikasi. Begitu juga dari Megawati ke SBY..tidak ada hubungan harmonis di antara keduanya... Megawati tidak pernah memberi selamat pada penggantinya.. satu-satunya yang memberi selamat itu adalah JK. Pada titik itu, coba dicek.. MI memberi apresiasi... pada edisi editorial. Itu terjadi dalam rangka membangun sebuah kultur..kultur demokrasi... jadi bagaimana demokrasi dibangun dalam sebuah keseharian. Jadi, yang paling susah di Indonesia itu menerima perbedaan... bayangkan kalau di tingkat elit saja tidak bisa menerima perbedaan.. kalau di Amerika orang kalah itu ada ucapan resmi.. menerima kekalahan memberikan ucapan selamat pada yang menang...di Indonesia itu belum pernah.. dan yang melakukan terobosan itu adalah JK.

A : bisa dikatakan kalau JK sebagai pelopornya?

B : kalau istilahnya Syafi Maarif... JK itu *the real president*.. ibarat mobil menurut dia dari 2004-2009 yang menekan gas itu JK yang tekan rem itu SBY.. pembangun itu ada.. karna ada gas kan.. antara 2009-2014 dua-duanya menekan rem.. karena itu sepertinya sekarang tanpa ada pemimpin... itu istilah Syafi Maarif bukan istilah saya..

A : kalau menurut bapak penggambaran tentang JK?

B : kalau saya ya ikut saja istilahnya...

A : bagaimana alur pra-pasca pembuatan editorial?

B : ya pokoknya... dirapatkan, ditentukan siapa yang menulis, lalu orang itu menulis... lalu yang terakhir diedit pada editor..

A : bisa lebih detail lagi pak, kalau bapak...

B : kalau saya yang ditugaskan menulis... kita harus memahami tentang tema itu, kemudian kita *searching* data dulu.. biasanya kita menggunakan data primer itu dari pemberitaan Media Indonesia, sekundernya lewat *google*... tidak sama tiap orang, bisa berbeda-beda.. lalu kita lihat dari data yang ada baru kita cerna akan diapakan data ini... ini kan yang paling utama itu pemahaman kita pada persoalan yang hendak ditulis.. selebihnya itu lebih pada permainan kata... dari logika.. bagaimana logika itu dibangun.. dari awal sampai akhir..

Jadi ini, karakter dari editorial Media Indonesi itu ada tiga... terus terang.. yang tegas dan lugas itu tujuannya untuk tidak terjadi multitafsir terhadap sebuah pesan makna, jadi *clear*..

Perjalanan editorial sebagai evolusi kata dan gaya... dimulai dengan Selamat Pagi Indonesia di harian Prioritas..Prioritas dibredel, kemudian mengambil alih menejemen Media Indonesia.. sejarahnya bisa dibaca di buku ya...

Kalau di dalam Selamat Pagi Indonesia itu lebih kepada...itu di bawah rezim Orba, jadi tidak banyak terus terang di sana.. tapi lebih banyak *dieufimismekan*... jadi, makna itu benar-benar dihaluskan... di dalam kemunculan pertama di Selamat Pagi itu... jadi cerita tentang orang.. padahal maksudnya mau bicara tentang pemerintahan Indonesia.. itu yang disebut evolusi gaya.. sampai gaya yang sekarang ini.. lugas..

Misalnya dulu dalam editorial Media Indonesia ini ada penghormatan terhadap Suharto... tidak pernah kita menyebut Suharto.. selalu HM Suharto atau Pak Harto. Itu..ada kekhususan untuk Suharto... jadi memang sudah terbelenggu dari penjajahan *eufimisme* kata ya.. yang dimaksud *eufimisme* itu.. misalnya kenaikan harga.. editorial pasti menyebutkan harga naik.. *eufimismenya* kan penyesuaian harga.. editorial ini tidak akan pernah menyebut penyesuaian harga..dia akan sebut terus terang harga naik..

Jadi, kita menggunakan bahasa secara efektif, karena jumlah baris yang terbatas.. mengutamakan makna denotatif... makna tunggal..menghindari

multitafsir... eksplisit..tidak tersamar..bahkan tidak jarang di Media Indonesia menyebut kata 'goblog' (bodoh) ya disebut saja... dan yang paling penting tidak menyerang pribadi. Alinea dibuat ringkas.... hindari kalimat panjang... paling banyak 3-4 kalimat.

Yang paling penting, editorial itu dianggap sebagai kekuatan pikiran dan sangat ketat di dalam disiplin berpikirnya...jadi runut begitu penuturannya.. karena itu sebagai sebuah proses dialektika berpikir editorial itu.

Titik berdirinya...selalu berpijak sudut pandang media ya.. baru sikapnya pro atau kontra atau tidak bersikap. Ketika kita melihat suatu persoalan dan sudah menentukan sudut pandangnya...ya itu yang dibangun. Jadi cara melihat itu banyak, tiap orang lihat fakta berbeda-beda.. ketika misalnya melihat dari perspektifnya kura-kura... itu yang dibangun datanya. Dari awal sampai akhir.. Makanya, ketika anda membaca editorial.. susah sekali...atau kebanyakan orang membaca..kok sudah selesai.. karena itu di seluruh pikiran itu dibangun tulisan itu sampai pada orang.. sudah selesai.

Penentuan *angle* pada saat rapat, kita sebagai penulis memprosesnya atau menginternalisasi, mencernanya tema tadi, kemudian riset data... berdasar data itulah kita beragumen pikir..

Tidak semua orang punya kemampuan menulis editorial.... banyak yang terpanggil tapi yang dipilih sedikit, kira-kira begitu... sampai pada terbentuk tim penulis editorial.. rata-rata kemampuan menulis itu sama.. sehingga siapapun yang disuruh menulis..maka hasilnya akan sama..

A : setelah selesai menulis pernah ada kasus saat editorial ada kesalahan, lalu diulang...?

B : oh..itu sering...bahkan dirombak...dikroscek lagi. Diedit lagi setelah menulis... di sana dilihat lagi bagaimana logika yang dibangun..kita juga cek.. benar tidak data-data yang digunakan.. tugas si editor inilah yang melakukannya.

A : si editor ini masuk dalam tim editorial?

B : iya..masuk dalam satu tim editorial.

A : ada kemungkinan orang lain menulis, bapak yang mengedit?

B : jadi begini, pada prinsipnya...tidak ada yang menulis langsung mengirim... langsung menerbitkan. Ini tim redaksi disini ya... percetakan di bawah... di balik sini ada tim artistik dan disana ada tim bahasa. Jadi, dari penulis kepada editor, dari editor kirim ke bahasa... baru ke percetakan..

Oh ya, ini yang perlu diketahui... koran ini sangat ketat aturan mainnya... mereka yang terjun ke politik praktis, mereka tidak berkenankan lagi untuk memegang halaman atau di tim editorial.. jadi, orang yang masuk politik praktis, selalu dikeluarkan dulu dari tim. Katakanlah ada calon, tiba-tiba seseorang dicalonkan dalam legislatif misalnya, kita harus memarkirkan dia dulu.. dia tidak boleh terlibat di dalam penulisan...tidak boleh ikut rapat-rapat editorial.. sampai tidak boleh membedah di Metro TV. Itu untuk menjaga independensi, jadi di sanalah kami menjaga netralisasi. Sehingga sekecil apapun ide-ide dari orang-orang yang terjun ke politik praktis masuk ke dalam. Si pemiliknya saja tidak boleh, apalagi mereka yang terjun kepada politik praktis...

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

SUMBER 2

TEGUH NIRWAHYUDI

Sekretaris Redaksi

Waktu : Selasa, 13 September 2011 / pukul 15:23-16:35 wib

Tempat : Ruang Sekretariat SKH Media Indonesia

Ket: A = peneliti

B = narasumber 2

A : bagaimana sistem kerja di Media Indonesia?

B : khusus di keredaksian saja ya..kalau di keredaksian untuk peliputan berita, kita punya dalam sehari itu rapat 3 kali, rapat jam 9 pagi itu namanya rapat proyeksi...itu semua kompartemen hadir di situ, rapatnya dipimpin oleh kepala divisi pemberitaan..setiap kompartemen menawarkan berita apa saja yang akan mereka liput pada hari itu untuk terbit besok dan setiap compartemen menjual beritanya untuk halaman 1/ halaman luar.. tapi tidak ditentukan dulu sama pemimpin rapat bahwa berita ini ke halaman satu atau ke halaman dalam, jadi diklasifikasikan seperti biasa...jadi kalau kurang dalam harus diperdalam harus dikejar lagi.

Rapat kedua itu jam 12 siang, itu namanya rapat *budgeting*. Jadi apa yang diproyeksikan tadi jam 9, dikejar sekali lagi.. sudah sampai dimana perkembangan beritanya.. kira-kira kalau pas *angle*-nya atau belum, itu nanti akan dilakukan perubahan pada rapat ini.. itupun masih belum ditentukan *headline* halaman luar itu apa. Di rapat ini juga dilakukan evaluasi produk yang kemarin, baik secara artistik.. secara konten, itu nanti diperdebatkan di situ produk yang kemarin terbit. Itu di ikuti oleh semua redaktur kompartemen, dipimpin oleh kepala divisi pemberitaan kadang-kadang direktur pemberitaan juga hadir.

Lalu ada lagi rapat yang terakhir itu rapat jam setengah 3, yang sedang berlangsung sekarang.. itu namanya rapat *checking* itu rapat terakhir..*nah*

di situ baru diputuskan mana yang paling layak jadi *headline news* di halaman depan.. nanti ditentukan juga yang menjadi editornya siapa...penulis beritanya siapa...reporternya siapa.

Dan untuk rapat-rapat yang lainnya, biasanya kompartemen itu punya rapat masing-masing mingguan karena reporter itu tidak harus kembali setiap kali ke kantor, karena habis waktu di jalan ya..sehingga cukup dari lapangan mengirimkan beritanya. Setiap kompartemen itu melakukan rapat satu minggu sekali paling tidak untuk melakukan evaluasi terhadap liputan yang dilakukan kemarin dan mencoba membuat proyeksi untuk membuat liputan ke depan..biasanya seperti itu, dan biasanya rapat itu dilakukan malam hari..jam 11an, itu terserah mereka..

A : kompartemen itu..?

B : *desk*.. artinya apa ya...departemen begitu...tapi di sini pakai istilah kompartemen..kalau di koran lain pakai istilah *desk*...ada *desk* politik, *desk* ekonomi.. tapi Media Indonesia pakai kompartemen.

A : yang menentukan kebijakan/ penentuan tentang tugas dari? Yang memimpin rapat?

B : itu ya pemimpin rapat..asisten kepala pemberitaan biasanya..ya tentunya atas hasil diskusi ya..nanti si anu pegang ini ya..o jangan si anu aja, eh si anu lagi *load*nya lagi banyak. Yang pimpin rapat biasanya bergantian berdasarkan jadwal..yang pasti ya asisten divisi pemberitaan..

A : tentang rubrikasi...

B : setiap kompartemen biasanya ditentukan punya berapa halaman...rubrikasi ini tertuang berdasarkan masing-masing kompartemen..ini halaman 1 di luar kompartemen.. ini kan kompartemen politik polkam mereka dikasih 2 halaman ya sudah..mereka terserah mau mengisinya apa..yang jelas nanti *design*nya mereka tentukan bersama tim artistik..mau ada iklan *gak* ada iklan terserah...yang jelas setiap halaman ada *headline* satu, pokoknya diatur sama tim artistik dengan diskusi di redaktur kompartemennya.

A : ada berapa kompartemen?

B : ada...polkam, nusantara, ekonomi, olahraga, internasional, humaniora, minggu, lalu...suplemen, ada delapan. Eh megapolitan.. ada sembilan.

Setiap kompartemen jumlah halamannya juga berbeda-beda...kalau politik bisa 3 halaman setiap hari..kalau megapolitan itu 2 halaman 3 halaman paling banyak...nusantara itu 2 halaman..eh 3 halaman, internasional 2 halaman.. humaniora gak setiap hari terbit, satu minggu satu kali... ekonomi itu 4 halaman.. olahraga 3 halaman.. selebihnya ada iklan ada opini.. dia berdiri sendiri...istilahnya dia *gak* punya anak buah..karena dia hanya menerima tulisan dari luar aja. Status halaman terakhir itu masuk halaman luar, gak masuk kompartemen.

A : suplemen itu biasanya tentang?

B : dibuat suplemen itu untuk menggarap berita-berita yang sifatnya advertorial..itu temen-temen suplemen yang mengerjakan...atau edisi khusus...misalnya kita kemarin ada edisi khusus ramadhan...edisi khusus mudik..edisi khusus hari air...itu temen-temen suplemen..

A : tanda tanya di bagan ini maksudnya apa?

B : o maksudnya ada perkembangan atau tidak, kalau tidak ada perkembangan ya sudah hasil rapat dianggap final...jadi kalau di rapat *checking gak* ada apa-apa...berarti ya turun cetak..

A : penentuan tiap isu di tiap halaman itu kebijakan siapa?

B : di tingkat redaktur yang menentukan... misalnya begini ya..ini *kan* halaman ekonomi..nanti di rapat jam setengah 3 itu, mereka yang melaporkan..o saya mau pasang HL di halaman berapa...sebutkan saja Hlnya yang lain-lain gak usah..tentunya setelah mereka melakukan rapat di kompartemennya, tapi nanti itu gak final biasanya yang dilaporkan itu nanti bisa berubah lagi...kalau malam mereka merasa ada yang lebih menarik, langsung mereka ganti..ya sifatnya fleksibel aja gak usah terlalu mati.. kadang-kadang bisa berubah berkali-kali..dan itu tanggungjawab redaktur kompartemen..

A : kalau halaman 1 dan terakhir..?

B : ya itu dipikirin bersama-sama dengan seluruh kompartemen..ikut memikirkan, karena ini halaman muka gitu ya..

A : penempatan editorial yang berubah di kiri?

B : itu masalah ini aja ya..*design* di pasar...*kan* ini lebih sering ditumpuk...jadi kalau dengan begini kan bisa kelihatan...ini kenapa pindah ke kiri.. karena *ngikutin design* logo MI..jadi faktor *design* aja...jadi kalau orang lihat pertama ya disini...*gak* akan buang ke kanan...

A : kenapa editorial MI ada di halaman pertama? Satu-satunya...

B : karna gini, *basic* pemikirannya ya...yang namanya editorial itu kan opininya redaksi Media Indonesia..nah opininya redaksi itu kan masuk ranah privat ya..tapi kami juga ingin bagi..bagi *share* meski ranahnya redaksi...jadi sesuatu yang bisa di ketahui...makanya kita taruh di depan dan kita kerjasamakan dengan Metro...yang itu tadi tetap sebagai sesuatu hal yang punya redaksi, kebijakan redaksi, opini redaksi..orang *gak* bisa ganggu gugat...tapi kami ingin *share* juga dengan pembaca..dan memang kenapa letaknya di depan..dari awal pak Surya pengen tahu ini *lho* pemikiran kami..ya sudah taruh di depan jangan kau sembunyikan di dalam... ini pemikiran kami..ini opini kami..taruhlah di depan.. orang suka atau *gak* suka..terserah.

A : apa yang jadi kekuatan SKH MI / berbeda dari yang SKH lain?

B : kalau dari sisi tampilan gitu ya..kita kan langsung...terus tuntas gitu ya..kita itu berita selalu sampai disini *gak* ada lanjutannya...itu yang pertama..dan sekarang sudah mulai di ikuti oleh koran-koran lain, kita berita selesai satu *space*...kalau *toh* ini ada sambungannya ke dalam..tapi istilahnya bukan bersambung..tapi kita cuplik lagi dengan judul lain di dalam..kita tulis disininya..berita terkait halaman berapa.. sebagai penunjuk arah saja gitu..

Dan kita dari awal berdiri itu sebagai koran politik, jadi panduan bagi orang-orang yang cinta politik, politikus-politikus di senayan.. edukatif *gitu* ya...tapi kita juga tidak meninggalkan pembaca awam..makanya kita berusaha memperbanyak halaman-halaman seperti ada halaman

ekonomi...internasional..olahraga kita juga ada.. tapi kita sebagai koran politik..ya jadi *trand setter* saja di kalangan politik... kalau misalnya kita mengangkat isu...biasanya cenderung isu-isu dengan bahasa politik.. tapi kita juga kasih di halaman 1, ibaratnya jeda *gitu* ya...ini hasil-hasil penelitian kecil..tentang kesehatan..psikologi..yang banyak orang suka, selebihnya kami juga bermain di grafis...kita memanfaatkan ruangan dengan *design* grafis.

Penentuan grafis pada saat rapat jam setengah 3, biasanya redaktur yang mau...misal ada sisa satu kolom.. daripada di kasih foto monyet...mending kasih grafis..ini misal tentang kecelakaan. Tim grafis ini yang buat tim artistik tapi dia *disupport* oleh litbang...litbang yang cari data-data...

A : pernahkah editorial MI diprotes?

B : kalau di editorialkan, diprotes iya..tapi kita kan tidak punya hak jawab...itu kan ruang buat kami.. silahkan saja protes..nanti disini..biasanya kita bahas lagi...ini kan ada...ini editorial kapan gitu ya..kita tampilkan lagi..kita sebut rubriknya bersama opini dikelola bersama temen-temen dari opini..namanya bedah editorial..ini orang berkomentar..setuju atau tidak setuju.. silahkan saja... ini sudah berlaku 2-3 tahun lah...2010.

A : pergantian organisasi redaksi MI berapa periode waktu?

B : itu *gak* ada patokannya ya istilahnya...tergantung kebijakan pimpinan dan kebutuhan pada organisasi gitu ya..yang jelas kalau misalnya di setiap kompartemen...setiap wartawan itu yang baru terutama..itu setiap 3 bulan itu di putar...sampai nanti ditentukan di mana dia yang paling berprestasi.. Kebutuhan itu berdasar misalnya...ada yang pensiun..ada posisi yang harus diisi..karna orang di posisi itu pensiun atau keluar...itu biasanya ada perubahan. Promosi dari bawah atau rekrut dari luar untuk mengisi yang kosong itu..

A : kan Surya Paloh *owner* di media, seberapa besar pegaruhnya?

B : awal-walnya dia memang berpengaruh...karena awalnya dia yang sebagai direktur utama...tapi sekarang direktornya udah ganti...Surya Paloh

mempercayakan pada profesional-profesional kerja...dia *gak* banyak ikut campur sekarang...

A : sejak kapan itu?

B : sejak tahun 90...97 kalau gak salah..

A : dalam prosesnya, pernahkah pemberitaan atau editorial terjadi kesalahan hingga harus diulang lagi?

B : hampir tidak pernah ya..karena setiap hari kita ada rapat... termasuk rapat editorial... sehingga semua sudah ditentukan... editorial hari Senin itu apa, materinya apa, Selasa apa, Rabu apa...sudah ditentukan di rapat. Setiap hari Senin itu rapat...sudah menentukan editorial atau topik selama satu minggu, tapi tiap hari dievaluasi...

A : bapak pernah terlibat di editorial?

B : kalau sekarang tidak...dulu terlibat di editorial waktu ada Media Indonesia siang... itu tahun 2008 sampai tahun 2009... itu ada editorial juga tapi beda namanya...beda letaknya masih yang di sebelah kanan.. beda konsepnya...

A : kenapa ada MI siang?

B : waktu itu kita hanya melakukan perubahan...kalau menurut saya pribadi waktu itu kita mau mempersiapkan beberapa calon asisten redaktur dan redaktur.. untuk akhirnya itu bisa diserap di edisi yang pagi ini..caranya gimana... itu ada beberapa reporter yang penilaiannya dari situ.. karena menurut pak Saur mereka sangat potensial..dan itu benar *gitu*.. mereka bisa bikin halaman megapolitan itu lebih *human gitu*...bikin halaman internasional itu kesannya lebih mendunia... ada masalah-masalah yang sifatnya konflik tapi masalah-masalah kelaparan...atau apa..sehingga bisa diserap sekarang...seperti ini.. (menunjuk halaman MI serapan MI siang)...pola-pola ini diserap dari media indonesia siang...terus foto-foto berani foto besar...berani pasang grafis, itu dari Media Indonesia Siang...

A : bapak dulu pernah di editorial MI siang...itu penulisannya gimana?

B : biasanya kita diskusi aja malam-malam..kita masalahnya tidak terlalu fokus ke peristiwa seh..kadang-kadang peristiwa dari belahan dunia lain

bisa kita tulis...terus kadang-kadang peristiwa-peristiwa di daerah yang menyangkut kehidupan politik kehidupan petani, itu bisa kita angkat ke editorial... tidak terpaku pada peristiwa-peristiwa yang bersifat politik... dan kita gak terlalu berat-beratlal...istilah yang ringan saja bisa kita jadikan editorial..

A : posisi MI pada saat pilpres 2009?

B : pada saat itu, banyak...setelah reformasi, 2009 itu kan pemilihan presiden yang memunculkan banyak calon-calonnya...koran tentunya harus tetap berusaha menampilkan semua kandidat adil, misalnya memberikan *space* dari setiap mereka kampanye, dan MI juga melakukan dengan format seperti itu...dan editorial tidak setiap hari menyangkut soal pemilu..kita bisa berganti-ganti, cuma yang lebih kita soroti adalah yang sifatnya lebih ke..apa ya..misalnya kalau ada calon yang menjual kemiskinan..itu yang kita kritisi...ada yang menjual sukses perekonomian itu juga kita kritisi...itu untuk memberikan pelajaran bagi konstituen atau masyarakat pemilih baru...supaya jangan ketipu sama yang manis-manis..

Pemilihan presiden dengan banyak calon..yang tidak berdarah-darah...bagus..halus gitu..dari segi konflik horisontalnya...meskipun menyisakan residu sedikit banget...yang *gak* begitu berarti...pembelajarannya demokrasinya kita berhasil..saya pikir pers pada saat itu berperan besar.. untuk mendewasakan masyarakat juga...tidak menggiring kepada anarkisme.. terus terang saja saya secara pribadi, emang *gak* milih...buat apa..ya sebagai wartawan siapa presidennya mah oke-oke saja..*gak* jadi masalah gitu..

A : bagaimana pandangan bapak tentang 3 calon capres-cawapres dan konflik sby dengan Jk?

B : ya itu wajar saja... permasalahannya.. duet SBY-JK pada saat itu memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi.. dalam perjalanan kepemimpinan mereka aja..di tahun kedua saja sudah kelihatan ya.. perpecahan antara JK dan SBY.. dan di situ yang menarik keuntungan dari percekcoakan itu... ya kebetulan SBY gitu...artinya positioning dia..nah inilah kepintaran SBY,

dia bisa memposisikan sebagai orang yang...apa ya..pencitraan itu... kalau dulu dia dihina sama Taufik Kemas dia.. bisa *banget* dia memposisikan diri jadi orang yang *terzolimi*.. dan kalau menurut aku JK itu salah milih pasangan kali ya... coba waktu itu dia berpasangan dengan Sri Mulyani.. mungkin akan lain... atau mungkin dia berani memilih partai-partai menengah...bukan Islam tapi..yang *solid*..ya taruhlah dia berani berpasangan dengan mantan presiden PKS.. mungkin akan lain ceritanya... sosok seperti dia diperlukan...orangnya *kan gak* birokratis ya.. sebagai seorang presiden kalau menurut saya JK itu cukup mengambil keputusan yang sifatnya terobosan.. bahwa nanti adminnya ada di siapa, dia mesti didampingi oleh orang administratur yang rapi yang cepat... lha, pasangannya dia kan terkenal dengan *track record* yang *gak* baik di masa lalunya... ya akhirnya..ya sudahlah... larinya pada milih SBY-Boediono... karena program yang dia jual juga bagus..peningkatan ekonomi..apa..apa..

A : bagaimana melihat JK sebagai capres di luar Jawa? Yang begitu meledak ketimbang waktu Hamzah Haz dan Habibi..

B : karena jumlah mungkin penduduk Jawa paling banyak...secara geografis ibukota pemerintahan juga di Jawa.. tingkat perekonomian yang paling tinggi juga ada di Jawa.. ya mungkin untuk ke depan.. pemikiran ini yang mesti diubah.. artinya sekarang kita sudah..nah ini ditarik lagi ke belakang.. makanya saya *gak* setuju dengan istilah gubernur-gubernur darimana itu harus putra daerah.. itu kalau orang Indonesia di manapun dia jadi bupati..sah-sah saja, kalau masyarakat yang memilihnya... gak usah pakai putra daerah.. pokonya dia orang Indonesia kok... kadang-kadang isu-isu yang seperti ini menjadi bahan jualan ya.. kalau misalnya orang-orang di Indonesia masih berpikiran seperti itu.. ya kalau untuk presiden, hemat saya ya *gak usah* pakai isu itu lagi. Kenapa waktu itu dipakai isu itu, ya sudah mungkin isu itu salah satu faktor yang bisa mengontrol suaranya SBY-Boediono..mungkin..

A : hiruk pikuk di Media Indonesia pada saat itu?

B : kita *gak* fokus banget dengan masalah itu ya.. menurut kita lebih pada.. siapa yang jualannya paling *possible*..paling benar..paling menarik.. waktu itu jualan SBY-Boediono kan lebih ke faktor-faktor ekonomi.. penegakan hukum.. meskipun agak terseyok-seyok hukum kita.. kalau ekonomi, iyalah kita mengalami peningkatan produk domestik...tapi orang miskin juga tetap banyak.. susah berobat juga masih banyak.. mestinya ini juga jadi bahan catatan buat masyarakat..

Lepas dari kedekatan dengan *owner*.. tetep dikritisi.. apa seh yang mau dilakukan oleh seorang JK.. seorang JK untuk mengambil keputusan membangun infrastruktur dia cepat sekali..tapi kan harus diikuti oleh orang yang melaksanakan... buat orang-orang di Indonesia, orang seperti JK itu okelah.. terobosannya cukup besar..mengatasi permasalahan cepat.. tapi kalau *gak* didukung dengan birokrat yang *solid*, birokrat yang satu kata ya itu akan percuma juga dia... dia nanti seperti berteriak sendiri.. yang kita kritisi.. apa bener orang Indonesia waktu itu membutuhkan JK? Membutuhkan seh... tapi pada waktu itu..pas mau nyoblos.. orang jadi sangsi sendiri akhirnya..

A : seberapa pengaruh Surya Paloh terhadap pemberitaan tentang JK?

B : karena pada saat itu JK masih ketua umum Golkar dan pak Surya itu ketua dewan pembina Golkar.. tapi kita di koran berusaha untuk adil..ya sama saja sebenarnya.. ya istilah kalau emang harus kita liput ya kita liput... paling keistimewaannya.. kalau JK mau kampanye kemana..petugas liputannya ditelpon langsung.. tapi kalau misalnya Gerindra atau ibu Megawati, *gak* harus ditelpon langsung.. ya kita datang liputan.. tapi porsinya tetap sama..

A : frame yang mau dibentuk ke publik tentang JK pada saat itu oleh MI?

B : ya JK itu seorang ya pro demokrasi, seorang yang pragmatis... berpikiran cepat tindakannya juga.. *problem solver* yang tepat.. dibanding Mega dan SBY.

A : meski bapak tidak memilih... bapak mendukung tidak adanya sosok JK sebagai capres?

B : secara pribadi *seh* saya iya. Indonesia itu perlu seseorang seperti JK.. cepat dalam bertindak, cuma mesti didampingi. Klasifikasi manusia kan beda-beda.. ada penemu.. penemu itu tidak bisa rapi *gitu lho*.. dia berantakan.. tapi setiap hari dia *nemu* ini..*nemu* itu.. dia mesti didampingi oleh orang yang bisa membumikan temuannya.. figur-figur seperti dia itu dibutuhkan..tapi ya harus didampingi administrasi yang baik..

A : bapak tau penyebab bercerainya JK-SBY?

B : kultur saja sudah beda.. kalau SBY itu kan orangnya.. serba prosedural.. dia untuk menentukan kebijakan ini, diagendakan dulu, dirapatkan dulu berulang-ulang...lama bener.. sementara pak JK *kan gak gitu*.. kalau bisa ditentukan sekarang..ya sekarang. Misalnya harga minyak naik harus turun...dia tinggal telpon aja ke menteri, sudah turunkan atau naikkan...selesai kok masalah.. itu kan JK, dia lebih pada *problem solver*..

A : bagaimana memandang JK sebagai capres yang masih jadi wapres?

B : sama seperti SBY ketika mencalonkan jadi presiden dulu, dia beberapa kali *gak* datang di sidang kabinet... waktu dia jadi Menpolkam di kabinet bu Mega... dia alasannya waktu itu pas..karena tidak diundang sidang kabinet... masa sidang kabinet pakai undangan... *kan* langsung ditelpon ajudan-ajudan juga bisa. Kalau JK kenapa...saya kurang tau persis kenapa.. mungkin karena ada acara yang berkaitan dengan tugasnya sendiri.. atau karena buat apa lagi dia hadir..*toh* sudah mencalonkan dengan pasangan yang lain. Namun secara etiket.. sebenarnya dia kan masih duet pada saat itu... Permasalahannya hanya soal manajemen waktu saja. Mungkin juga karena gak ada undang-undang yang mengatur mereka ya...tapi seharusnya diselesaikanlah tugas sebelum mencalonkan diri...

Ya..wajar SBY-JK pisah..memang secara karakter tidak cocok.. silahkan bertarung lagi saja..yang disayangkan adalah 5 tahun masa pemerintahan masa kerja yang efektif cuma 3 tahun..yang 2 tahun diisi sama gonjangan-ganjing isu perpecahan mereka.. mereka *malah gak* mikir negara..pemerintahan mereka yang harus mereka selesaikan... masing-masing *gak* bisa diredakan..

A : bagaimana MI menyampaikan *frame* seputar JK kepada wartawannya?

B : biasanya kita ada rapat-rapat di setiap kompartemen misalnya.. agendanya politik itu yang paling berat.. itu setiap tokoh ditempel oleh satu wartawan.. diikuti saja kemana dia pergi.. dari situ, mereka kan bisa memilah-milah program dari setiap calon waktu kampanye...ya tentunya semuanya pro rakyat..tapi setidaknya kita bisa melihat dari setiap kandidat yang mana yang paling mendekati kebenaran untuk memungkinkan dilaksanakan program-programnya.. lebih ke situ *guide* untuk reporternya.. kita mengajarkannya tidak dengan cara mendoktrinisasi, mereka disuruh *nempel* setia kandidat itu mereka sudah bisa menemukan banyak hal.. biasanya 2 orang dan gak pernah diganti-ganti... itu reporternya.. Mereka menyampaikan ke redaktur *by mobile*...nanti pas redaksi rapat baru dilihat dan ketahuan nilai-nilainya dan disimpulkan..lalu ditentukan siapa yang mengedit hasil dari tulisan wartawan di lapangan..

A : oh ya..judul HL itu ditentukan penulis atau...

B : judul juga ditentukan pas rapat... bersama-sama..nanti diketik pas rapat..nanti diketik sama pemimpin rapat.. cocok *gak* judulnya.. atau ganti-ganti.. terlalu panjang lebar... cukup satu baris aja..atau dua baris... itu khusus HL saja.

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

SUMBER 3

LAURENS TATO

Redaktur Senior

Waktu : Kamis, 15 September 2011 / pukul 10:47-12:26 wib

Tempat : Ruang Redaktur Senior-Laurens Tato

Ket: A = peneliti

B = narasumber 3

A : segala sesuatu tentang editorial SKH MI lebih dahulu yang ingin diketahui..

B : editorial kami yang ada adalah sebuah proses yang panjang...jika dilihat dari sejarah, sejarah secara singkat yakni pertama...pilihan terhadap editorial yang diletakkan di halaman depan merupakan proses yang panjang juga.. panjang karena ketika dimulai, tidak ada surat kabar Indonesia yang menempatkan editorial di halaman depan, biasanya di halaman dalam. Kenapa berani-beraninya kami di halaman depan? Ketika itu regulasi media itu sangat ketat ya...tahun sekitar 80-90an...regulasi itu sangat ketat terutama oleh penguasa negara ya..kalau kita salah-salah bisa-bisa dibredel. Maka ketika menempatkan editorial di halaman depan yang sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak ada melanggar apa-apa itu menjadi pertimbangan luar biasa...ketakutan yang luar biasa. Tetapi akhirnya kita berani karena apa? Setelah dicek pada seluruh peraturan yang ada...tidak ada larangan bahwa editorial itu tidak boleh ditaruh di halaman sembarangan dan juga tidak ada aturan yang paten bahwa editorial itu harus diletakkan di halaman dalam. Dan ketika kita mulai itu, tidak ada teguran...tidak ada komplain..ya artinya aman. Itu asumsi tentang penempatan halaman editorial di depan.

Kedua gaya. Embrio editorial ini berasal dari harian Prioritas, kalau anda amati. Prioritas memulai di halaman depan itu dengan Selamat Pagi

Indonesia. Selamat Pagi Indonesia ketika bisa dikatakan genre baru...editorial yang agak bergenit-genit, mengkritik dengan agak tajam, sarkasme yang cukup tinggi di tengah situasi yang saya katakan tadi...di tengah rezim dimana kritik itu bisa dikatakan haram. Maka, editorial ketika itu lebih cenderung mirip sebuah prosa...sebuah puisi...sebuah karya sastra. Apa itu? Cenderung kritik terhadap diri sendiri. Jadi, seorang tokoh mengkritik tokoh tapi tidak menyangkut siapa-siapa...katakan tokohnya si Nazarudin berbicara tentang dirinya, menertawakan dirinya sendiri. Itu cara yang dipilih ketika itu untuk menyiasati kritik yang sulit terhadap kekuasaan pada waktu itu. Ya..semacam novel lah, ini kan tidak biasa..tidak lazim,kok model editorial seperti itu..tapi kita anggap itu sebagai pilihan yang bijak untuk tidak terjebak pada kemarahan penguasa. Itu sampai dengan tahun 97/98..lalu format editorial seperti sekarang ini lebih substansial. Dulu kan kita berkias..berandai-andai, kalau saya jadi presiden..kalau si ini turun dari tahta..macam-macam, jadi,berkhayal-khayal. Sekarang tidak. Ketika tahun 97/98...ketika ada pergantian rezim ya..pak Harto diambang kejatuhan..ada suasana kebebasan pers yang mulai terbuka. Pers merasa diberi kebebasan...ini saatnya kami bebas. Maka, editorial mulai saat itu lebih substantif...ya sampai sekarang ini. Kita bisa menyoroti masalah secara lebih fokus..lebih terarah..tidak melebar kemana-kemana, tetapi masih saja dengan gaya bahasa yang tidak gampang..baku. dan itu format yang dipertahankan sampai sekarang. Itu perjalanan soal *placement* dan gaya editorial kami.

Kemudian proses sehari-hari. Editorial dihadirkan melalui proses...proses editorial diawali dengan rapat jam2 siang setiap hari. Siapakah peserta rapat itu? Peserta rapat itu ya para editor yang dipercaya atau mendapat lisensi atau kepercayaan atau memiliki kapasitas untuk bisa menulis, memiliki kapasitas untuk bisa menulis..dan itu tidak banyak. Sekarang...saya, Saur, Gaudens, Kleden, Ade Siregar, Haryo, Hapsoro...ya ada tujuh orang. Ini jumlah bertambah yang cukup besar dari sebelumnya cuma saya..Saur..ya hanya berdua. Sebelum menetapkan tujuh orang..

A : itu tujuh orang sejak kapan?

B : ya..sebelum menentukan tujuh orang ini, kita melakukan pelatihan-pelatihan penulisan editorial di berbagai tempat..di Bandung, di Merak..di sini..sampai dua tahun. Hampir dua tahun dengan beberapa angkatan. Seluruh redaktur asisten di kita..wajib mengikuti pelatihan ini. Dalam dua tahun itulah tersaring oleh saya...Saur dan oh tadinya saya, Saur, Djaja...Djaja sekarang di lampung post. Selama dua tahun pelatihan ada penambahan empat jadi sekarang bertujuh. Jadi, cukup lama..

A : dua tahun itu dari tahun?

B : sekarang 2011..berarti itu dari....2009..ya..2008 itu sudah mulai pelatihan-pelatihan. Makanya, ketika dalam proposal skripsi *you* membutuhkan siapa penulis tiap edisi editorial itu...kita sepakati tidak perlu. Kenapa? Karena sesungguhnya siapa saja yang menulis itu diketahui oleh tim dan menjadi tanggungjawab tim. Menulis itu tidak mewakili pikiran pribadi, tapi mewakili pikiran institusi. Mewakili pikiran institusi itu berarti mewakili pikiran sidang tim editorial. Karena itu, siapapun bisa ditentukan untuk menulis dan dia harus mempertanggungjawabkan pikiran kita. Jadi, siapa saja ketika dipertanyakan seperti tema-tema yang anda ajukan, masing-masing dari kita harus siap untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan...tanpa harus mengetahui siapa penulisnya. Tim editorial bisa menjawab itu semua.

Jadi, rapat jam 2 siang itu tidak lama...kira-kira ya 40 menit...1 jam paling lama. Kemudian ditentukan temanya ini...siapa yang menulis,ditentukan. Siapa saja boleh menulis. Setelah itu, harus diperiksa..paling tidak oleh dua orang..sudah sesuai atau belum...kalau sudah, ya turun cetak. Jadi, tidak berarti kalau saya senior lalu kesannya saya tidak mau menulis atau tidak perlu diedit, wajib. Kalau ditugaskan, ya wajib mengerjakan berita itu dan memberikan pada yang lain untuk mengedit..lalu dari situ di kirim ke Lino untuk dimasukkan layout.

A : pertimbangan tema atau topik berdasarkan apa?

B : iya...rapat itu setiap hari...karena setiap hari kita harus menentukan tema-tema apa saja yang akan dituliskan di editorial..tentu butuh pertimbangan, sebuah parameter. Parameter pertama adalah aktualitas. Apa yang paling penting dan paling ramai pada hari ini atau mungkin dua tiga hari ke depan...pilih satu. Kalau ada tiga, harus pilih satu. Kita harus mempertandingkan dari ketiganya apa yang paling aktual. Kalau aktualnya sama, kita harus memperhitungkan *magnitude*-nya, apa dampaknya. *Magnitude* itu luas besarnya cakupan beritanya. Katakan kalau misalnya ada pergantian seorang menteri harus berhadapan dengan kasus kerusuhan di Ambon pada hari yang sama..kalau pergantian menteri itu menyangkut kementerian yang 'ecek-ecek'..sementara di Ambon itu melibatkan ratusan bahkan puluhan ribu orang..maka itu bisa dilihat sebagai dampak, sehingga yang berdampak banyak orang itu yang dipilih ketimbang yang 'ecek-ecek'. Ketiga adalah keunikan...kalau suatu peristiwa yang sangat unik dan berpengaruh besar maka ia sanggup mengalahkan topik yang tanda petik penting. Sebagai contoh..terjadi perkelahian atau ini saja..pencurian ikan ratusan ton di wilayah yang tidak terjaga dan bersama itu juga tersandera berapa puluh ABK. Dan kemudian mereka dibawa pergi oleh kapal asing sampai beberapa waktu tertentu yang tidak diketahui..ini menurut kita masuk parameter unik. Lalu pada saat yang bersamaan, terjadi di Jakarta misalnya pembunuhan seorang artis.. itu, mana yang harus kita pilih? Ini kan dua aktualitas yang sama..mungkin *magnitude*, kalahlah yang artis dari pencurian ikan lebih baik, tapi secara keunikan...dua-duanya mirip. Nah, harus dipilih antara kedua kasus penculikan dan pembunuhan artis, tergantung watak kita, watak media. Watak media itu apa? Watak media itu tidak mau mengambil pusing dunia selebriti ini, dunia musik..musik tertentu apalagi kalau dia artis dangdut, artis sinetron..ya maaf ini *sorry*...bukan maksud apa. Itu tidak penting. Kita harus *straight* pada karakter kita...ya mungkin ada koran lain yang mengambil itu tapi kita tidak. Kita ambil lebih mengutamakan kasus penculikan yang terjadi pada kapal. Kemudian kriteria yang lain adalah

antisipasi. Antisipasi itu begini...kalau kita tahu besok akan terjadi pergantian menteri, kita satu-satunya yang tahu besok ada pergantian menteri..maka kita harus mendahului itu untuk memenangkan publik pertarungan...jadi kompetisi. Kompetisi isu, kalau *you* tidak ada hujan tidak ada angin mendapat berita yang eksklusif, itu kan sebuah kebanggaan. Kebanggaan bahwa kita lebih cepat lebih akurat dan itu kemenangan. Itu beberapa salah satunya,,tentu masih banyak sekali..

Kedua, aspek apa hal-hal yang bersifat humanisme...misalnya bencana alam di Merapi, seperti kemarin..itu kan humanistik. Itu harus mengalahkan yang lain..banjir, longsor yang menelan banyak korban lalu tragedi kecelakaan kereta api, pesawat yang merenggut banyak korban itu juga menjadi fokus perhatian, hal-hal yang menjadi pilihan yang paling utama dalam editorial. Tetapi editorial tidak semata mengejar itu. Editorial juga mempunyai kewajiban yang melekat pada fungsi pers yaitu fungsi kontrol. Kontrol..kita menagih janji. Karena itu, maka kasus-kasus yang mengganggu kepentingan publik seperti korupsi, manipulasi yang tidak selesai atau belum selesai, dan kita anggap akan tidak selesai dalam permainan untuk ditutupi, maka kita mengontrol itu. Maka, kebijakan kita adalah setiap hari atau setiap minggu, harus diangkat lagi sebuah kasus yang belum selesai kasus yang kita curigai. Kasus Nazarudin..kami angkat terus..kasus century. Apapun itu kita ingatkan..itulah fungsi kontrol kita. Karena pemerintah ini cenderung menyelesaikan masalah dengan bantai..dengan mengulur-ulur waktu, menunda-nunda penyelesaian, sehingga suatu saat orang lupa pada masalah trgaedi ini. Jadi, sesutau yang menurut kita berdampak besar tetapi menyangkut kepentingan banyak orang dan itu cenderung dimanipulasi terutama dalam proses-proses hukum. Jadi, itu misi kita. Misi editorial itu adalah mengedepankan fungsi kontrol. Tentu beberapa kali, wah! Itu editorial mengulang-ulang itu terus..itu apa maksudnya? Apa maksudnya Media Indonesia dan Metro TV begini...saya selalu menjawab dengan tegas. *sorry*..jangan menyamakan atau memaksa kami melaksanakan fungsi polisi, kami tidak bisa

melaksanakan fungsi jaksa, bukan. Kami tidak melaksanakan fungsi hakim...kalau anda mau tanya tentang penyelesaian.. tanya jaksa, tanya hakim, tanya polisi...soal penyelesaian. Tapi kami...fungsi kami adalah seperti anjing kami terus menggonggong tapi kami tidak menggigit. Begitu juga dengan editorial Media Indonesia juga harus dipahami seperti itu. Itu beberapa parameter ya..yang menjadi pertimbangan untuk memilih topik dari peristiwa fakta..nyata.

Lalu sekarang yang menjadi unik adalah adanya bedah editorial, ini juga bisa disinggung. Bedah editorial itu artinya editorial yang teks itu dikasih ruang untuk berada di ruang audiovisual..di ruang broadcast. Bedah editorial di Metro TV ini harus dianggap sebagai sesuatu yang unik. Bahkan, beberapa orang mengatakan ini tindakan berani, yang pertama di dunia. Kita belum melakukan penelitian mendalam...tapi banyak orang berbicara itu, termasuk pimpinan Kompas, Jacob Utama. Itu boleh ditanyakan pada beliau langsung, silahkan. Jadi, uniknya ketika editorial yang berbentuk teks ini..masuk ke wilayah broadcast dan interaktif. Ini menyalahi asas editorial. Asas editorial itu adalah ini satu-satunya kolom redaksi yang tidak perlu diperbincangkan, diperdebatkan, dipertengkarkan. Tetapi, ketika *you* masuk ke ruang broadcast dan interaktif...*you* membuka ini untuk dipertengkarkan untuk diperdebatkan. Mengapa bisa? Bagaimana sebuah sikap yang *private* menjadi kepentingan umum? Ya ini memang pertama kita ambil resiko. Tetapi resiko ini bersumber dari kerendahan hati. Kerendahan hati bahwa tidak ada satu pun setan, binatang liar, manusia yang bisa memonopoli kebenaran. Malah, kita anggap ini sebagai aktualisasi kita terhadap kontrol publik. Kedua, ini bagian dari dialektika kita mencari kebenaran, kesesuaian pendapat, kompromi. Karna kita menganggap, kita berbesar hati untuk tidak memonopoli kebenaran, maka kita mau berdialog, mendiskusikan sikap kita yang tadinya berada di ruangan eksklusif menjadi ruang terbuka. Nah, itu sudah berlangsung sejak 2006 apa ya...sudah lima tahunlah. Dampaknya apa?! Dampak pertama yang tampak tentunya rating. Bedah editorial semenjak muncul di

Metro TV selalu berada di 10 besar program Metro TV sampai hari ini. Itu artinya, dia diterima pemirsa maupun pembaca. Dan efektivitas terhadap kontrol itu berguna...luar biasa sekali. Luar biasa itu parameternya apa? Yaitu pikiran, kritik, saran kita sampaikan dalam editorial menjadi kebijakan publik terutama pemerintah. Contoh, harga BBM...kita adalah orang yang setuju secara perlahan-lahan harga jual subsidi BBM, kita adalah orang yang sepakat tunda kunjungan ke Belanda ketika SBY mau datang malah disambut demo. SBY *no problem* pun tidak jadi berangkat. Jadi, beberapa hal kita berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ya itu bagus. Tetapi yang lebih dari itu adalah bahwa ini menjadi diskusi publik sepanjang hari pada orang-orang yang ingin mengetahui apa yang terjadi pada hari ini, dia cukup membaca atau menonton di TV pagi hari..selesai. Tetapi ada kerugian, belum ada penelitiannya ini, tetapi ada. Banyak orang yang mengatakan... buat apa membaca lagi kan cukup menonton yang ada di televisi, bedah editorial itu cukup. Kami tidak perlu beli lagi korannya. Jadi, untuk menjembatani itu, maka kita tarik lagi yang ada di broadcast itu ke halaman bedah editorial ke format cetak. Jadi, pemikiran si A si B itu dimunculkan ke cetak. dikembalikan lagi ke fungsi yang cetak, ke format atau substansi yang cetak seperti ini. (menunjukkan halamannya) ya ini secara singkat prosesnya atau apalah.

A : oh ya pak, terlewat. Siapa yang menentukan penulis editorial itu per hari berdasarkan apa dan siapa yang berwenang?

B : ya sebenarnya...ya karena saya dan Saur dianggap senior..umumnya ya kalau tidak saya ya Saur yang biasa melakukan...menentukan tema maupun penulisnya. Tapi sesungguhnya ada karakter, kalau anda lihat pada teks-teks editorial kami. Wilayah-wilayah apa saja yang muncul...umumnya politik, lalu hukum, ekonomi, yang kurang dari mereka adalah bagian ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek. Coba kalau anda lihat...kami sangat kurang dalam kisi-kisi teknologi. Kenapa? Setelah kita timbang-timbang, kita sadari. Kita mencoba mencari orang yang paham teknologi, ternyata itu susah. Teknologi termasuk kesehatan,

kedokteran, antariksa, makhluk hidup kita kurang. Pertama memang orangnya yang menguasai semua aspek teknologi tersebut masih kurang. Kedua, karna ini juga menjadi bahan untuk bahas di Metro TV, tentu kita butuh juga siapa yang mau membawa pada publik. Jadi, itu persoalannya. Dan setiap kolom ini, ada kekhususan penulisan. Kalau politik itu siapa. Bukan karena kita tidak bagi. Lebih karena lihat bakat, minat dan kemampuan dia menulis, argumen dia bagus, maka ya ada penulis tertentu. Kalau politik ya pasti inilah. Budaya bisa A,B,C. Ekonomi ya kamulah..hukum,*you*. Jadi, ada beberapa penulis yang spesial untuk isu tertentu.

A : editorial kan tentang sikap MI. Kita tahu owner MI adalah Surya Paloh, seberapa pengaruh beliau pada MI, khususnya editorial?

B : oo iya.. secara isi maupun topik..? iya memang....selalu menjadi perdebatan masa ini. Tetapi yang mulai lunak ketika itu mempersoalkan ini. Dulu, surat kabar ini adalah wilayah idealis. Tidak boleh ada orang yang campur tangan, berpihak. oleh karna itu dulu, ada era surat kabar perjuangan. Surat kabar perjuangan itu yang tidak mementingkan lagi kepentingan individu untuk dicetak, terbit. Tapi sekarang berubah. Surat kabar sekarang ini menjadi industri, koorperasi. Sehingga hanya tertuju pada dua hal : taat market dan taat modal. Jadi, seorang pemilik itu boleh masuk ke editorial. Ketika dia berubah dari surat kabar perjuangan menjadi perkembangan lembaga industri yang taat modal taat market, maka suka tidak suka, mau tidak mau, tunduk kita pada kepentingan modal. Kalau kepentingan modal, ya kita tanya saja... you di koran tujuannya mau apa seh? Kalau politik berarti menginjak kekuasaan, tapi kalau tujuan ekonomi berarti *you* mencari untung. Sekarang tidak ada lagi koran yang tidak mencari untung...saya mau cari senang-senang saja, boleh. Berarti *you* tidak punya interest apa-apa. Kembali, apakah editorial itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pemilik modal MI? Harus saya jujur, ada. Ada dalam arti bahwa dia mengarahkan pikirannya terhadap sebuah isu, kita harus bersikap demikian. Misalnya, terhadap KPK.

Belakangan ini kan Surya ini makin kritis. Kita jangan bela, bodo juga KPK ini, kita anggap mereka malaikat *kok tau-tau malah...* malaikat apa begini? Nah, kalau menyangkut seperti ini berarti...sebenarnya dia *tengsin* juga untuk langsung mengatakan *NO. So*, Laurens, kita harus lebih kritis terhadap KPK. Itu model intervensinya. Dia tidak pernah bilang judulnya harus begini...kata-katanya harus begini. Tidak. Kenapa intervensi tampak sederhana, karena dia *trust* kepada kita. Kepada pengelolanya. Kemudian pengaruh pemilik di luar editorial, terhadap kepentingan-kepentingan koorperasi menyangkut jangan sampai perusahaan ini bangkrut, rugi, kalah. Itu saja. Contoh yang sederhana saja, kami ini sedang berperkara dengan Dipo Alam. Maka, seluruh editorial berita politik kita harus berperkara, kita harus menang. Kita carilah staf ahli yang berada pada alur berpikiran kita bahwa memboikot-boikot seperti itu melanggar undang-undang pers. Lalu kepentingan bisnis, pasti. *Masak* kalau korannya diterbitkan oleh PT X, tiap hari kau *hajar* PT mu ini biar cepat bangkrut. Pasti, tidak boleh juga oleh pemiliknya. Kenapa kita memberi ruang untuk itu, dulu *kan* tidak bisa. Kita lebih melihat pada aspek keadilan. Ketika bisnis ini menjadi bisnis industri, maka berlakulah yang namanya hak dan kewajiban. Sebagai contoh, kalau koran ini bangkrut, siapa yang akan memberi pesangon-pesangon kita...apakah kita potong gaji, untuk bayar pesangon-pesangon mereka? Tentu tidak. Kalau koran ini melanggar tindak pidana lalu didenda, siapa yang tanggungjawab? Kan pasti pemilik. Kalau koran ini, harus ada yang masuk bui? Apakah *you*, saya? Bukan. Pasti pemiliknya. Kan pemilik punya tanggung jawab yang begitu berat, masak dia tidak punya hak. Jadi, kesadaran inilah yang kami gunakan. Kau, pemilik boleh. Tetapi tidak untuk semua hal...ada batasnya, ada ruang tertentu, tidak boleh semua hal. Itu semua juga dipraktekan oleh semua surat kabar.

Kalau pemilik punya kepentingan politik. Ok. pertemanan politik, ya ada memusuhi orang ABCD, tapi karena kita orang partai...ya kita bersahabat dengan partai ini..dan tidak partai lain. Dan itu terjadi ketika dulu dia di

Golkar kan setengah mati, koran ini dianggap punya Golkar. Kita tenang ketika dia tidak jadi...sekarang emban pindah ke TVOne karena Aburizal. Jadi, realitas sekarang ini semakin memperkuat kita bahwa tidak salah koran, lembaga memberi ruang kepada pemiliknya. Tapi tidak banyak. Harus ada aturan main. Jadi, *privilege* itu tidak boleh terlalu sering dipakai, tidak boleh terlalu banyak untuk semua hal. Itu satu. Kedua, yang memiliki *privilege* itu tidak boleh banyak orang juga. Hanya satu yaitu Surya Paloh. Tidak boleh pemegang saham yang lain memiliki *privilege* dan mengintervensi secara langsung ke redaksi. Kalau pemegang saham punya kepentingan, mereka harus melalui surya paloh. Tidak boleh setiap orang mengintervensi kami. Jadi, kemerdekaan kita, martabat dan profesionalisme kita tidak boleh terlalu diintervensi oleh kepentingan modal. Tetapi tidak bisa menyingkirkan 100% intervensi itu, alasannya ya tadi yang sudah saya jelaskan. Karena ada soal hak dan kewajiban. Soal keadilan.

Masuk bahasan TEKS EDITORIAL

- A : menurut bapak, apa yang ingin disampaikan pada teks pertama ini?
- B : oh ya, ini soal pertarungan pencalonan JK dari Golkar dengan SBY pada pemilu 2009 ya..pertama kita melihat ini sebagai sebuah *frame* demokrasi. Artinya, tampilnya JK menjadi capres yang sebelumnya adalah wapres SBY kemudian bersaing. Ini kan sesuatu yang dulu tidak pernah kita alami, tetapi sekarang bisa dan boleh. Kenapa boleh? Karena kita sudah seleksi alam oleh perkembangan demokrasi. Kedua, yang paling penting adalah etnonasionalisme atau..ya aspek kesukuan dalam berbangsa ini. Coba lihat...bahwa pernah sekali waktu bahwa seorang BJ Habibie menjadi presiden. Tetapi dia tidak melalui sebuah pemilihan umum. JK berbeda. JK sekaligus menegaskan kembali nasionalisme yang diusung..visi atau misi..mmm..*platformnya* Golkar bahwa setiap orang punya hak, tidak peduli agama apa, suku apa, pokoknya berhak. Ini tidak ada larangan. Tetapi pada praktek lama, ini anda lihat bahwa presiden ya

harus orang Jawa, kalau bukan orang Jawa, kayaknya aduh enggak...jangan mimpi *you*..jangan mimpi *deh*. Kira-kira begitu. Ini tidak ada aturan yang resmi, tetapi ini menjadi konvensi kulturasi kita macam konvensi sosiologis kita. Karna itu presiden Jawa harus berkombinasi dengan luar Jawa, yang presiden luar Jawa kombinasi dengan Jawa. Jadi, kita ingin bahwa menunjukkan ini indonesia semakin jaya, indonesia yang semakin terbuka. Biar Obama yang hitam itu bisa menjadi presiden di negara yang putih. Jadi, kungkungan-kungkungan ras, kungkungan etnis kita harus kita bongkar supaya kalau kita *omong* tentang Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia yang multikultural, Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika harus tercermin di dalam *recruitment* kepemimpinan bangsa ini juga. Itu *frame*-nya itu.

A : sikap MI biasanya diletakkan pada bagian editorial yang mana?

B : sikap itu seharusnya tercermin dari seluruh teks, body teks. Tapi bisa saja di atas, di tengah, di bawah. Tidak ada struktur baku dalam penulisan editorial ini. Beda dengan penulisan berita. Berita *kan* harus pakai piramida terbalik namanya. Tapi untuk menulis editorial ini cenderung bebas. Tidak ada struktur baku atau kaku yang harus kita patuhi, yang paling penting di atas, lalu yang bunga-bunga di tengah lalu kesimpulan di atas. Tidak. Karena itu, kalau mau mendapatkan isi pesan dari sebuah editorial harus dimengerti secara keseluruhan. *The hold* teks. Tidak bisa hanya diraba melalui judul saja.

A : di editorial MI ada kolom cuplikan penonjolan kata-kata yang berbentuk persegi itu maksudnya apa?

B : ini sebenarnya hanya mengambil bagian dari editorial, dimaksudkan sebagai penekanan, pertama. Yang kedua..ini sebenarnya juga fungsi artistik dari kami. Ya supaya tidak tampak terlalu kaku dan tidak membosankan. Ya kita lihat mungkin bagian kata-kata ini yang paling 'genit', paling 'pedas' atau yang paling keras ini...tetapi ini juga harus berfungsi sebagai artistik.

A : kalau sebagai penekanan kata, apakah itu dikaitkan dengan sikap MI?

B : iya. Penentuan sikap terhadap pernyataan yang paling kuat, dominan, paling menyentuh ya pokoknya yang palinglah...

Oh ya soal teknis, dulu kan kami panjang...sekarang kami berkurang jumlah kolomnya.

A : iya, sudah dijelaskan kemarin di sekret. Bisa masuk teks kedua pak? Bagaimana?

B : iya, di titik terang konstelasi ini lebih cenderung pada situasi, siapa mencalonkan siapa, siapa berpasangan dengan siapa. Waktu itu yang sudah amat jelas adalah pasangan JK-Wiranto daripada SBY belum jelas, Megawati belum jelas. Maka *frame* kita ketika itu adalah lebih cepat memberikan kejelasan, lebih baik bagi publik, pertama. Kedua, sebaiknya dibuka banyak calon daripada sedikit calon kalau bisa. Kenapa kita berpikir demikian? Karena kecenderungan setiap partai mau berlindung atau berkiprah, mau berkoalisi dengan SBY semua, karena yakin bahwa SBY akan menang, kuat. Maka partai-partai kecil semua mendekat. Bayangkan kalau semua ke SBY, ya tidak ada pemilihan. Karena cuma satu, tidak boleh. Pemilihan itu harus ada dua, tiga, empat...tidak ada larangan jumlahnya berapa. Jadi, *frame*-nya adalah bahwa keputusan dalam demokrasi itu lebih cepat lebih baik, lebih terang dalam penentuan calon lebih baik. Yang kedua, jangan matikan kompetisi. Jadi, dalam *recruitment* calon pemimpin tidak boleh mematikan kompetisi. Partai-partai kecil itu kalau dia mampu sebaiknya mencalonkan diri sendiri. Kenapa harus berlindung atau mengekor partai-partai besar? Atau partai-partai besar ya kalau perlu juga jangan begitu, merangkul kanan-kiri. Kalau partai besar, ya harusnya mampu berdiri sendiri. Kalau merangkul sana-sini, ini yang sekarang kita hadapi. Presidensiil tapi koalisi banyak partai. Presidensiil tapi setengah mati menghadapi parlemen. Jadi, *frame* kita adalah di dalam demokrasi itu kejelasan, kepastian dan keterangan lebih cepat itu lebih baik. Kemudian buka, membuka kompetisi itu tidak boleh dibatas-batasi. Makin banyak yang bertarung itu makin bagus. Kira-kira begitu.

A : baik pak, lalu yang teks ketiga..

B : iya..pertama yang tampak disini, *frame* usia. Lalu diikuti dengan *frame* sipil-militer. Kenapa dibilang cuci gudang? Inilah pemilu yang diharapkan selesai generasi 45. Karena ya hanya Prabowo yang paling muda, itupun 58 tahun. Yang lainnya ya di atas 50, 60 tahun. Kritiknya ya *kok* bangsa ini tidak muncul, anak-anak 40, 30.. coba lihat saat ini Obama saja memimpin di usia 42 tahun, 38 tahun sudah menjabat pemerintahan. Kenapa regenerasi di bangsa kita menjadi lambat dan tersendat-sendat? Itu kritik kita. Mudah-mudahan setelah pemilu ini, muncul angkatan baru dan berakhir angkatan 45. Begitu.

A : lalu yang keempat, bagaimana?

B : oo ini sama ya...tentang seputar capres. Oke. Yang sudah tadi pertama *frame*, demokrasi, regenerasi, waktu, sipil-militer. Jadi, beberapa *frame* ada *frame* sosiologis Jawa-luar Jawa, *frame* demokrasi kompetisi, *frame* regenerasi usia. Ya ini agenda ekonomi capres-cawapres lebih pada persoalan teknis saja. Ya ini menggambarkan tentang program visi-misi masing-masing calon. Dari sini kita bisa lihat bahwa JK-Wiranto itu lebih mementingkan sektor riil, SBY-Boediono mementingkan pembangunan ekonomi yang luas dan merata untuk semua tingkatan, sedangkan Mega-Prabowo lebih pada ekonomi kerakyatan. Ini sebenarnya, tiga nama tiga *platform* untuk hal yang sederhana. Mau kerakyatankah, mau pertumbuhan untuk semua, mau..sektor riil, sama saja. Pada akhirnya adalah bagaimana program ekonomi itu *benefit* untuk kepentingan semua rakyat. *Problem* kita sebenarnya, pertama pada anggaran yang terus meningkat tetapi *benefit* tidak paralel tidak linear. ketika anggaran...coba anda lihat, anggaran kita APBN yang awalnya 300 triliun menjadi 1000-1200 triliun, tapi manakah dampaknya yang terasa dari 300 ke 1000 itu kan bertambah 700, mana?? 700 menghasilkan apa? Berapa masyarakat yang keluar dari kemiskinan? Berapa infrastruktur yang dibangun? Berapa jembatan yang baru? Berapa pelabuhan? Berapa bandara? Tidak ada. Ketika itu dipertanyakan, sesungguhnya. Program-program ekonomi manakah tidak

peduli pada *platform* apa, mau kerakyatan, mau sektor riil, mau pemerataan. Kita tidak peduli. Yang mau kita peduli adalah, program-program apapun harus bisa menghasilkan benefit untuk rakyat Indonesia. Itu yang intinya. Maka, ketika teks ini muncul, pertarungan pikiran waktu itu adalah antara Neoliberal, kita tidak mau ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada pasar. *No*. Ini kan pertarungan dua rezim. Rezim Neoliberal, yang sekecil mungkin negara tidak boleh gabung dengan rezim intervensi legal. Kenapa intervensi legal itu penting? Karena kita adalah '*baby industry*', jadi industri yang masih bayi. Karena masih bayi, perlu intervensi. Yang pertama, kalau seluruh mekanisme kita serahkan semua pada pasar, mati. Beras kita impor, sapi impor, cabai impor, karena mekanisme pasar. Ketersediaan di luar lebih banyak daripada ketersediaan di sini. Jadi, itu pertaruangannya. *Framenya* adalah antara pasar bebas atau pasar yang di intervensi.

A : masuk teks yang kelima..

B : oh iya..ya teks yang kamu ambil ini semua berkaitan. Jadi, pada waktu itu, Andi Malarangeng ya karena dia membela SBY, dari Demokrat yang tidak berpihak pada JK yang sama-sama dari Makasar, kira-kira begitu. Karena itu, pernyataannya adalah belum saatnya orang makasar jadi presiden, jadi pemimpin harus orang Jawa, ya itu kembali lagi tadi. Jadi, kenapa kita menggunakan pengerdilan? Nah, ini kita awal-awal pencalonan kita sudah melawan ini. Munculnya JK itu adalah untuk membongkar belunggu sosiologis kita bahwa presiden suka tidak suka harus Jawa, atau bahkan harus Islam pula lagi. Ini kan tidak pernah diekspos. Tapi inilah belunggu sosiologis kita. Maka, ketika doktor Andi Malarangeng yang tamatan Amerika itu menyatakan sekarang Makasar belum saatnya memimpin, ini tentu menimbulkan pendapat berbeda. *Masak sih*, seorang doktor pakar politik mengatakan demikian. *Harusnya kan halo!* Bangkitlah anak-anak muda, orang-orang yang pintar di seluruh negeri ini, dari Sumatra sampai Papua, kalau anda mampu calonkan diri jadi presiden. Tapi apa sebaliknya? *Kok* dia bilang..ah..ini orang Makasar

ini, tidak bisa pimpin ini. Kembali kita, mengukuhkan atau mengkristalkan kembali belunggu-belunggu itu, dominasi Jawalah, dominasi inilah. Jadi, Jawa-luar Jawa itu harusnya menjadi agenda yang lama-lama hilang dari dinamika kehidupan berbangsa kita ini. Kalau masih seperti itu, kasihan *dong* kami orang Flores, kapan jadi presiden? *Kan* kira-kira begitu. Jadi, belunggu-belunggu yang pengerdilan seperti ini tidak boleh. Seperti yang tadi saya bilang awal, bagus majunya JK tapi e ada orang Makasar, anak muda, doktor lulusan Amerika yang katanya terbuka *open minded*, e mau menegakkan lagi belunggu ini. Ya itu tadi namanya pengerdilan. Jelas, salah yang dilakukan Andi Malarangeng. Sangat mengejutkan. Tapi apa sekarang? Resikonya? Akhirnya pernyataan tersebut malah menjadi tembok permusuhan keluarga antara Andi Malarangeng dan JK di makasar. Karena dianggap menghina, menghina Kalla ini tidak bagus. *Nah*, ini jadi permusuhan. Terbukti dampak sosiologis masyarakat kita.

A : dari semua teks editorial, kenapa JK selalu ditempatkan pada bahasan pertama, sedangkan kita tahu JK-Wiranto itu pada urutan ketiga sebagai capres-cawapres?

B : di situlah *interest* kita. *Kan* anda tahu pada saat itu, Surya Paloh menjadi Ketua Pembina partai Golkar. Atas dasar itulah kita memberi ruang bahwa keberpihakan itu harus ada. Itulah ruang yang kita kasih pada *privilege* seorang Surya, "JK ya". Ya sudah. Itu perintah. Jadi, itu lah yang kita terjemahkan dari intervensi seperti itu. Kalau dikata *interest* ya hak pemilik juga, hak kita juga, hak media juga untuk bersikap. Karena apa? Ya *kan* pada akhirnya kita semua pergi ke TPS to, milih kan? Jadi kami tetap independen. Walau tulisan utama tentang itu tapi *kan* milih bebas bisa JK-Wiranto, Mega-Prabowo, SBY. Masing-masing bebas pilih di luar, walau kita kerja di institusi yang sama. Jadi, di banyak negara di luar, terutama Amerika pun pers tidak haram untuk berpihak, karena itu tidak salah yang namanya berpihak. Misalnya, media pun berpihak pada calon atau kepentingan Kalla. Kalau ada yang mengatakan kami ini pers

partisan, *No*. Masak sikap *kok* dibilang partisan. Ya contoh saja, anda liat di Amerika ada CNN, FOX, itu jelas kalau musim pemilu mereka mengarah sikap. CNN kemana..Fox kemana. Tapi Amerika tidak mengatakan bahwa pers ini masuk pers partisan. Karena kita mempunyai fungsi juga menguatkan demokrasi. Menguatkan demokrasi artinya boleh dong kalau saya tidak cocok sama *you*, lalu saya harus ke *you*. Masak saya di koran tidak boleh mengatakan ini baik itu buruk. Saya tidak boleh mengatakan ini yang benar, itu yang salah, *kan* tetap boleh lah. Ini adalah bagian dari pendidikan demokrasi yang menegaskan bahwa kita menghargai perbedaan. Jadi, bersikap itu sendiri merupakan cara bagaimana kita menghargai perbedaan. Apakah independen itu lalu tidak boleh bersikap? *Lho*, independen itu artinya *you* harus bebas untuk melihat bahwa orang lain memiliki pilihan yang bebas juga.

A : lalu pada saat itu, bagaimana SKH MI ini melihat pencalonan Jusuf Kalla sebagai capres?

B : ya karna itu *interest* kita, memang itu merupakan tindakan yang benar. Pertama, dalam kapasitas pribadi, setelah lima tahun berpasangan dengan SBY, kita lihat ada beda kapasitas. SBY ini orangnya kalau mobil kerjanya injak rem, JK itu maunya mengegas. Ini kalau dirasa-rasakan sebenarnya kombinasi yang pas, dua orang pemimpin yang satu gas, yang satu *ngerem*. Sekarang ternyata coba liat, SBY bersama Boediono, dua-duanya injak rem. *Nah*, kelihatan tidak jalan. Itu dari sisi manajemen. Kedua, dari sisi harga diri Golkar. Masak Golkar partai besar *tau-tau nempel* ke Demokrat yang partai kemarin. Masak partai besar yang sering memenangkan pemilu menyusu pada partai yang hanya karena ada SBY di situ. Jadi, itu alasannya. Jadi, jangan terlalu terpaku kepada popularitas. Apa itu yang kita cari?? Jadi, disitu intinya. Ya idealnya kita sebagai partai besar harus memiliki calon sendiri *dong*. Itulah pikiran kita pada saat itu. Jadi ada dua, pertama persoalan harkat martabat organisasi pemenang pemilu dan kedua, soal gaya kepemimpinan, manajemen.

A : apakah perceraian SBY-JK pada 2009 itu, hanya terkait persoalan koalisi Demokrat-Golkar atau adakah persoalan lain secara internal, mungkin tahu?

B : ya..kita sebetulnya tidak tahu persis adanya persoalan internal. Tetapi yang sempat keluar bahwa sangat terlihat memang karena gaya kepemimpinan mereka yang berbeda, pertama. Kedua, memang sikap SBY yang menunda-nunda menentukan siapa pendampingnya juga menyebabkan JK merasa 'sepertinya pemilu ini, dia tidak akan memilih saya'. Seperti itu. *Kan* SBY paling lama menentukan siapa yang jadi pasangannya. Paling terakhir. *Nah*, JK itu bingung. Katanya masih berpasangan lagi, tapi *kok* pembicaraan belum-belum juga. Di saat batas kesabarannya, ya akhirnya dia mencalonkan diri maju sebagai perwakilan partai Golkar dan partai Golkar mendukung itu. Ketiga, ya pada saat itu, SBY didekati oleh begitu banyak partai yang memang JK tidak begitu suka dengan partai-partai itu. Tetapi sekarang menjadi aneh, ketika dulu didekati banyak partai, kok pilihannya pada Boediono? Dia itu jagonya siapa? Dari partai mana yang merekomendasi Boediono? Iya, Boediono itu orangnya PDI-P orangnya Mega dulu. Kenapa kok pilih Boediono? Kalau setelah milih Boediono lalu meledaklah kasus Century, ooo.. itu sebabnya. Orang mulai tarik-tarik ke belakang, itu rupanya alasannya. Supaya dua orang ini memiliki pedang untuk melawan. Ada kekuatan di sana. Maka dari itu, Century *kan* sampai sekarang menjadi pertanyaan. Jadi, itu alasannya kenapa Boediono dipilih. Karena berjasa mengucurkan duit berapa triliun, kasusnya pun tak selesai-selesai. Dan Boediono pun dinilai banyak orang tidak memiliki nilai jual pada saat itu. Dia kan bukan politisi. Jadi walaupun pada saat itupun menang ya karena ada SBY. SBY pun kalau berpasangan dengan saya, menang juga. Karena begitu hebatnya popularitas SBY saat itu, ya pasti menang.

A : kembali ke JK pak, bagaimana dengan popularitas dan pencalonannya sebagai capres yang cukup kontroversial dengan karakter yang JK miliki...

B : jadi gini, kita harus melihat beda antara popularitas dan elektabilitas. Seseorang itu populer, belum tentu elektabilitasnya tinggi. Karena bisa saja dia populer tapi dengan aksen yang jelek. Bicara ceplas-ceplos tentu bukan gaya yang baik untuk semua orang. Asalnya dari luar Jawa, itu kan belum tentu baik untuk semua orang. Dan kemudian JK ini menjadi tes bagi kita, dimana kita belum keluar dari pikiran-pikiran terbelenggu tadi. Kalau orang kita ceplas-ceplos itu bukan hal yang bagus. Orang kita kan mungkin ya tata krama, *unggah ungguh*. Apalagi dihadapkan JK yang..wah, orang makasar *kok* mau *petentang petenteng* di tempat saya kan kesannya gimana.. . Jadi, primordialisme kita itu terbukti masih kuat dan mendarah daging di tubuh kita, terutama *recruitment* pemimpin. Tetapi satu hal juga yang menonjol dari JK, ketika wapres. Setiap departemen dalam pengembangan SDM hampir semua dari Makasar. Nah, ini *you* kritik. *Wah kok* begini, apalagi kalau dia jadi presiden. Jangan-jangan semua bisa orang Makasar. Jadi, kritik waktu itu ketika JK itu. Rupanya, primordialisme di negara kita ini masih sangat kuat.

Jadi, demokrasi ini memang butuh waktu proses yang panjang untuk supaya kita menghargai apa itu namanya..melihat orang bisa duduk bersama dalam perbedaan. Jadi, *married* sistem itu harus ditumbuhkan, perlahan-lahan. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat, tapi kita tunggu. *Married* sistem itu kita disandingkan bersama. Itu nilai , acuan umum bagi kita. Termasuk dalam *recruitment* pemimpin.

Tapi JK ya ketika itu, menarik untuk sejumlah orang. Buktinya dia *ranking* di pemilu dia nomor dua. *Nah*, kalau *ranking* dipermasalahkan. Coba dianalisa, JK-Wiranto, Jawa-luar Jawa nomor dua, lalu Mega-Prabowo Jawa-Jawa nomor tiga. *Nah*, ini bisa diambil tesis apakah Jawa-luar Jawa tidak laku? Ini jangan-jangan SBY tidak laku juga. Terbukti paham kita mulai bergeser, hanya mungkin ketokohan JK yang tidak cukup kuat untuk mengalahkan SBY. Kira-kira begitu. SBY kan sopan santun, gagah, pasti wanita-wanita ada pendapat juga dia ganteng, ya pemilih perempuan-perempuan semua ke dia semua, apalagi ibu-ibu. Itu

bisa jadi. JK kan jelek, pendek, muka gak bagus, gak tinggi. Tapi itu bisa menjadi catatan kalau tesisnya bahwa apakah Jawa lebih laku lalu luar Jawa apakah tidak laku. Tetapi ketika bersaing, Jawa-Jawa dan Jawa-luar Jawa, e Jawa-luar Jawa nomor dua. *Nah*, kombinasi tersebut kok bisa nomor dua. Nah, itu berarti menyalahi belunggu tadi. Bahwa masyarakat kita sudah menuju makin jaya. Benar.

A : melihat keterkaitan itu pak, apakah SKH MI mendukung sepenuhnya JK menjadi capres pemilu 2009?

B : tentu dong. Kita mendukung. Kita dukung dia dalam *frame*. *Frame* bahwa harus mulai ada seseorang yang menjadi contoh, mengetes ini. Apakah betul, masyarakat kita masih terpaku pada pemikiran presiden harus orang Jawa. Itu yang kita uji. Itulah juga kita dukung JK, dukung dengan *frame* itu. Kalau tidak ada sesuatu yang *ngetes*, maka kita akan tenggelam dalam persepsi-persepsi yang belum tentu benar. Karena sudah berubah masyarakat kita ini. Dengan JK-Wiranto yang nomor dua dan di bawahnya ada Mega-Prabowo, jelas membenarkan masyarakat kita sudah mulai berubah ini. Hanya JK yang belum kuat saja.

A : kira-kira pengaruh belum kuatnya JK atas faktor? Pasangannya kah atau ada lain?

B : iya. Pertama, kita harus lihat mesin Golkar. Golkar kan pemenang pemilu. Pasti ada modal di situ. Modal untuk JK pada mesin Golkarnya. Lalu mungkin ada faktor yang sebabkan kita ada di nomor dua. Karena pada mesin Golkar itu, masinis atau infrastrukturnya Golkar pada masa pemilihan itu, katakanlah ada yang *split* yang lari. Tetapi sebagian besar masih ada yang setia pada Golkar untuk dukung JK.

A : kalau menurut bapak secara pribadi, bagaimana memandang pencalonan JK sebagai capres 2009?

B : saya ya pada *frame* saya bahwa JK bagi saya harus ada martir untuk mendongkrak mendobrak kebekuan persepsi primordialisme kita. Perlu ada contoh orang untuk mengetes. Saya menyarankan kalau perlu kita tes, luar Jawa-luar Jawa, JK-Surya Paloh. Satu Makasar, satu Aceh. Coba kita

tes. Iya, ini kombinasi yang harus kita coba. Kalau tidak, kan kita bisa mencurigai persepsi ini. Mencurigai Jawa, mencurigai luar Jawa, mencurigai Batak. Iya, dapat dicoba. Pernah saya *omong*, ini kalau tidak ada Obama, kalau mau *ngetes*, harus ada yang berani. Ayo Surya Paloh-JK maju jadi presiden. Kita lihat, seberapa luas dan besarkah dukungan anda. Pasti kalah. Kalau memang benar *frame* Jawa yang harus jadi presiden. Karena ini calonnya kan tidak berasal dari Jawa semua. Ya Jawa sudah di mana-mana, Kalimantan Sumatra saja sudah banyak orang Jawanya. Ini kan Jawa seluruhnya. Kalau Jawa seluruhnya, *lha* kita mau bilang apa. Kita semua ini kan juga tinggal di Jawa, jadi Jawa juga kan. Jadi, migrasi yang begitu luas dan cepat, seharusnya mencairkan situasi. Saya pribadi, sebenarnya mau *ngetes*. Ini kan baru persepsi-persepsi yang belum tentu benar juga. Dan, ternyata terbukti kan. Kombinasi Jawa-luar Jawa saja nomor dua. Ada pasangan Jawa-Jawa yang satunya masuk nomor tiga kan. Jadi, secara perpektif pribadi saya, saya menginginkan itu. Bahwa majunya Kalla tidak jadi persoalan.

A : berarti termasuk mendukung juga?

B : iya, pastinya. Saya dukung. Malah kalau bisa Surya Paloh-JK itu maju.

A : oh iya pak, ketika menuangkan isu tersebut ke dalam teks editorial, itu wewenangnya penulis atau ada toritas tertentu dari pihak mana?

B : *No. No. No.* Itu ada sejumlah poin, saya tekankan dalam rapat. Poin kita ABCD, 1-2 poin kita tekankan dalam rapat, tidak boleh ada yang lari dari poin ini. Ya karena itu maka tidak *pure* otoritas penulisnya. Penulis malah bingung harus mengatur sepintar-pintarnya, merangkum seluruh poin dalam sidang. Ya seperti kerangka berpikir sudah ditentukan urutan menuangkannya. Termasuk *membrief* orang yang besok akan muncul bedah editorial di Metro. *You* tidak boleh lari dari poin ini. Ada beberapa, ya saya tidak akan sebut nama, yang tidak bisa muncul lagi karna pemirsa mengeluh. Ini *kok ngawur* menjelaskan pertanyaan dari orang *kok ngawur*. Artinya, daripada kau merusak mending *off* dulu lah.

A : mengapa kok itu bisa terjadi? Kan melalui editor, rapat juga..

B : ya itu persoalan personal eror saja. Pertama, *kan* sibuk dia, tidak mempersiapkan diri dengan baik ketika tampil. Dari artikulasi *seh* bagus. Tetapi apa yang ditanya, apa yang dijawab *kok* tidak *nyambung*. Pintar. Tapi kalau *you* pintar, omong segala hal, banyak-banyak tapi keluar poin ya sama saja kosong. *Gak tau* batas wilayah ya membuat jadi bingung banyak pihak. Jadi, acara di Metro itu, kesiapan kita dituntut harus mmatang. Persiapan itu memang dari pagi. Jam 3 atau setengah 4 kita sudah berangkat. Jam 4-5 pagi dibaca lagi naskahnya, cari-cari informasi memperkaya *database*. Supaya bicara di depan publik lebih siap. Itu tidak gampang. Jadi, kalau *you* tidak persiapan dan *anggap enteng*. Ya itu, pemirsa akan vonis. Jadi, itu resiko kalau kita membawa ke *broadcast*.

A : proses menulis itu dibutuhkan berapa lama?

B : beda-beda. Sebenarnya kita rapat jam 2 jam 3, sebelum jam 5 sore harus selesai. Karena harus di kirim ke editor. Kalau saya ya 1 jam cukup. Karena semakin sering menulis, sesungguhnya kita mengulang lagi tema-tema yang pernah kita ulas pada bahasan sebelumnya. Ya hanya harus di update lagi, sehingga tidak terlalu sulit. 1 jam itu sudah paling lama. Dengan hadirnya *blackberry*, kita tidak perlu rapat setiap hari. Kita bisa rapat sambil jalan, lalu menulis sambil jalan, mengirim lewat email untuk diperiksa kembali, diedit sambil jalan, itu sangat membantu. Bisa juga lewat *teleconferences*. Jadi, rapat editorial itu, saya dimana atau ada yang lagi di luar, kita tetap rapat jam 2 lewat BBM. Jadi rapat *teleconferences*. Ya mengikuti perkembangan teknologi juga. Misalnya bahas sesuatu topik, oke sepakat yang ini ya, oke, atau ada pendapat lain. Kalau sepakat, oke, poinnya ABCD, nah biasanya yang tetapkan poin itu Saur atau saya, termasuk siapa yang tulis. Setelah itu dikirim ke *email by BB*, saya cek, lalu kita print out. Jadi, meski ada teknologi, kita tetap *stanby* jam 2 untuk rapat. Dulu sebelum ada BB, harus datang tidak boleh tidak, kecuali ada kepentingan luar daerah, itupun *conference* lewat telpon. Nah, kadang-kadang kita bisa menentukan tema untuk 2-3 hari ke depan. Kalau perlu ya *dilist* saja semua. Tetapi setiap hari kita bertemu untuk

meng-*update* apakah tema yang kita tentukan kemarin itu masih berlaku. Kalau berlaku, terus. Kalau tidak, apa gantinya. Jadi, dari hari Senin sampai hari Sabtu kita sudah tau topiknya apa saja.

Senin-Sabtu itu berlaku untuk hari libur tanggal merah. Jadi tanggal merah, ketika editorial tidak muncul di teks, karena koran tidak terbit, ia tetap muncul di *online* dan itu tetap dibicarakan di Metro. MI *online* itu yang membuat tetap kita. Kita tulis, lalu masuk servernya redaksi, lalu diambil Metro lalu ditunjuk siapa yang akan mengisi visualnya.

A : yang mengedit editorial itu masuk editor redaksi atau tim khusus editor editorial?

B : tidak. Harus tim editorial. Jadi, siapa yang tidak nulis, dia harus mengedit teksnya. Jadi, salah satu dari kami bertujuh ini yang mengedit. Penentuan siapa yang mengedit itu tergantung. Kalau tidak saya ya Saur, tapi kalau saya dan Saur tidak sempat, ya yang lain ada Kleden atau Gaudens. Tapi yang normal kalau tidak saya ya Saur, kami berdua.

A : kalau pak Saur atau pak Laurens yang nulis, lalu yang ngedit?

B : ya kalau saya yang nulis, ya mereka yang edit. Jadi, tetap harus *dicheck and recheck*.

A : mungkin yang terakhir, pernahkah tim editorial disuap dalam bentuk materi uang untuk menuliskan topik tertentu oleh pihak luar?

B : kalau suap dibayar, kami tidak pernah menerima itu. Setahu saya tidak ada. Tidak pernah. Tetapi melalui Surya Paloh, misalnya teman-temannya mau minta tulung untuk menyoroti tentang siapa..ya itu mungkin. Jadi, hanya berupa ide dari luar yang disampaikan kepada Surya Paloh lalu diintervensikan ke kami, iya.

A : apakah Surya Paloh menyampaikan pas rapat atau melalui apa?

B : *by phone*. Biasanya lewat telepon kepada saya atau kepada Elman atau kepada Saur. Tapi umumnya kepada saya. Itu tidak suap. Bukan suap, hanya usulkan ide saja.

Wawancara melalui *email*

30 Desember 2011, 13:52wib

Gaudens Suhardi, Kadiv. Content Enrichment

PERTANYAAN :

1. Mengapa SKH Media Indonesia interest (tertarik) pada isu Jawa-luar Jawa pada saat pencalonan presiden 2009?
2. Apakah hubungan antara SKH MI dan Golkar? Sebagai lembaga-lembaga media dan lembaga partai politik?
3. Apakah tim editorial melakukan observasi terhadap reaksi dan sikap masyarakat atas majunya Jusuf Kalla sebagai calon presiden pemilu 2009? Bagaimana observasi itu dilakukan? Lalu hasilnya seperti apa? Setelah observasi dilakukan apa yang bapak antisipasi dari konstruksi masyarakat, atau bagaimana menanggapi tafsir masyarakat atas pencalonan Jusuf Kalla tersebut? Apakah sikap-sikap masyarakat itu berpengaruh dalam proses pembuatan teks editorial tentang Jusuf Kalla? Bagaimana (sejauh apa) hal itu mempengaruhi teks? Apakah tafsir/ sikap masyarakat itu juga secara eksplisit diletakkan pada ulasan editorial? (dapat ditunjukkan contoh-contohnya?)
4. Sejak kapan tepatnya, rubrik bedah editorial muncul pada Media Indonesia baik yang edisi cetak, televisi dan online?

JAWABAN :

Isu Jawa-luar Jawa disorot dalam editorial itu hanya untuk mempertegas amanat konstitusi bahwa presiden seorang warga Indonesia tanpa embel-embel asal-usul. Di dalam masyarakat terlanjur diyakini bahwa presiden mesti orang Jawa.

Sama sekali tidak ada hubungannya. MI independen dan sama sekali tidak menyuarakan kepentingan partai politik. Kendati demikian, MI dan partai politik punya kewajiban sama, yaitu melakukan pendidikan politik kepada warga Negara.

Tim editorial tidak melakukan observasi atas keinginan masyarakat. Akan tetapi, reaksi masyarakat bisa dilihat dari komentar yang disampaikan saat Bedah Editorial di Metro TV atau lewat mediaindonesia.com. Tafsir masyarakat atas pencalonan Jusuf Kalla bukan lagi urusan editorial. Editorial adalah sikap resmi MI sebagai institusi, sama sekali tidak mempertimbangkan sikap masyarakat. Sama sekali tidak ada. Editorial itu sepenuhnya merupakan pandangan atau sikap MI sebagai institusi. Apakah masyarakat terpengaruh oleh sikap MI, mesti dilakukan penelitian tersendiri.

Editorial sudah ada sejak MI dikelola manajemen baru pada 1990-an. Sempat ditempatkan di halaman dalam sebelum akhirnya seperti sekarang, berada di halaman satu. Saya lupa persisnya sejak kapan masuk televisi, coba tanya sekretir Teguh atau bisa dilihat di buku editorial ya..

Wawancara melalui telepon

30 Desember 2011, 15:00 wib

Teguh Nirwahyudi, Sekretaris Redaksi

Peneliti : Rubrik bedah editorial pada SKH Media Indonesia baik yang edisi cetak, televisi dan online itu terbitnya sejak kapan ya pak?

Pak Teguh : Kalau yang bedah editorial yang ditayangkan di Metro TV itu sudah sejak akhir tahun 2000 bulan desember kalau tidak salah..terus berkembang ke media *online* yang Micom itu awal-awal tahun 2004. Ya kemudian awal 2010 setelah kita ada evaluasi ada kerugian materi dari edisi cetak, jadinya kita pasang kembali bedah editorial di surat kabar MI yang cetak di halaman belakang biasanya..